

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
BIDANG PERUMAHAN PADA WILAYAH BINAAN
PT. ANEKA TAMBANG TBK.
DI KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Konsentrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Oleh :

**M U S R I F A H
L4D 008 063**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
BIDANG PERUMAHAN PADA WILAYAH BINAAN
PT. ANEKA TAMBANG TBK.
DI KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh:

**M U S R I F A H
L4D008063**

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 9 Februari 2010

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, Februari 2010

Tim Penguji

Wido Prananing Tyas, ST, MDP – Pembimbing Utama
P.M. Broto Sunaryo, SE, MSP – Penguji I
Ir. Ragil Harjanto, MSP – Penguji II

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pasca sarjana Universitar Diponegoro

Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan diterbitkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam tesis ini ternyata ditemukan duplikasi, jiplakan (plagiat) dari tesis orang lain/institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, 9 Februari 2010

MUSRIFAH

NIM : L4D008063

*Setiap fakta adalah lambang ilmu pengetahuan,
selalu belajar dan berpikir positif,
niscaya Tuhan menganugerahkan hikmah.*

**Tesis ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta,
yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidupku.**

Teruntuk Ibu-Bapak yang semoga selalu dimuliakan Allah Taala, untuk kakak-kakakku, adikku, dan ponakan-ponakanku yang tiada henti berdoa dan mendukungku dalam menempuh perjalanan hidup di dunia ini.

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni merupakan tanggung jawab berbagai pihak, dan kesadaran akan hal ini perlu terus ditumbuhkan. Hadirnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) di negara berkembang, menjadi wacana baru dan terbukanya kesempatan bagi pelaku usaha untuk mewujudkan perannya dalam persoalan tersebut. Sejauh ini belum ada regulasi khusus yang menuntut perusahaan untuk melakukan dukungan di sektor perumahan dan permukiman, serta belum ada standar baku sebagai acuan bagi pelaku usaha yang hendak berkontribusi dalam bidang ini. Munculnya inisiatif perusahaan pertambangan milik negara PT. Aneka Tambang Tbk. dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di sekitar wilayah binaan, menjadi fenomena menarik dan patut dikaji. Perusahaan tersebut melakukan perbaikan rumah warga miskin dengan pola kompetisi antar desa di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang memiliki permasalahan kesehatan akibat buruknya kualitas perumahan. Perusahaan memberikan ketentuan kriteria perbaikan rumah dan dukungan sejumlah dana, selebihnya pelaksanaan kegiatan tersebut dikelola sendiri di masing-masing desa binaan. Melalui sistem semacam ini terbuka kesempatan bagi setiap desa untuk mengerjakan sesuai kondisi masyarakat setempat, akibatnya muncul karakteristik yang berbeda dalam penerapan CSR bidang perumahan di masing-masing desa.

Pertanyaannya adalah bagaimana penerapan CSR bidang perumahan yang digagas PT. Aneka Tambang Tbk. pada wilayah binaan perusahaan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, serta faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap telaksananya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Adapun sasaran dari penelitian ini meliputi mengkaji karakteristik Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.; mengkaji karakteristik penerapan CSR bidang perumahan pada desa-desa binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, dan mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah positivistik dan rasionalistik dengan analisis deskriptif kualitatif, distribusi frekuensi, dan analisis faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei untuk data sekunder, wawancara untuk narasumber yang mengetahui program dan penerapan CSR bidang perumahan di wilayah penelitian, kuesioner untuk responden penerima bantuan, dan observasi lapangan di wilayah penelitian. Pemilihan narasumber menggunakan teknik *snowballing* berdasarkan informasi narasumber kunci, sedangkan responden menggunakan teknik sensus terhadap semua penerima bantuan.

Hasil penelitian ini berupa karakteristik program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. yang cenderung menekankan komitmen pada tataran etika dan hukum. Karakteristik dan tipologi penerapan CSR bidang perumahan di desa-desa se Kecamatan Nanggung dapat didasarkan atas tipologi penerima bantuan, kebijakan desa dalam pembangunan rumah sehat, dan pelaksanaan pembangunan rumah. Faktor-faktor terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bangunan, ketersediaan tukang, dukungan perangkat desa, adanya pendampingan, dan dukungan pembiayaan. Keterkaitan antara karakteristik program CSR bidang perumahan, penerapannya di 10 desa Kecamatan Nanggung, dan faktor-faktor terlaksananya penerapan CSR tersebut sangat ditentukan oleh komitmen kepala desa sebagai mediator antara perusahaan dan masyarakat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perumahan dan permukiman, ekonomi, bisnis, dan CSR khususnya dalam memperkaya *lesson learned* praktek CSR di negara berkembang.

Kata Kunci : *Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)*, Perumahan, Keluarga Miskin.

ABSTRACT

The increase of people welfare in the fulfillment of decent housing is the responsibilities of various parties and the awareness of this is necessary to be developed. The emerging of Corporate Social Responsibility (CSR) concept in development countries is a new discourse and openly the opportunity for corporate to realize their role of this issue. There is no regulation which specifically requires companies to perform a support for housing and settlement sector so far and there is no standard as a reference for corporate to contribute in this sector. The housing development for people in the development area of PT. Aneka Tambang, Tbk., the one of state-owned mining company in becomes an interested phenomenon and necessary to be studied. The company performs a reconstruction for poor houses with competition pattern between villages in Nanggung Sub district of Bogor Regency which has a problem of health due to poor quality housing. The company requires some criteria of house reconstruction and funding support, afterwards the management of this activity is performed themselves of each development villages. Through such system it opens opportunity of respective villages to conduct reconstruction according to the local people condition, as the consequence it may emerge a different characteristic in implementing CSR of housing in the respective villages.

The question is stated that how does the implementation of CSR of housing sector argued by PT. Aneka Tambang Tbk in the company development area in Nanggung Sub district of Bogor Regency, and what factors influencing the implementation of CSR of housing sector in the development area of PT. Aneka Tambang Tbk. Purpose of the research is to study the implementation of CSR of housing sector in the development area of PT. Aneka Tambang Tbk in Nanggung Sub District of Bogor Regency. Objectives of the research are to study the characteristic of CRS program of housing sector of PT. Aneka Tambang Tbk; to study the implementation characteristic of CSR of housing sector among development villages of PT. Aneka Tambang Tbk in Nanggung Sub district of Bogor Regency, and to study the factors influencing CSR implementation of housing sector in the development area of PT. Aneka Tambang Tbk.

The research uses positivism and rationalism approach with qualitative descriptive analysis, frequency distribution, and factor analysis. The data is obtained by survey technique as secondary data, interview for informants who understand the program and implantation of CSR of housing sector in the research area, questionnaire for respondents of grant receiver, and field observation in the research area. Informant selection is used by snowball technique based on the key person information whereas the respondents use census technique to all grant receivers.

Result of the research is a characteristic of CSR program of housing sector of PT. Aneka Tambang Tbk which may conclude that the company tends to emphasize the performance of ethics and law level. The characteristic and typology of CSR implementation of housing sector among villages in Nanggung Sub district is based on the typology of grant receiver, village policy in the development of healthy houses, and the execution of house development. Factors performing the implementation of CSR of housing sector are influenced by the support of materials and craftsmen availability, village staffs, assistance, and financial support. The relevance between characteristic between CSR program of housing sector, its implementation in 10 villages of Nanggung Sub district, and the factors performing CSR implementation is greatly decided by the commitment of village leader as a mediator between the company and community. It is expected that the research becomes an input to the development of science in housing and residence sector, economics, business, and especially CSR to enrich lesson learned of CSR practice in the development countries.

Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation, Housing Sector, Poor Family.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan semesta alam, atas tuntunan dan karsaNya tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akademik sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Konsentrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis berjudul **Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Wilayah Binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor**, membahas hasil penelitian tentang praktek tanggung jawab sosial sebuah perusahaan milik negara dalam bidang perumahan di wilayah binaan dengan permasalahan kesehatan lingkungan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rumah dan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam pembentukan karakter bangsa. Dukungan perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan papan yang layak adalah bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. CSR bidang perumahan yang dirancang generik, ketika diterapkan di lapangan mempunyai kemungkinan untuk mengikuti karakteristik komunitas penerima manfaat. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji tipologi yang terjadi dalam penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di 10 desa Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ibu Wido Prananing Tyas, ST, MDP. selaku pembimbing utama dan pertama, atas arahan dan masukan dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih kepada Bapak PM Broto Sunaryo, SE, MSP, atas ulasan dan masukan dalam sidang pembahasan dan sidang tesis. Terima kasih kepada Bapak Ir. Ragil Harjanto, MSP. atas ulasan dalam sidang tesis. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Program NUSSP yang telah menyponsori penyelenggaraan Modular Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (MP4). Terima kasih kepada semua Ibu/Bapak Dosen MPWK Undip, khususnya kepada Bapak DR. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc. dan Bapak Ir. Jawoto Sih Setiono, MDP. atas ilmu dan pandangan-pandangan yang memperluas wawasan penulis. Terima kasih Ibu Ir. Sunarti, MT. sebagai dosen wali di kelas B. Terima kasih kepada Bapak Widjonarko, ST, MT. dan Mas Pangsi, ST. yang bersedia membantu dalam pembuatan peta Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Terima kasih kepada pimpinan dan jajaran pengelola Balai PKPWTk khususnya Bapak Hasto Agung Saputro, ST, MT. dan Bapak Karjoko, yang telah memfasilitasi selama penulis mengikuti modul satu sampai 6 dan sepanjang penulisan tesis. Terima kasih kepada Mbak Yunita, Mbak Luluk, dan Mas Imam atas dedikasi dan bantuannya selama mengikuti modular MP4. Terima kasih kepada Mbak Ratih atas koreksi redaksi tesis ini.

Terima kasih kepada temanku Atin yang telah bersedia menemani, membantu, dan menampung penulis ketika survey di Kabupaten Bogor. Terima

kasih kepada Mbak Yati yang bersedia meminjamkan kamera selama penulis di Bogor. Terima kasih kepada Aa' Jajat dan Aput yang dengan sigap mengantarkan penulis menyusuri sepanjang jalan di Kecamatan Nanggung. Terima kasih kepada Teh Iis yang bersedia menampung penulis ketika survei di Desa Cisarua. Terima kasih kepada Bapak Supriadi dan Bapak Tirta di Kecamatan Nanggung, atas data dan informasinya tentang kondisi Kecamatan Nanggung. Terima kasih kepada Bapak Firdous Kepala Desa Hambaro, Bapak Agus dan Ibu Kades Malasari, Bapak Fahir Ketua RT di Kampung Jangkar Desa Cisarua, Bapak Mukim Ketua RW 09 Kampung Banar Desa Nanggung, Bapak Pepen Sopandi Kepala Desa Bantar Karet, Bapak Rohman dan keluarga di Desa Pangkal Jaya, Bapak Maksum Kepala Desa Kalong Liud, Bapak Kepala Desa Parakan Muncang, Bapak Kepala Desa Sukaluyu, Bapak Idris Kepala Desa Cisarua, atas kerjasamanya dan informasinya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak penerima bantuan perbaikan rumah yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara. Terima kasih kepada Bapak Maryono manajer CSR PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor dan Bapak Khairul selaku konsultan Pengembangan Masyarakat, atas informasinya.

Terima kasih kepada semua teman MP4, terima kasih kepada semua teman seperjuangan di kelas B, dan teman-teman tercintaku di mess putri, Ibu Linda, Mbak Irma, Mbak Monica, Ibu Tety, Ibu Meyco, Ibu Dini dan tentunya Derryl, Heri, Anna, dan China' atas *supportnya* selama mengikuti modular dan penyusunan tesis ini. Terima kasih kepada Ibu/Bapak/teman-teman di kantor Adpkps Ibu Baby, Ibu Eri, Ibu Nia, Bapak Odong, Bapak Udung, Bapak Heru, Bapak Fadel, Ibu Tuti, Ibu Niken, Rina, Rizka, Mas Iwan, Bapak Mesir, Bapak Sakino, Ibu Joke, Tommy, dan Bapak Warmin, atas dukungannya selama penulis menjadi bagian dari Adpkps. Terima kasih kepada Bapak Ir. H. Khairuddin Thabrani, M.Eng. atas nasehat dan diskusi selama ini. Terima kasih kepada Ibu Soelis, Ibu Krisna, Ibu Suci, Ibu Mimin, Ibu Guru Rini, Ibu Guru Reny, Resti, Nina, Keluarga Bapak Haji Idris. Terima kasih kepada keluargaku tercinta yang tiada henti berdoa dan menginspirasi penulis dalam setiap langkah di muka bumi ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang telah membantu penyelesaian tugas ini.

Tesis ini disusun dengan berbagai keterbatasan dan barangkali jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik, saran, dan masukan, akan penulis terima dengan terbuka bagi perbaikan tesis ini. Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masukan bagi pengambilan kebijakan dan masukan bagi perbaikan penerapan CSR bidang perumahan yang mulai ramai dilaksanakan para pebisnis di negeri ini dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semarang, Februari 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Sasaran Penelitian.....	6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4.1. Lingkup Materi	6
1.4.2. Lingkup Wilayah	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Kerangka Pemikiran	8
1.7. Metodologi Penelitian.....	10
1.7.1. Pendekatan Penelitian.....	10
1.7.2. Metoda Penelitian.....	10
1.7.2. Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pemilihan Sampel, dan Teknik Analisis	11
1.8. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF LITERATUR.....	17
2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Milik Negara dalam Bidang Perumahan.....	17
2.1.1. Konsep Dasar CSR dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial.....	17
2.1.2. Perumahan Layak sebagai Hak Asasi Manusia dan Bagian dari Kesejahteraan Masyarakat.....	21
2.1.3. Pranata Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	22
2.1.4. Merumuskan Program CSR Bidang Perumahan ...	27
2.2. Penerapan CSR Bidang Perumahan sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	29

2.2.1.	Pembagian Peran dalam Penerapan Program Perumahan	30
2.2.2.	Teori Perilaku Sosial dalam Pelaksanaan Program	32
2.3.	Belajar dari Pengalaman Penerapan CSR Bidang Lain	33
2.3.1.	Penerapan CSR Bidang Pengelolaan Lingkungan di Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan	33
2.3.2.	Penerapan CSR dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara.....	34
2.3.3.	Penerapan CSR Bidang Pertanian dan Perdesaan di Thailand dan Pakistan.....	35
2.4.	Variabel Penerapan CSR Bidang Perumahan.....	36

BAB III GAMBARAN PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN DI KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR.... 37

3.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	37
3.1.1.	Kondisi Sosial Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	38
3.1.2.	Kondisi Ekonomi Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	41
3.1.3.	Kondisi Fisik Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	42
3.2.	Gambaran Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.....	45
3.2.1.	Gambaran Program CSR PT. Aneka Tambang Tbk.	45
3.2.2.	Gambaran Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.	46
3.2.3.	Lomba Perbaikan Rumah antar Desa di Kecamatan Nanggung.....	48
3.3.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat	49
3.3.1.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Malasari	49
3.3.2.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Cisarua.....	50
3.3.3.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Curug Bitung	51
3.3.4.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Nanggung.....	52
3.3.5.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Bantar Karet.....	52
3.3.6.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Pangkal Jaya	53
3.3.7.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Kalong Liud.....	53

3.3.8.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Parakan Muncang	54
3.3.9.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Hambaro	55
3.3.10.	Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Sukaluyu	55
3.4.	Kondisi Penerima Bantuan Perbaikan Rumah.....	58
3.4.1.	Kondisi Sosial Ekonomi Penerima Bantuan Perbaikan Rumah.....	57
3.4.2.	Kondisi Ekonomi Penerima Bantuan Perbaikan Rumah.....	62
3.4.3.	Kondisi Rumah Penerima Bantuan.....	63

BAB IV	PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN PT. ANEKA TAMBANG TBK. DI KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR.....	69
4.1.	Kajian Karakteristik Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.	69
4.1.1.	Analisis Karakteristik Program CSR Bidang Perumahan terhadap Model Performa CSR.....	69
4.1.2.	Pembahasan Karakteristik Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.....	75
4.2.	Kajian Karakteristik dan Tipologi Penerapan CSR Bidang perumahan di Wilayah Binaan PT. Aneka Tambang Tbk...	80
4.2.1.	Analisis Karakteristik Penerapan CSR Bidang Perumahan dari Sisi Kondisi Masyarakat Penerima Bantuan Perbaikan Rumah	81
4.2.2.	Analisis Karakteristik Penerapan CSR Bidang Perumahan dari Sisi Kelembagaan Perbaikan Rumah.....	86
4.2.3.	Analisis Karakteristik Penerapan CSR Bidang Perumahan dari Sisi Proses Pelaksanaan Perbaikan Rumah.....	87
4.2.4.	Pembahasan Karakteristik dan Tipologi Penerapan CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.....	89
4.3.	Kajian Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Terlaksananya Penerapan CSR Bidang Perumahan di Kecamatan Nanggung.....	107
4.3.1.	Penilaian Penerima Bantuan terhadap Terlaksananya Perbaikan Rumah	108
4.3.2.	Pembahasan Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Terlaksananya Penerapan CSR Bidang Perumahan di Kecamatan Nanggung	110
4.4.	Pembahasan Keterkaitan Hasil Analisis	117

BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	125
	5.1. Kesimpulan	125
	5.2. Rekomendasi	127
DAFTAR PUSTAKA		130

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Matrik Desain Penelitian	14
TABEL II.1	Dimensi Performa Sosial Perusahaan	24
TABEL II.2	Variabel Penerapan CSR Bidang Perumahan.....	36
TABEL III.1	Jumlah Keluarga di setiap Desa Kecamatan Nanggung	37
TABEL III.2	Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Nanggung	39
TABEL III.3	Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Penduduk Kecamatan Nanggung.....	40
TABEL III.4	Tingkat Perekonomian Penduduk Kecamatan Nanggung Berdasarkan Kesejahteraan Keluarga	42
TABEL III.5	Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Dinding	43
TABEL III.6	Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Lantai	43
TABEL III.7	Kondisi Rumah Berdasarkan Jenis Atap	44
TABEL IV.1	Karakteristik Program Berdasarkan Motivasi Perusahaan. .	72
TABEL IV.2	Karakteristik Program Berdasarkan Pengalaman Perusahaan	74
TABEL IV.3	Karakteristik Program Berdasarkan Latar Belakang Pimpinan	75
TABEL IV.4	Karakteristik Penerapan CSR Bidang Perumahan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor	95
TABEL IV.5	Tipologi Penerapan CSR Bidang Perumahan.....	103
TABEL IV.6	Nilai MSA setiap Variabel.....	109
TABEL IV.7	Kontribusi setiap Variabel terhadap Faktor Terbentuk	110
TABEL IV.8	Telaah Temuan Kasus.....	116

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Lokasi Penelitian Penerapan CSR Bidang Perumahan pada Wilayah Binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.....	7
GAMBAR 1.2	Kerangka Pemikiran.....	9
GAMBAR 1.3	Kerangka Analisis Penelitian Karakteristik Pelaksanaan CSR Bidang Perumahan pada Desa Binaan PT. Aneka Tambang Tbk	16
GAMBAR 2.1	Triple Bottom Line.....	20
GAMBAR 2.2	Model Performa CSR.....	23
GAMBAR 2.3	Elemen dalam Penerapan Kegiatan.....	32
GAMBAR 3.1	Proses Lomba Perbaikan Rumah antar Desa	48
GAMBAR 3.2	Persebaran Lokasi Perbaikan Rumah.....	56
GAMBAR 3.3	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan	57
GAMBAR 3.4	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Usia	58
GAMBAR 3.5	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
GAMBAR 3.6	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	60
GAMBAR 3.7	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	61
GAMBAR 3.8	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Lama Tinggal ..	61
GAMBAR 3.9	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Jumlah Penghasilan Harian	62
GAMBAR 3.10	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Kemampuan Menabung.....	63
GAMBAR 3.11	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Status Penguasaan Tanah.....	64
GAMBAR 3.12	Jumlah Penerima Bantuan Berdasarkan Luas Tanah.....	65
GAMBAR 3.13	Konstruksi Rumah Berdasarkan Jenis Dinding	65
GAMBAR 3.14	Konstruksi Rumah Berdasarkan Jenis Atap.....	66
GAMBAR 3.15	Kondisi Kesehatan Rumah Berdasarkan Jenis Lantai.....	67
GAMBAR 3.16	Kondisi Rumah Berdasarkan Ketersediaan Kamar Mandi dan Kakus	67
GAMBAR 3.17	Kondisi Rumah Berdasarkan Ketersediaan Prasarana Air Bersih.....	68
GAMBAR 4.1	Gambaran Program CSR Bidang Perumahan PT. Antam Tbk.	71

GAMBAR 4.2	Kecenderungan Performa CSR PT. Aneka Tambang Tbk.	79
GAMBAR 4.3	Jumlah Rumah Berdasarkan Perluasan Ruang.....	83
GAMBAR 4.4	Perluasan Rumah.....	84
GAMBAR 4.5	Kecukupan Luas Rumah	85
GAMBAR 4.6	Peningkatan Kenyamanan Berdasarkan Konstruksi Dinding.....	85
GAMBAR 4.7	Peningkatan Kenyamanan Berdasarkan Konstruksi Atap.....	86
GAMBAR 4.8	Tipologi Sebaran Lokasi Perbaikan Rumah.....	104
GAMBAR 4.9	Tipologi Perbaikan Ringan	105
GAMBAR 4.10	Tipologi Pemugaran Rumah	105
GAMBAR 4.11	Tipologi Pembangunan Rumah Dekat Bangunan Lama.	106
GAMBAR 4.12	Tipologi Pembangunan Rumah Baru	107
GAMBAR 4.13	Penilaian Penerima Bantuan terhadap Faktor yang Berpengaruh dalam Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat.....	108
GAMBAR 4.14	Faktor Terlaksananya Penerapan CSR Bidang Perumahan di 10 Desa Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor	111
GAMBAR 4.15	Keterkaitan Karakteristik Program, Penerapan, dan Faktor yang Memengaruhi Penerapan CSR Bidang Perumahan.....	118
GAMBAR 4.16	Faktor Penentu Penerapan CSR Bidang Perumahan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.....	120
GAMBAR 4.17	Komitmen terhadap Perbaikan Kualitas Rumah.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Kondisi Masyarakat Penerima Bantuan Perbaikan Rumah	133
	1. Desa Malasari Malasari.....	133
	2. Desa Cisarua	135
	3. Desa Curug Bitung.....	138
	4. Desa Nanggung.....	140
	5. Desa Bantar Karet.....	142
	6. Desa Pangkal Jaya.....	144
	7. Desa Kalong Liud	147
	8. Desa Parakan Muncang.....	149
	9. Desa Hambaro.....	151
	10. Desa Sukaluyu	153
LAMPIRAN 2	Data Hasil Wawancara.....	155
LAMPIRAN 3	Faktor-faktor Terlaksananya Penerapan CSR Bidang Perumahan Menurut Penilaian Penerima Bantuan.....	179
LAMPIRAN 4	Hasil Analisis Faktor.....	182

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut Bank Dunia adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan yang terkait untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara-cara yang baik bagi kepentingan bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan, dan masyarakat pada umumnya (Kiroyan, 2009). Adapun *World Business Council for Sustainable Development* memberikan pengertian terhadap CSR sebagai komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya (Wibisono, 2007). Berdasarkan definisi tersebut sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan melalui usaha yang dijalankan secara etis.

Penekanan CSR meliputi perilaku usaha secara etis, pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan hak karyawan, anti korupsi, kepedulian terhadap lingkungan, kegiatan *philanthropy* perusahaan dan pemberdayaan masyarakat (Kiroyan, 2009). Disamping hal tersebut, dalam menjalankan usaha/bisnisnya perusahaan juga harus mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku, meliputi peraturan perusahaan, lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, anti korupsi, dan regulasi stok pasar. Apabila hal tersebut dianut dengan benar, perusahaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini sejalan dengan komponen dasar beroperasinya perusahaan yang dikenal dengan *triple bottom line* yakni keuntungan, masyarakat, dan lingkungan (*profit, people, planet*).

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sama artinya dengan mengupayakan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk upaya tersebut sekurang-sekurangnya dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana dalam etika bisnis perusahaan. Salah satu hak dasar tersebut adalah pemenuhan kebutuhan akan papan, sehingga dunia usaha memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perumahan dan permukiman. Berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, beberapa perusahaan telah memberikan kontribusinya di bidang perumahan dan permukiman meskipun dukungan tersebut lebih banyak ditujukan bagi pekerja perusahaan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam salah satu pasalnya memuat kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ditanggapi dengan beragam sikap oleh berbagai pihak. Sebagian pihak menanggapinya dengan penuh pengharapan kewajiban ini dapat dipenuhi dan perseroan dapat turut berperan dalam mengurangi permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan. Namun bagi sebagian pihak lainnya, kewajiban tersebut dinilai tidak tepat karena menambah beban bagi perusahaan, sehingga jauh dari prinsip kesukarelaan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Dalam bidang perumahan dan permukiman sebetulnya belum ada regulasi secara khusus yang menuntut perusahaan untuk melakukan dukungan di sektor ini. Jika ada semangat pemerintah untuk mendayagunakan potensi CSR untuk pembangunan perumahan, tidak lebih dari himbauan. Penentuan dilaksanakan dukungan pembangunan serta bentuk-bentuk pelaksanaan yang dipilih, diserahkan secara penuh sesuai kebijakan perusahaan, selama dalam upaya mendukung program pemerintah daerah. Dibebaskannya peran perusahaan tersebut memunculkan beragam bentuk-bentuk kegiatan di bidang perumahan, meliputi pembangunan perumahan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, atau kegiatan lain yang mendukung perumahan dan permukiman.

Perusahaan jasa PT. Telkom Tbk. misalnya tercatat telah melaksanakan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) disamping kegiatan

peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap akses informasi. Perusahaan manufaktur PT. HM. Sampoerna telah melakukan dukungan terhadap pembangunan perumahan melalui penyediaan air bersih bagi warga masyarakat. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari kegiatan utama CSR di bidang pendidikan. Perusahaan tambang PT. Kaltim Prima Coal (KPC) misalnya telah melakukan dukungan di bidang perumahan dalam hal sanitasi (Bisnis & CSR edisi khusus, Januari-Februari, 2009). Ragam dukungan pembangunan perumahan melalui sumber daya CSR tersebut selayaknya patut dikaji untuk menjadi model bagi perusahaan sejenis dalam melaksanakan kegiatan CSR.

Pelaksanaan CSR oleh perusahaan milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05-MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang biasa dikenal dengan PKBL. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit bidang perumahan, namun BUMN memiliki peluang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan melalui Program Bina Lingkungan bidang pengembangan prasarana dan sarana umum atau bidang lain yang terkait. Demikian yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Tbk., salah satu perusahaan tambang milik negara dengan produk utama antara lain nikel, bauksit, dan emas. Tanpa aturan normatif yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan sebagaimana bidang-bidang bantuan yang disebut pada peraturan PKBL, PT. Aneka Tambang Tbk. telah merealisasikan inisiatifnya dengan menerapkan CSR bidang perumahan di beberapa wilayah binaannya.

Kegiatan pembangunan perumahan yang dilakukan PT. Aneka Tambang Tbk. memiliki karakteristik yang menarik karena pembangunan perumahan dijadikan pintu masuk bagi tercapainya tujuan kegiatan yakni peningkatan kesehatan masyarakat miskin. Di wilayah binaan perusahaan, Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor, telah dilakukan lomba perbaikan rumah penduduk miskin di 10 desa dengan sasaran keluarga miskin yang terdapat ibu hamil atau balita. Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ini mempunyai perhatian khusus terhadap arti pentingnya perumahan bagi

pembentukan kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini mendukung suatu pandangan bahwa perbaikan perumahan merupakan upaya perbaikan mutu hidup masyarakat (Budihardjo-Ed, 2009). Atas komitmen perusahaan dalam melaksanakan pembangunan perumahan bagi masyarakat tersebut, PT. Aneka Tambang Tbk. memperoleh penghargaan dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan agar lebih meningkatkan penerapan CSR di bidang perumahan.

Penerapan CSR bidang perumahan oleh PT. Aneka Tambang Tbk. di 10 desa Kecamatan Nanggung melalui pola kompetisi ini sebenarnya hanya diberlakukan di UBPE Pongkor saja oleh Satuan Kerja Pengembangan Masyarakat perusahaan ini. Hal ini merupakan penerjemahan dan penjabaran program utama CSR yang diamanatkan dalam *masterplan* tanggung jawab sosial perusahaan dan merespon adanya permasalahan kesehatan masyarakat akibat lingkungan hunian yang tidak layak. Perusahaan belum memiliki acuan baku dalam mengimplementasikan CSR bidang perumahan, oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk menemukan bentuk-bentuk penerapan CSR bidang perumahan berdasarkan kondisi di lapangan.

Sebagai wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor, Kecamatan Nanggung merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang kondisi kesehatan masyarakatnya perlu ditingkatkan. Banyak kasus kematian ibu hamil dan balita yang terjadi di sana, akibat buruknya kualitas lingkungan dan kondisi rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Belum lama ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa 50% penduduk Kabupaten Bogor tidak memiliki MCK, dan wilayah tersebut sering menjadi sarang penyakit endemik (<http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=newsdetail&id=104944>, 2009). Masyarakat yang tinggal di desa-desa memanfaatkan tanah pekarangan atau sungai sebagai tempat buang air. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni masih belum menjadi prioritas bagi warga miskin karena yang lebih utama bagi mereka adalah pemenuhan pangan dan sandang. Kesadaran masyarakat untuk hidup sehat di lingkungan hunian pun masih perlu ditingkatkan. Pemerintahan desa sebagai pengelola wilayah

administrasi yang terdekat dengan masyarakat, belum mampu berperan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan warganya. Kondisi yang demikian menyebabkan PT. Aneka Tambang Tbk. tergerak untuk melakukan perbaikan rumah-rumah penduduk miskin melalui lomba antar desa se Kecamatan Nanggung. Penerapan CSR bidang perumahan ini selain mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan perusahaan, juga dilakukan sesuai dengan kebijakan dan inovasi masing-masing desa, sehingga setiap desa memiliki karakteristik penerapan yang beragam.

Keragaman penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. menarik untuk dikaji berikut faktor yang mempengaruhi terlaksananya penerapan tersebut. Faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan penerapan CSR bidang perumahan dan menjadi masukan bagi pemerintah dan perusahaan dalam pelaksanaan CSR bidang perumahan ke depan.

1.2. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dimunculkan beberapa isu menarik diantaranya adalah bahwa tanpa regulasi normatif, perusahaan milik negara PT. Aneka Tambang Tbk. telah melaksanakan kegiatan pembangunan perumahan sebagai upaya mewujudkan kesehatan bagi masyarakat miskin. Isu kedua adalah bahwa dalam merealisasikan komitmen di bidang perumahan, perusahaan menerapkan pola khusus melalui kompetisi perbaikan rumah antar desa. Isu ketiga adalah bahwa penerapan pola khusus semacam ini dapat dijadikan sebagai alternatif model penanganan lingkungan perumahan kumuh/tidak layak huni bagi berbagai pelaku baik pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan lainnya.

Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam kajian ini adalah (1) bagaimana penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, dan (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di lokasi tersebut.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Adapun sasaran dari penelitian ini meliputi :

- Mengkaji karakteristik CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.
- Mengkaji karakteristik dan tipologi penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor;
- Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

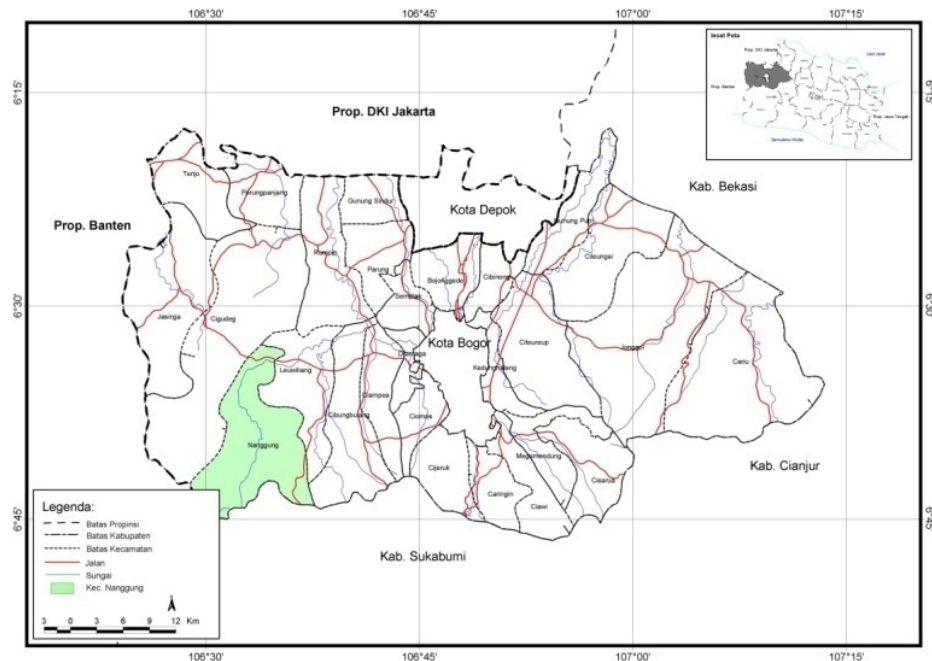
1.4. Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1. Lingkup Materi

Karakteristik CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. merupakan ciri khas Program CSR bidang Perumahan yang dirancang dan dikembangkan oleh PT. Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Lingkup karakteristik program yang akan dikaji berdasarkan kajian literatur dipengaruhi oleh motivasi dan pengalaman perumahan, serta latar belakang pimpinan perusahaan. Lingkup karakteristik penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor meliputi kondisi masyarakat penerima bantuan, kelembagaan, dan proses pelaksanaan. Lingkup faktor yang berpengaruh dalam penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor meliputi adanya kebutuhan menghuni rumah layak, pendampingan, partisipasi masyarakat, dukungan perangkat desa, dukungan pembiayaan, ketersediaan tenaga tukang, ketersediaan bahan bangunan, dan adanya insentif/*reward*.

1.4.2. Lingkup Wilayah

Objek penelitian adalah penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. yang berlokasi di sekitar Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor yakni Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Wilayah studi ini dipilih karena merupakan desa yang memiliki perumahan tidak layak secara kesehatan sesuai tujuan penerapan CSR perusahaan, yakni meningkatkan kesehatan masyarakat di desa binaan perusahaan. Lokasi penelitian digambarkan dalam Gambar 1.1.



Sumber : Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, 2009

GAMBAR 1.1.
LOKASI PENELITIAN PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN
PADA WILAYAH BINAAN PT. ANTAM TBK. DI KECAMATAN
NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

1.5. Manfaat Penelitian

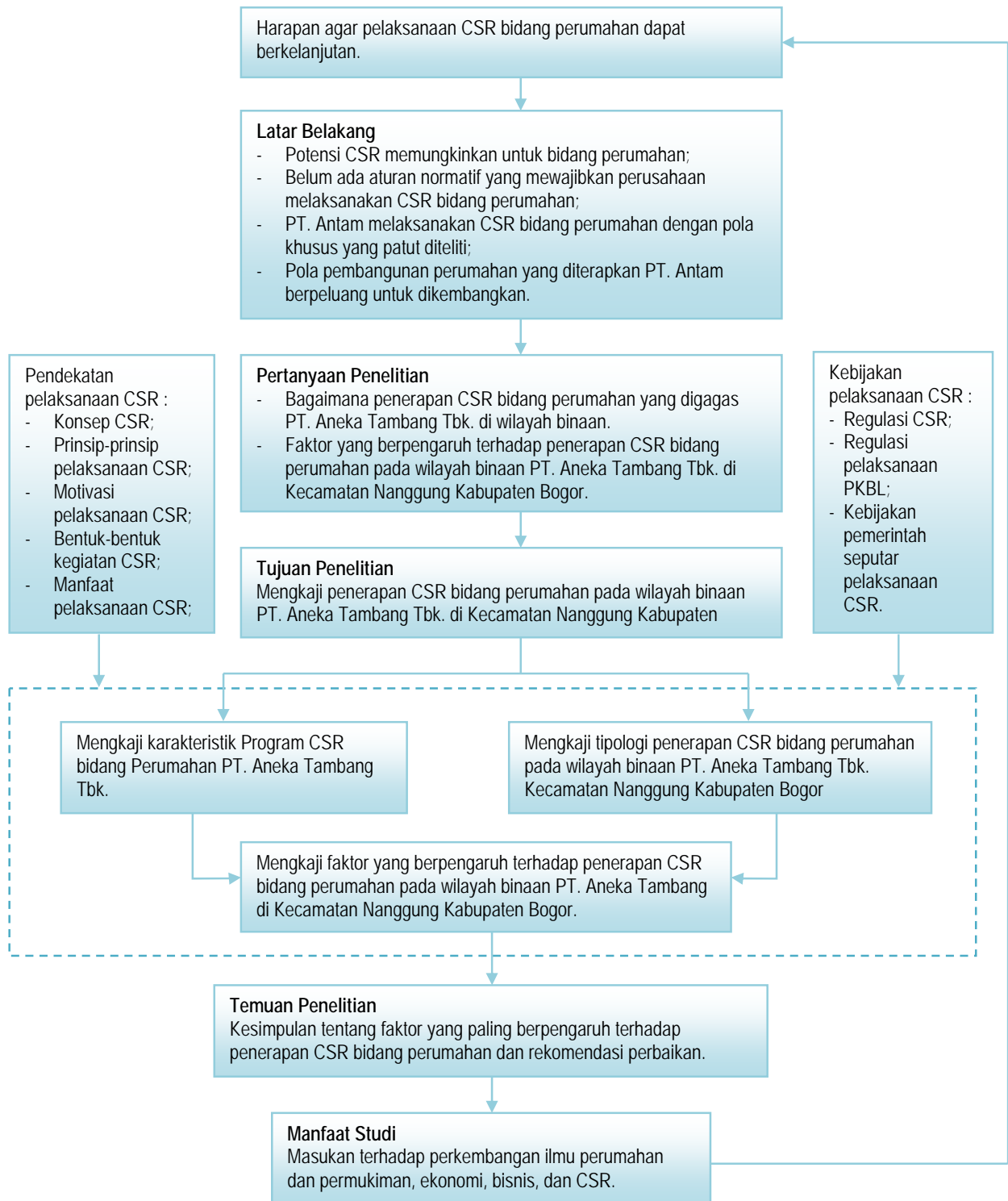
Output dalam penelitian adalah terkajinya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. dan terkajinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terlaksananya penerapan CSR bidang

perumahan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perumahan dan permukiman, ekonomi, bisnis, dan CSR. Secara khusus karakteristik penerapan CSR dalam bidang perumahan hasil temuan, diharapkan dapat memperkaya *lesson learned* praktek-praktek CSR di negara berkembang.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dirumuskan berdasarkan harapan bahwa penerapan CSR bidang perumahan dapat berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat dan menyejahterakan masyarakat. Perlunya kajian penerapan CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. ini dilatarbelakangi oleh adanya potensi CSR yang memungkinkan sebagai sumber daya dalam bidang perumahan, sementara itu belum ada aturan normatif yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR bidang perumahan, selain itu pelaksanaan CSR bidang perumahan PT. Antam Tbk. melalui pola khusus yang patut diteliti dan berpeluang untuk dikembangkan. Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya dirumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.

Dilandasi oleh teori, *best practices*, kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dalam kajian ini ditentukan sasaran yakni melakukan kajian terhadap Program CSR bidang perumahan yang dirancang oleh PT. Aneka Tambang Tbk. dan kajian terhadap penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, serta kajian terhadap faktor yang berpengaruh terhadap terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah studi. Faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong penerapan CSR bidang perumahan, menjadi dasar merumuskan arahan atau masukan bagi penerapan CSR bidang perumahan ke depan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1.2.



Sumber : Analisi penulis, 2009

GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian menjabarkan tentang cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk memperoleh informasi dan menyelesaikan permasalahan penelitian. Tujuan penelitian adalah mengkaji penerapan CSR bidang perumahan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi dasar atas peristiwa yang terjadi. Dalam sub bab ini dijabarkan tentang pendekatan, metoda, dan teknik penelitian meliputi teknik pengumpulan data, teknik sampling, dan teknis analisis yang dilakukan.

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengkaji penerapan CSR bidang perumahan di lokasi penelitian, dalam pemilihan variabel-variabel penelitian didasarkan atas teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian dan contoh-contoh pembelajaran yang pernah ditemukan sebelumnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah positivistik dan rasionalistik.

1.7.2. Metoda Penelitian

Metoda penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan penelitian. Sesuai dengan tema penelitian yang akan dilakukan dengan sebagian variabel yang tidak terukur, penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dan kuantitatif. Pembahasan metoda penelitian ini meliputi metoda pengumpulan data dan metoda analisis data.

Metoda pengumpulan data merupakan prosedur memperoleh dan informasi yang terdiri atas permasalahan, konteks, isu, dan *lesson learned* yang terjadi pada objek penelitian. Sebelum melangkah pada proses pengumpulan data, terlebih dahulu perlu diketahui jenis data apa saja yang diperlukan dalam menjawab permasalahan penelitian. Data berbentuk kata-kata, informasi, dokumen tertulis, dan foto. Tabel data dan teknik pengumpulan data dapat dilihat dalam TABEL I.1.

Metoda analisis merupakan prosedur analisis yang dilakukan untuk menjawab sasaran dan tujuan penelitian, dengan prosedur analisis sebagai berikut:

1. Analisis karakteristik Program CSR Bidang Perumahan yang dirancang PT. Aneka Tambang Tbk., dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskripsikan CSR bidang perumahan di sekitar areal pertambangan. Alat analisis yang dipergunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif.
2. Analisis karakteristik dan tipologi penerapan CSR bidang perumahan untuk mengkaji dan mendeskripsikan penerapan CSR bidang perumahan di 10 desa binaan PT. Aneka Tambang Unit Pongkor. Alat analisis yang dipergunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif dan distribusi frekuensi.
3. Analisis faktor pendorong terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan untuk menemukan dan mengkaji faktor terkuat dalam menentukan terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. Alat analisis yang digunakan adalah teknis analisis faktor dan deskriptif kualitatif.

Proses analisis di atas saling terkait karena hasil dari analisis menjadi input bagi analisis selanjutnya, secara sederhana proses analisis digambarkan dalam Gambar 1.3.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pemilihan Sampel, dan Teknik Analisis

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sebagai bahan analisis dalam kajian ini terdiri atas data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui teknik survei pada instansi PT. Aneka Tambang Tbk., Pemerintah Kecamatan Nanggung, Pemerintah 10 desa penelitian di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Data primer seperti kondisi rumah yang diperbaiki, kondisi perumahan penduduk dan aktivitas penduduk, akan diperoleh melalui teknik pengamatan di setiap desa penelitian. Data primer pendapat narasumber tentang program dan penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. Unit Pongkor di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor diperoleh melalui teknik wawancara. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut meliputi :

1. Masyarakat penerima bantuan,
2. Pelaku CSR PT. Aneka Tambang Tbk.,

3. Perangkat Kecamatan Nanggung, dan
4. Perangkat Desa/tokoh masyarakat.

Data primer pendapat masyarakat tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan diperoleh melalui teknik kuesioner/angket. Jenis data dan teknik perolehan data dapat digambarkan dalam Tabel I.1.

b. Teknik Pemilihan Sampel

Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multistage*, yaitu teknik *snowballing* dan teknik sensus. Narasumber 2, 3, dan 4 dipilih melalui teknik *snowballing* berdasarkan rekomendasi narasumber kunci. Narasumber kunci adalah perangkat kecamatan yakni Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Nanggung. Melalui rekomendasi narasumber kunci ini diperoleh nama-nama narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di setiap desa, para penerima bantuan, dan pihak perusahaan inisiator program. Adapun teknik sensus, cara pengumpulan data jika seluruh elemen populasi diteliti satu per satu (Supranto, 2004:2), digunakan untuk mendata responden sumber penerima bantuan perbaikan rumah (narasumber 1). Yang menjadi responden narasumber 1 adalah seluruh penerima bantuan perbaikan rumah yang dalam hal ini diwakili kepala keluarga atau anggota keluarga yang cukup dewasa.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam analisis adalah :

1. Analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengkaji dan menggambarkan secara detil mengenai karakteristik Program CSR Bidang Perumahan serta karakteristik dan tipologi penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
2. Analisis distribusi frekuensi untuk menjelaskan distribusi tipologi penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di 10 desa Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

3. Analisis faktor (*R Factor Analysis*) untuk meringkas dan mereduksi variabel dan menentukan faktor terkuat dalam mendorong terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah di 10 desa binaan PT. Aneka Tambang Tbk. Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

Analisis yang dilakukan dalam kajian ini dapat digambarkan dalam kerangka analisis sebagaimana Gambar 1.3.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam bab 1 diuraikan mengenai latar belakang, perumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup, manfaat penelitian, kerangka berpikir logis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Dalam bab 2 diuraikan mengenai kajian literatur yang diperlukan dalam penelitian, yakni konsep CSR dalam kerangka kesejahteraan masyarakat, dan penerapan CSR bidang perumahan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, serta faktor terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan.

Bab 3 menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan fisik desa-desa di Kecamatan Nanggung, kondisi sosial, ekonomi, dan fisik penerima bantuan perbaikan rumah, dan gambaran program CSR bidang perumahan perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk. sebagai inisiator penerapan CSR bidang perumahan.

Bab 4 menguraikan tentang analisis dan pembahasan data primer dan sekunder yang diperoleh, meliputi analisis deskriptif kualitatif dan analisis interdependensi yakni analisis faktor.

Bab 5 menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.

TABEL I.1
MATRIK DESAIN PENELITIAN

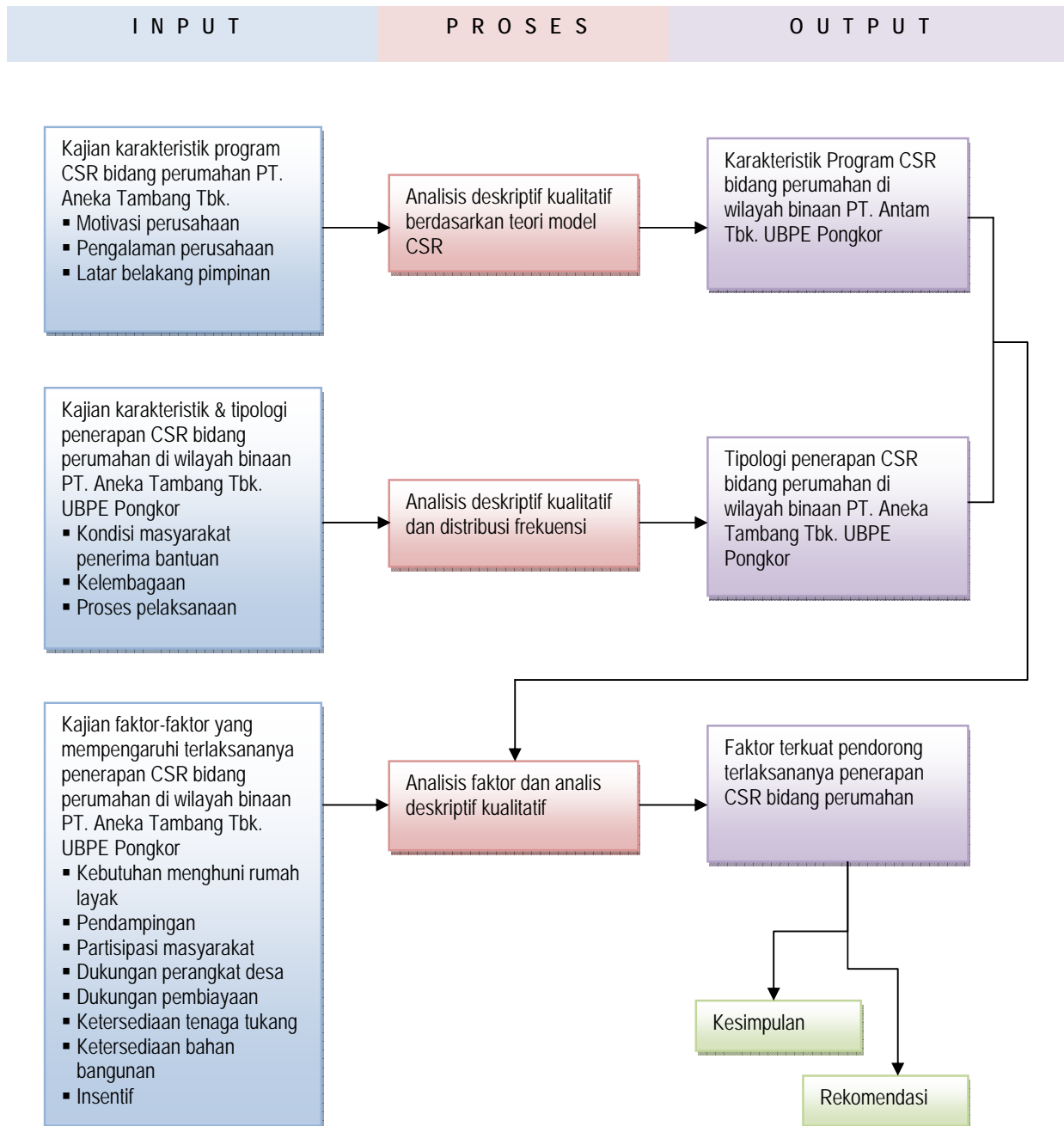
Tujuan penelitian : mengkaji penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor

No	Sasaran	Analisis	Variabel	Data	Bentuk	Teknik	Narasumber
1.	Kajian karakteristik Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.	Analisis deskriptif kualitatif	Motivasi perusahaan	a. Ekonomi	- Dokumen masterplan, - TOR kegiatan, - Informasi	W, S	Pelaku CSR PT. Aneka Tambang Tbk.
				b. Hukum			
				c. Etika			
				d. Kesukarelaan			
			Pengalaman perusahaan	a. Pengalaman positif perusahaan	Informasi	W, S	Pelaku CSR PT. Aneka Tambang Tbk.
				b. Pengalaman negatif perusahaan	Informasi	W, S	Pelaku CSR PT. Aneka Tambang Tbk.
2.	Kajian Karakteristik dan tipologi penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk.	Analisis deskriptif kualitatif, distribusi frekuensi	Kondisi penerima bantuan	a. Umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, jumlah keluarga	Informasi, foto	W, O	Masyarakat
				b. Tingkat penghasilan, Kemampuan menabung	Informasi, foto	W, O	Masyarakat
				c. Luas rumah, luas lahan, kepemilikan MCK, ketersediaan air bersih	Informasi, foto	W, O	Masyarakat
			Kelembagaan	a. Pelaku yang terlibat	Informasi, dokumen	W, S	Perangkat desa & kecamatan, Tokmas
				b. Aturan main	Informasi, dokumen	W, S	Perangkat desa & kecamatan, Tokmas

No	Sasaran	Analisis	Variabel	Data	Bentuk	Teknik	Narasumber
			Pelaksanaan	a. Sosialisasi	Informasi, dokumen	W, S	Perangkat desa & kecamatan, Tokmas
				b. Pemilihan penerima	Informasi, dokumen	W, S	Perangkat desa & kecamatan, Tokmas
				c. Perbaikan rumah	Informasi, dokumen	W, S	Perangkat desa & kecamatan, Tokmas
				d. Pemeliharaan	Informasi, dokumen, foto	W, S, O	Perangkat desa & kecamatan, Tokmas
3.	Kajian Faktor-faktor yang memengaruhi terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk.	Analisis deskriptif kualitatif, analisis faktor	Kebutuhan menghuni rumah layak	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan
			Pendampingan	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan
			Partisipasi masyarakat	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan
			Dukungan perangkat desa	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan
			Dukungan pembiayaan	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan
			Tenaga tukang	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan
			Bahan bangunan	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan
			Insentif	Persetujuan responden, alasan	Kuesioner, informasi	A, W	Masyarakat penerima bantuan

Sumber : analisis penulis, 2009

Keterangan : W = Wawancara; S = Survei; A = Angket; O = Observasi lapangan/pengamatan; Tokmas = Tokoh Masyarakat.



Sumber : analisis penulis, 2009

GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS PENELITIAN PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN PADA WILAYAH BINAAN PT. ANEKA TAMBANG TBK.

BAB II

PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF LITERATUR

2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Milik Negara dalam Bidang Perumahan

2.1.1. Konsep Dasar CSR dalam Kerangka Kesejahteraan Sosial

Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan dalam beragam versi tergantung pada latar belakang dan cara pandang suatu negara atau seorang perumus terhadap konsep CSR itu sendiri. *The World Bank Group* mengartikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan yang terkait untuk memperbaiki hidup mereka dengan cara-cara yang baik bagi kepentingan bisnis, agenda pembangunan berkelanjutan, dan masyarakat pada umumnya (Kiroyan, 2009). Sementara itu *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memberikan pengertian terhadap CSR sebagai kontribusi bisnis bagi keberlanjutan dan perilaku usaha yang bukan hanya menjamin keuntungan bagi pemegang saham, menggaji pekerja, dan kualitas produk dan layanan bagi konsumen, tetapi perusahaan juga harus merespon masalah dan nilai-nilai sosial dan lingkungan.

Di Indonesia konsep CSR sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3), “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Salah satu lembaga yang memiliki perhatian khusus terhadap praktek CSR di Indonesia, Lingkaran Studi CSR mendefinisikan CSR sebagai upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Jalal,

2009). Lebih lanjut lembaga ini menyebutkan bahwa perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan kategori besar maupun kecil – yang memiliki tanggung jawab sosial.

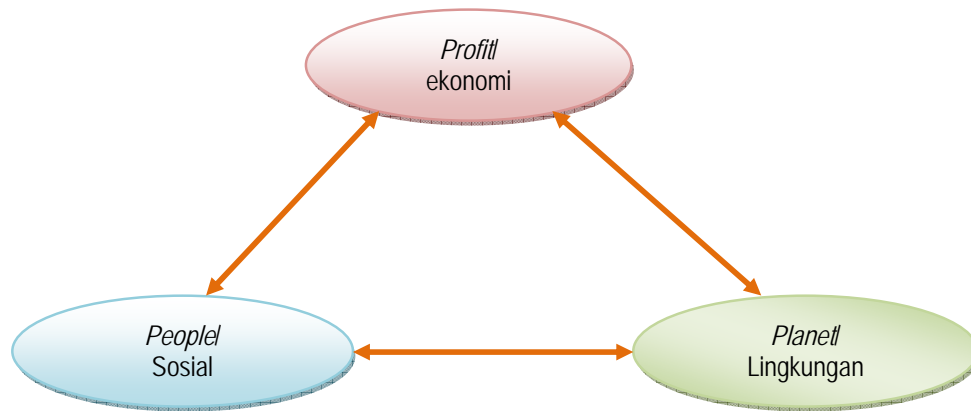
Berdasarkan ragam definisi yang dilontarkan berbagai pakar dan pengamat, dapat dirunut lebih jauh teori-teori yang mendasarinya. CSR menunjukkan 4 dimensi teori yakni teori instrumen, teori politik, teori integratif, dan teori etika (Garriga dan Mele, 2004). Sementara itu dalam Henningfeld, Pohl, dan Tolhurst (2006) menyebutkan bahwa teori-teori yang melandasi CSR meliputi teori ekonomi/instrumental, politik, integratif, etika, kelembagaan, dan sinyal.

Teori instrumental digunakan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan utama berbisnis yaitu memaksimalkan profit yang menunjukkan keberpihakan terhadap pemegang saham. Upaya yang dilakukan adalah melakukan strategi alokasi sumber daya dan investasi filantropi agar diperoleh keuntungan kompetitif. Penggabungan dengan etika bisnis perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan. Teori politik dimana perusahaan melalui kekuasaan yang dimiliki memanfaatkannya untuk mempengaruhi kekuatan masyarakat, dalam pengertian negatif dapat tercermin adanya kerusakan lingkungan dan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dengan masyarakat sekitar. Teori Integratif lebih berfokus pada pendeteksian, scanning, dan menanggapi tuntutan sosial untuk mencapai prestise, penerimaan sosial, dan legitimasi sosial. Prinsipnya adalah koordinasi dengan berbagai pelaku. Teori Etika didasarkan atas teori stakeholder, bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan yakni investor, pemegang utang, karyawan, masyarakat, dan lain-lain, disamping pemegang saham. Etika ini meliputi hak-hak universal seperti Hak Azasi Manusia, tenaga kerja, dan isu lingkungan di pasar global. Teori Kelembagaan menunjukkan nilai-nilai yang menciptakan stabilitas jangka panjang dan ketekunan organisasi, adaptasi lembaga sesuai waktu berdasarkan historis. Penerapan peraturan dapat membuat perusahaan beradaptasi secara lebih cepat. Teori Sinyal merupakan pengungkapan terhadap publik yang akan mencitrakan reputasi perusahaan, apabila diumumkan positif maka positiflah perusahaan, sebaliknya bila diumumkan negatif perusahaan tersebut akan menurun reputasinya (Henningfeld, Pohl, dan Tolhurst, 2006).

Kinerja CSR bukan diukur dari seberapa tinggi perusahaan tersebut menyalurkan dana CSRnya, melainkan bagaimana CSR melekat dalam kebijakan, strategi, dan proses bisnis perusahaan (Jalal, 2009; Kiroyan, 2009; Supriyanto, 2009). Oleh karena itu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat disebut CSR ketika memenuhi prinsip-prinsip dasar CSR. Prinsip dasar menurut Epstein (2008) meliputi etika, tata kelola, transparansi, hubungan bisnis, keuntungan finansial, pelibatan komunitas/pemberdayaan ekonomi, nilai produk dan pelayanan, praktek pekerja, dan perlindungan terhadap lingkungan. Sementara itu prinsip CSR menurut ISO 26000 tentang CSR meliputi akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati stakeholder, menghormati aturan, menghormati norma dan budaya, serta menghormati hak asasi manusia.

Jim Haywood dalam *Business in the Community* mengemukakan agar perusahaan dapat memperoleh profit jangka panjang, dengan reputasi terbaik, dan bertanggung jawab, prinsip dasar yang harus diterapkan meliputi memperlakukan dan menghormati karyawan dengan adil, beroperasi secara etis dan menerapkan integritas, memperhatikan hak asasi manusia, melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang, menjadi tetangga yang bertanggung jawab dalam komunitas mereka. Melalui penerapan seluruh prinsip dasar tersebut, perusahaan telah menjalankan kewajiban dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan (*profit*), menjalankan tanggung jawab sosial (*people*), dan penghormatan terhadap lingkungan (*planet*) atau biasa dikenal *triple bottom line* sebagaimana dalam gambar 2.1.

Dalam ranah kesejahteraan sosial, konsep CSR memiliki dua sisi yakni kesejahteraan bagi internal perusahaan maupun bagi masyarakat secara luas. Di setiap tempat perusahaan itu berdiri, sudah selayaknya perusahaan tersebut bertanggung jawab atas dampak dari operasional bisnis yang dikerjakan. Selain dampak positif yang ditimbulkan, tidak jarang suatu komunitas di sekitar perusahaan tersebut terkena dampak negatif yang tidak mereka harapkan. CSR menjadi alat untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari sebuah perusahaan beroperasi.



Sumber :Epstein, 2008

GAMBAR 2.1.
TRIPLE BOTTOM LINE

Terdapat perbedaan dalam penekanan CSR di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. CSR di negara maju lebih ditekankan pada perilaku usaha secara etis, pemenuhan hak asasi manusia, pemenuhan hak karyawan, anti korupsi, kepedulian terhadap lingkungan dan *phylanthropy*. Sedangkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia penekanan CSR lebih pada *phylanthropy* perusahaan dan pembangunan masyarakat (Kiroyan, 2009). Penekanan yang berbeda ini menimbulkan perbedaan bentuk-bentuk CSR yang dikembangkan perusahaan. Pembangunan komunitas (*commnunity involvement development*) di negara berkembang yang dapat dikembangkan meliputi kegiatan pelibatan komunitas, pendidikan dan budaya, peningkatan keterampilan, teknologi pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan penghasilan, kesehatan dan investasi sosial (Norman, 2009).

Berdasarkan beberapa pengertian, prinsip dasar, dan penekanan CSR di atas, komitmen terhadap kepentingan perusahaan dan masyarakat luas, perilaku etis, dan pembangunan keberlanjutan merupakan beberapa kata kunci yang dapat disimpulkan dari konsep CSR dalam konteks penelitian ini. Oleh karena itu CSR diartikan sebagai komitmen perusahaan yang direalisasikan dalam perilaku bisnis secara etis guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun penekanan CSR yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah CSR yang mendukung upaya pembangunan komunitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Perumahan Layak sebagai Hak Asasi Manusia dan Bagian dari Kesejahteraan Masyarakat

Rumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, sedangkan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992). Sebagai tempat tinggal, rumah harus mampu melindungi setiap orang yang menghuni bangunan tersebut. Sebagai sarana pembinaan keluarga, rumah memiliki arti penting dalam menumbuhkan pribadi-pribadi yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa. Atas fungsi yang demikian pentingnya, rumah seharusnya memenuhi persyaratan untuk layak dihuni.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas ruang, dan kesehatan bagi penghuni. Keselamatan bangunan ditunjukkan dalam konstruksi bangunan yang memenuhi syarat keamanan dari beban bangunan sendiri maupun dari ancaman bencana alam seperti penurunan tanah, terjangan angin, dan gempa. Adapun kecukupan luas ruang artinya rumah hendaknya mampu menampung aktivitas penghuni selama dalam rumah, yakni tidur, makan, memasak, dan aktivitas lainnya. Standar minimal luasan ruang cukup beragam, ada yang mengacu 7,2 m² per orang, atau 9 m² per orang. Agar rumah dapat mendukung kesehatan bagi penghuni, perlu ada jendela yang berfungsi sebagai lubang angin, jalan udara segar dan sinar matahari, serta sirkulasi. Letak lubang angin sebaiknya searah dengan tiupan angin. Syarat kesehatan lainnya adalah lantai yang harus kering dan tidak lembab.

Disamping bangunan rumah, kondisi fasilitas kelengkapan bangunan rumah yang juga harus diperhatikan adalah ketersediaan air bersih, penerangan, dan sarana pembuangan limbah. Pengelolaan limbah cair harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan genangan, demikian halnya dengan sistem pengelolaan sampah, agar diperhatikan karena sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menimbulkan bau, mengundang lalat, dan dapat menjadi sumber penyakit bagi lingkungan.

Rumah selayaknya berada dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, dan menjamin keberlanjutan bagi para penghuninya. Untuk itu rumah dan

perumahan harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai agar dapat mendukung kehidupan dan penghidupan penghuninya.

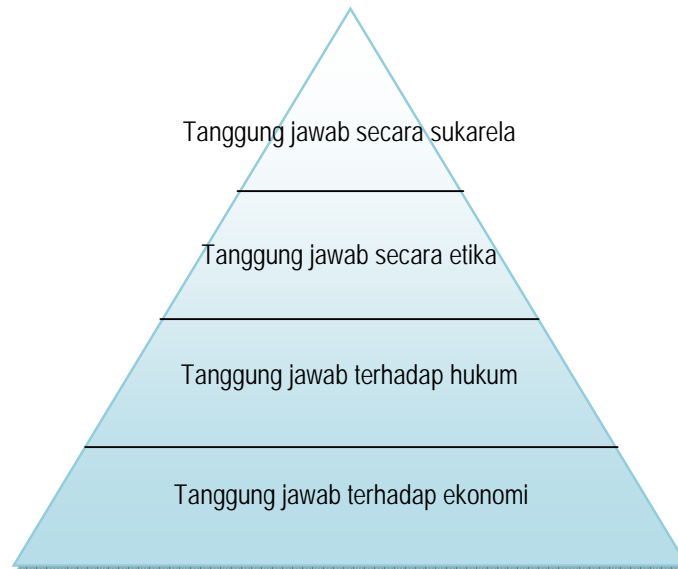
Setiap individu mempunyai hak untuk bertempat tinggal secara layak, hal ini dijamin dalam *Uneversal Declaration of Human Rights* pada artikel ke-25 yang menyebutkan bahwa “*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*” Hak dasar tersebut mengemukakan bahwa hak menghuni rumah yang layak, menjadi salah satu bagian penting dalam pemenuhan kesejahteraan setiap individu. Penghargaan terhadap hak asasi manusia juga ditunjukkan oleh bangsa Indonesia melalui Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 40 bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

Hak bertempat tinggal dapat diartikan sebagai hak untuk menghuni rumah yang secara layak untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Ketika dikaitkan dengan prinsip dasar CSR yang salah satunya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, seyogyanya perusahaan memasukkan unsur atau bidang perumahan dalam kegiatan CSR yang dilakukan. Korelasi ini memang tidak dapat serta merta menjadikan perusahaan menjalankan kegiatan perumahan, oleh karena belum adanya kejelasan aturan yang melandasinya. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat, diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat sendiri, dan pihak terkait lainnya, seperti perusahaan. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan dapat mendukung pembangunan perumahan dalam bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pembangunan komunitas.

2.1.3. Pranata Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pranata tanggung jawab sosial perusahaan merupakan institusi yang dapat mewarnai bentuk atau model CSR pada sebuah perusahaan. Dimensi CSR sebagai implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan terbagi dalam empat

dimensi yakni ekonomi, hukum, etika, dan kerelaan (Smith, Wokutch, Harrington, dan Dennis, 2001). Hal yang sama dijelaskan dalam dimensi model performa CSR menurut Carroll yang dapat dilihat dalam hirarki sebagai berikut.



Sumber : Carrol dalam Henningfeld, Pohl, dan Tolhurst (2006)

GAMBAR 2.2.
MODEL PERFORMA CSR

Tanggung jawab pada tataran terendah adalah ketika perusahaan melakukan CSR hanya semata-mata demi keuntungan perusahaan contohnya bertanggung jawab atas pekerja, konsumen, dan produk. Tataran kedua adalah ketika perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab terkait dengan ijin berusaha di suatu wilayah, dan harus memenuhi regulasi yang dipersyaratkan. Tataran ketiga adalah ketika perusahaan sudah mampu menghormati keberadaan sosial dan lingkungan di luar aktivitas yang berkaitan dengan perolehan keuntungan. Tataran tertinggi adalah ketika perusahaan telah dengan sukarela dan menempatkan diri sebagai bagian dari warga negara yang baik. Masing-masing tataran tersebut jika dilaksanakan secara keseluruhan merupakan wujud dari tanggung jawab perusahaan yang menyeluruh dan menghasilkan performa yang ideal.

Dimensi performa sosial perusahaan yang digambarkan Carroll dinilai Wartick dan Cochran sebagai suatu prinsip CSR dalam menentukan performa.

Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan ke dalam proses yang merupakan respon sosial perusahaan dan kebijakan sebagai pengelolaan isu sosial. Dalam kaitannya dengan orientasi perusahaan, prinsip menggambarkan orientasi filosofis perusahaan, proses menggambarkan orientasi institusi, sedangkan kebijakan menggambarkan orientasi kebijakan. Gambaran penjabaran tersebut sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL II.1.
DIMENSI PERFORMA SOSIAL PERUSAHAAN

Dimensi-dimensi Performa Sosial Perusahaan		
Prinsip	Proses	Kebijakan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Tanggapan Sosial Perusahaan	Pengelolaan Isu Sosial
- Ekonomi	- Reaktif	- Identifikasi isu
- Hukum	- Pertahanan	- Analisis isu
- Etika	- Akomodasi	- Pengembangan
- Kerelaan	- Proaktif	
Orientasi-orientasi Performa Sosial Perusahaan		
Orientasi filosofis	Orientasi institusi	Orientasi Organisasi

Sumber : Wartick dan Cochran dalam Solihin (2009)

Performa CSR yang dilakukan perusahaan dapat dilihat melalui inisiasi aktivitas sosial perusahaan. Kotler dan Lee dalam Solihin (2009) menyebutkan bahwa inisiatif aktivitas sosial perusahaan disebabkan oleh 6 hal yakni alasan promosi, alasan yang terkait dengan pemasaran, pemasaran aktivitas sosial perusahaan, kerelaan perusahaan, sukarelawan komunitas, dan praktek tanggung jawab sosial perusahaan. Kiroyan (2009) menjelaskan berbagai alasan CSR dilakukan oleh perusahaan, yakni dalam jangka panjang untuk memperbesar keuntungan, dalam jangka pendek untuk menyelesaikan persoalan manajemen, niat baik untuk melakukan sesuatu, dan sebagai jalan legitimasi sosial. Faktor-faktor tersebut akan tampak pada bentuk aktivitas sosial, yang pada gilirannya akan mendatangkan manfaat bagi keuntungan dan citra perusahaan.

Sementara itu pranata tanggung jawab sosial di Indonesia sebagai pengatur pelaksanaan CSR, mencirikan adanya upaya untuk membangun komunitas (*community development*). Tahun 1995 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 90 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1. Selanjutnya

diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996, perubahan aturan adalah pada besaran persentase penghasilan yang semula setinggi-tingginya 2% menjadi 2%. Dua Keputusan Presiden tersebut selanjutnya dicabut melalui Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, terdapat himbauan agar BUMN turut aktif dalam pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya Menteri BUMN menindaklanjutinya dengan menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003 yang mewajibkan agar BUMN melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Melalui Surat Edaran Menteri BUMN No SE-433/MBU/2003, pemerintah mensyaratkan agar BUMN membentuk unit khusus pengelolaan PKBL. Pada tahun 2007 diterbitkanlah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 04/MBU/2007 yang mengatur tentang sumber dana PKBL, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang Pelaksanaan PKBL menggantikan Keputusan Menteri sebelumnya perihal yang sama.

Meskipun banyak polemik yang mempertanyakan perlunya tanggung jawab sosial perusahaan diregulasi, pada tahun 2007 diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu terbit juga Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa semua perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berbagai pranata tersebut diterbitkan dalam rangka mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Bagi perusahaan milik negara, tanggung jawab sosial mulai diterapkan sejak diberlakukan aturan tersebut. Definisi perusahaan milik negara atau biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara sendiri adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut

menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik, contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan PT. Aneka Tambang Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN (Wikipedia).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan milik negara secara khusus diatur oleh peraturan menteri BUMN tentang Program Kemitraan dan Bidang Lingkungan (PKBL). Beberapa bidang yang diatur adalah bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelestarian lingkungan. Apabila ditilik bidang-bidang yang diatur dalam PKBL, tidak akan ditemukan bidang perumahan di sana. Pelaksanaan CSR bidang perumahan oleh perusahaan milik negara merupakan pengembangan dari arahan bidang-bidang kegiatan yang diatur dalam PKBL.

Perumahan bukan menjadi bidang usaha perusahaan pertambangan milik negara yang menjadi kajian ini. Sebuah penelitian mengklaim bahwa masalah utama dalam penerapan CSR adalah ketika CSR dilakukan secara terpisah dari aktivitas strategis perusahaan (Young and Thyil, 2009). Kegiatan di luar strategi bisnis dapat menjurus dalam dua kemungkinan, kegiatan tersebut menjadi legitimisasi beroperasinya perusahaan atau memang tumbuh dari rasa kepedulian perusahaan terhadap rendahnya kesejahteraan masyarakat yang tampak dari perumahan yang tidak layak huni. Terlepas dari motivasi apa yang melatarbelakangi CSR diarahkan dalam bidang perumahan, kegiatan yang dapat dilakukan perusahaan antara lain adalah pada proses perencanaan, konstruksi, dan pasca konstruksi atau pemeliharaan dan pengelolaan. Perusahaan dalam pelaksanaan CSRnya dapat mendukung dari setiap tahap tersebut, sesuai dengan kebijakan dan kewenangannya. Implementasi dukungan pembangunan perumahan bagi komunitas/masyarakat dapat berupa pembangunan rumah dan perumahan, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta kegiatan lain pendukung perumahan (Kemenpera, 2009).

2.1.4. Merumuskan Program CSR Bidang Perumahan

Setiap perusahaan memiliki cara tersendiri dalam merumuskan model CSR yang akan dilaksanakan. Wilburn (2009) menyatakan bahwa penyusunan model CSR mengikuti langkah-langkah : mencari isu strategis, kerjasama dengan organisasi lokal, membuat skenario, membangun proyek tanggung jawab sosial. Sementara itu DeMartinis dalam Rahman (2009) mengungkapkan tahapan penyusunan program CSR sebagai berikut : merumuskan komunitas, menentukan tujuan, menyusun pesan yang akan disampaikan, memilih metode yang relevan, realisasi program, dan analisis hasil/evaluasi. Lain halnya dengan Brown dalam Rahman (2009) bahwa penyusunan program CSR sebaiknya mengikuti langkah-langkah : menentukan segmentasi; menentukan skala prioritas; melakukan penelitian terhadap kebutuhan; permintaan, keinginan, dan minat komunitas; melakukan dialog dengan pemimpin komunitas.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam merumuskan program CSR yang dikemukakan oleh para pengamat, yang pada dasarnya adalah menganut pada tahapan penyusunan program secara umum. Berdasarkan kasus program CSR bidang perumahan yang didesain oleh perusahaan yang diteliti, langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut : menentukan komunitas sasaran; mengkaji permasalahan dalam komunitas tersebut; menentukan tujuan, menjalin kerjasama dengan lembaga tingkat lokal; menyusun skenario/mechanisme kegiatan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi.

Perumusan program CSR merupakan upaya mencari solusi bagi permasalahan yang muncul di komunitas sasaran. Apabila perusahaan telah menentukan bahwa komunitas sasaran adalah wilayah binaan, maka langkah pertama perumusan program telah dilalui. Selanjutnya adalah mengkaji permasalahan yang terjadi di komunitas sasaran dengan melihat dan memahami latar belakang permasalahan itu muncul agar ditemukan akar permasalahannya. Pelaksanaan CSR harus didahului dengan pengenalan terhadap masyarakat penerima manfaat baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain (Wilburn, 2009). Dalam bidang perumahan permasalahan/gejala yang muncul adalah menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, oleh karena itu tujuan dari program ini adalah dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan perumahan yang terjadi.

Skenario dibuat sesuai dengan prinsip CSR yakni membangun komunitas, bantuan boleh diberikan hendaknya dibarengi dengan upaya memandirikan komunitas tersebut. Penyusunan skenario hendaknya melibatkan komunitas agar rasa bangga dan rasa memiliki tertanam pada komunitas sasaran. Setelah program diimplementasikan, selanjutnya dievaluasi bagaimana tingkat penerapan dan seberapa besar manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Upaya evaluasi juga dapat dilakukan melalui penelitian tentang isu aktual sesuai dengan kebutuhan pengembangan, dan yang terkait dengan dampak bagi berbagai stakeholder CSR (McWilliams, Siegel, Teoh, 1999).

Komitmen perusahaan yang diimplementasikan dalam sebuah program CSR juga dipengaruhi oleh pengalaman perusahaan baik positif maupun negatif. Perusahaan otomotif Ford mengubah performa perusahaan dari yang tidak bertanggung jawab karena menghasilkan banyak polusi dan tidak efisien menjadi perusahaan yang ramah lingkungan (Arena, 2008). Pengalaman perusahaan yang buruk dapat menjadi titik balik perusahaan untuk mewujudkan tujuan mulia perusahaan. Pengalaman perusahaan itu pun juga tak lepas dari faktor pimpinan perusahaan. Bahkan CEO perusahaan otomotif tersebut, Bill Ford Jr. secara pribadi mengirimkan pesan kepada karyawan-karyawannya untuk mewujudkan komitmennya terhadap keramahan lingkungan.

Perumusan program CSR bidang perumahan sebagaimana perumusan program pada umumnya, sangat dipengaruhi oleh siapa pelaku/perumus dan faktor lingkungan yang melatarbelakangi pelaku tersebut (Walgito, 2004). Perumusan program merupakan upaya berpikir seseorang dalam rangka menghasilkan rencana tindakan untuk mengaktualisasikan komitmen perusahaan. Perumus kebijakan dan program biasanya dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan akan hal itu, sehingga karakter pimpinan dapat menjadi faktor penentu karakter program. Hanya manusia yang memiliki moral yang bertanggung jawab dalam tindakannya (Henningfeld, Pohl, dan Tolhurst, 2006). Untuk melihat moral seseorang amatlah sulit, oleh karena itu latar belakang pelaku dibatasi pada latar belakang pendidikan dan pengalaman intelektual pimpinan.

2.2. Penerapan CSR Bidang Perumahan sebagai Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pelaporan CSR merupakan salah satu indikator dari adanya implementasi CSR, oleh karena itu penerapan CSR sebuah perusahaan hendaknya dilaporkan kepada publik. Diharapkan berbagai pihak dapat turut serta memantau implementasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap institusi dan stakeholder yang terkena dampak beroperasinya perusahaan tersebut. Upaya pelaporan atas prakarsa perusahaan sendiri yang dikenal dengan *Global Reporting Initiative* (GRI) telah mulai dipraktekkan oleh para perusahaan. Laporan tersebut menceritakan tentang kegiatan perusahaan yang di dalamnya memuat aktivitas CSRnya untuk disampaikan kepada publik. (Rodríguez dan LeMaster, 2007). Penetrasi pelaporan implementasi CSR di Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara di Asia lain seperti India, Korea Selatan, Philipina, Malaysia, Thailand (Chapple dan Moon, 2005).

Di Indonesia, himbauan untuk melaporkan implementasi CSR dimuat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 66 ayat (2) huruf c, bahwa salah satu muatan laporan tahunan adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu strategi yang ditempuh Pemerintah Indonesia agar perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bidang perumahan yaitu dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan anjuran tersebut.

Kegiatan pembangunan perumahan secara umum dibagi dalam 3 bagian utama yakni perencanaan, pelaksanaan/konstruksi, dan pemeliharaan/pasca konstruksi (Turner, 1976). Pembangunan perumahan yang diterapkan dengan pola kompetisi antar desa binaan perusahaan milik negara, pada prinsipnya tidak berberda, karena karakteristik yang akan dikaji merupakan karakteristik masing-masing desa. Hal yang agak berbeda adalah dalam proses pra pelaksanaan pembangunan perumahan, karena penerima bantuan atau sasaran keluarga dipilih berdasarkan kriteria tertentu.

2.2.1. Pembagian Peran dalam Penerapan Program Perumahan

Pembagian peran dalam penerapan sebuah program erat kaitannya dengan kelembagaan. Kelembagaan itu sendiri memiliki tiga unsur pokok yakni organisasi, pranata, dan individu. Berjalannya sebuah program merupakan indikator bergeraknya kelembagaan yang telah ditentukan. Untuk mengetahui pelaku yang terlibat terlebih dulu diidentifikasi tahapan kegiatan meliputi :

1. Sosialisasi kepada masyarakat, dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program atau kegiatan yang akan dilaksanakan (Kemenpera, 2009). Informasi mengenai tata cara dan aturan main dalam pelaksanaan lomba perbaikan rumah antar desa perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat, seperti berapa jumlah rumah dan syarat rumah yang dapat diperbaiki, serta besaran dana yang diperoleh. Hal penting yang harus dibicarakan melalui rembug warga adalah bagaimana mekanisme pemilihan warga yang akan memperoleh bantuan, agar tidak terjadi kecemburuan antar warga.
2. Pemilihan penerima bantuan, dari hasil musyawarah antar warga tentang kriteria pemilihan dan mekanisme pemilihannya, dalam tahap ini dilakukan pemilihan penerima bantuan yang disepakati bersama dan dikuatkan dalam berita acara. Mekanisme ini untuk mencegah terjadinya gugatan di masa mendatang dan mendidik masyarakat untuk menjunjung tinggi akuntabilitas.
3. Pelaksanaan perbaikan rumah warga, dalam proses ini dibutuhkan bahan bangunan dan tukang yang mampu mengerjakan perbaikan rumah secara berkualitas. Keberadaan tukang dan bahan bangunan menjadi faktor penting dalam penentuan kualitas bangunan.
4. Pemeliharaan, proses ini menjadi tanggung jawab penghuni rumah atau penerima bantuan.

Para pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan perbaikan perumahan di wilayah binaan terdiri atas masyarakat sebagai penerima bantuan, masyarakat sebagai komunitas wilayah binaan perusahaan, fasilitator, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan pihak perusahaan.

Masyarakat Penerima bantuan merupakan pihak yang menerima manfaat akibat dilakukannya kegiatan perbaikan rumah. Sebagai pihak yang diuntungkan

seharusnya penerima bantuan ini terlibat aktif dalam proses perbaikan perumahan dan mengikuti aturan main yang diberlakukan (Turner, 1976). Dalam masa pasca konstruksi, penerima bantuan juga melakukan pemeliharaan dan pengelolaan untuk menjaga kondisi rumah tetap sehat dan layak huni (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992).

Masyarakat di desa binaan merupakan sasaran program perbaikan rumah dengan pola kompetisi antar desa. Keikutsertaan dalam lomba desa tersebut merupakan komitmen komunitas desa untuk meningkatkan kualitas rumah bagi warga desa yang memerlukan dalam rangka menciptakan kualitas kesehatan bagi lingkungan dan masyarakat desa secara keseluruhan. Masyarakat ini hendaknya dapat menerapkan *keguyubannya* dalam mengelola amanah dari pihak perusahaan, dengan turut aktif dalam merencanakan dan memilih penerima bantuan secara paling tepat untuk diperbaiki rumah.

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbatas, pengetahuan dan pemahaman terhadap rumah sehat yang juga terbatas, memerlukan adanya fasilitator yang dapat mendampingi. Aktor ini cukup penting keberadaannya, dan penyiapannya pun dapat berasal dari perusahaan maupun dari pihak pemerintah daerah. Selain memberikan pemahaman tentang rumah sehat dan bagaimana berperilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari, sebaiknya pendamping masyarakat atau fasilitator ini dapat membuka akses masyarakat pada lingkungan yang lebih luas, agar komunitas yang dibinanya lebih termotivasi untuk hidup sehat dan berpikiran maju.

Perangkat Desa dan Kecamatan sebenarnya juga berperan pada kapasitas sebagai fasilitator bagi pembangunan masyarakat di komunitas tersebut. Peran aktor-aktor tersebut adalah memberikan fasilitasi dan mendorong agar masyarakat dapat berperan sebagaimana diharapkan. Perangkat desa dan kecamatan juga berperan dalam penciptaan iklim kondusif dan memberikan akses/kemudahan bagi masyarakat dalam hal perijinan dan bantuan atau kemudahan lainnya.

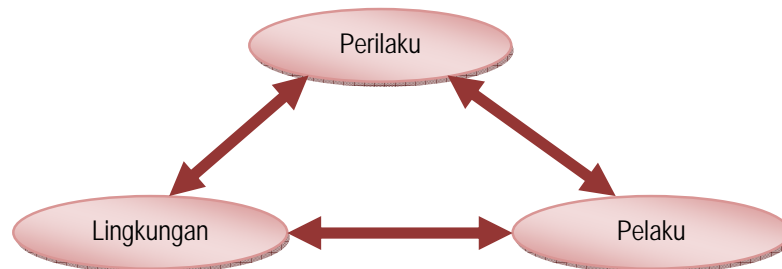
Berdasarkan uraian tersebut di atas beberapa variabel yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan perbaikan melalui lomba desa antara lain adalah adanya proses pendampingan, adanya partisipasi masyarakat, adanya dukungan perangkat desa, ketersediaan tenaga tukang, dan ketersediaan bahan

bangunan. Kelima faktor ini apabila tidak ada di setiap desa yang melaksanakan kegiatan perbaikan rumah, akan menjadi variabel penghambat dalam pelaksanaan perbaikan rumah sebagai penerapan CSR bidang perumahan.

2.2.2. Teori Perilaku Sosial dalam Pelaksanaan Program

Berjalannya suatu kegiatan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pelaku, motivasi, dan situasi yang mengondisikan kegiatan tersebut terlaksana. Suatu perilaku dan kegiatan yang diterapkan akan dapat terlembaga ketika elemen-elemen sistem kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bandura dalam Walgito (2004) menyebutkan perilaku kegiatan merupakan fungsi dari interaksi lingkungan dan pelaku, sebagaimana yang tergambar dalam skema berikut ini.

Dalam kaitannya dengan lomba perbaikan perumahan antar desa, pelaku yang terkait adalah masyarakat penerima manfaat, masyarakat desa, fasilitator, perangkat desa, perangkat kecamatan, dan pihak perusahaan. Setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam mendukung terselenggaranya perbaikan rumah warga tersebut. Dukungan atau partisipasi setiap aktor jika dikaitkan dengan teori perilaku sosial adalah perilaku. Adapun lingkungan yang dimaksud dalam teori tersebut adalah suatu kondisi yang memungkinkan pelaku berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan rumah. Lingkungan atau kondisi pembentuk perilaku meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat ditunjukkan oleh motivasi pelaku, apa yang menyebabkan pelaku berpartisipasi.



Sumber : Walgito, 2004

GAMBAR 2.3.
ELEMEN DALAM PENERAPAN KEGIATAN

Motivasi itu sendiri dipengaruhi oleh latar belakang pelaku, apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat desa sebagai sasaran kegiatan perbaikan rumah, dapat diperoleh gambaran bagaimana kondisi rumah masyarakat tersebut. Kondisi rumah yang tidak layak menyebabkan masyarakat memiliki motivasi untuk tinggal di rumah yang memenuhi standar kelayakan. Motivasi juga dapat tumbuh oleh adanya faktor dari luar, seperti dana/pembiayaan dan *reward* atau insentif sebagai pancingan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperoleh variabel yang menyebabkan pelaku dalam hal ini masyarakat melakukan partisipasi terhadap suatu kegiatan, yaitu adanya dukungan pembiayaan, kebutuhan menghuni rumah layak dan keinginan memperoleh insentif.

2.3 Belajar dari Pengalaman Penerapan CSR Bidang Lain

2.3.1. Penerapan CSR Bidang Pengelolaan Lingkungan di Kelurahan Pasarminggu Jakarta Selatan

Pengelolaan lingkungan hidup di RW 02 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang diinisiasi oleh PT. Unilever merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Penerapan CSR ini merupakan upaya menemukan solusi penanggulangan dampak negatif yang ditimbulkan akibat produksi dan konsumsi produk Unilever terhadap lingkungan, merupakan tujuan dari kegiatan CSR yang dilakukan PT. Unilever (Leimona dan Fauzi, 2008). Upaya tersebut ditunjukkan melalui Program *Jakarta Green and Clean* (JGC) yang diharapkan dapat menumbuhkan gaya hidup berwawasan lingkungan.

Beberapa hal yang mendorong keberhasilan program ini adalah adanya inisiatif yang ditindaklanjuti dengan tindakan riil melalui proses pemberian pemahaman dan percontohan kepada masyarakat. Penyediaan pendamping masyarakat yang disebut fasilitator menjadi ujung tombak dalam pembentukan perilaku peduli lingkungan di RW 02 Kelurahan Pasar Minggu. Setelah diberikan pendidikan mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, fasilitator melakukan pemberdayaan kepada kader-kader di tingkat RT. Kader-kader RT tersebut meneruskan peran fasilitator sebagai pemberdaya pada lingkungan RT setempat sehingga terbentuk Tim RT. Selanjutnya Tim RT melakukan fungsi

pemberdayaan, sehingga ada penjejangan peran, fasilitator berperan menguatkan, kader RT berperan mendampingi, dan Tim RT memerankan fungsi pemberdayaan kepada komunitas.

Pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup disertai dengan peningkatan keterampilan kaum ibu dalam memilah dan memanfaatkan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Selain menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, tiap keluarga yang terbina berpeluang untuk meningkatkan penghasilan dari penjualan barang bekas dan hasil kerajinan (Pitaloka, 2009).

Hasil dari penerapan CSR dengan pola penularan kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan di suatu lingkungan perumahan melalui penyiapan fasilitator, cukup berdampak positif pada kesehatan lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu pemilihan target sosialisasi dan pelaku kegiatan adalah kaum ibu, dinilai cukup strategis karena sehari-harinya merekalah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan lingkungan hidup.

2.3.2. Penerapan CSR dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara

Tanggung jawab sosial PT. Jababeka ditunjukkan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan Program Penggemukan Kambing di Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara. Alasan pemilihan program adalah karena desa ini memiliki embrio kegiatan usaha sejenis. Program ini memberikan bantuan dana penggemukan kambing kepada masyarakat berupa 87 ekor kambing muda berusia sembilan bulan. Selain itu perusahaan memberikan bantuan pakan ternak untuk masa waktu empat bulan penggemukan. Masyarakat penerima bantuan terdiri dari 9 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 6 orang. Setelah masa penggemukan dalam bulan Idul Adha, kambing-kambing tersebut dibeli kembali oleh perusahaan sesuai dengan harga pasar. Komunitas yang tergabung dalam komunitas tersebut memperoleh untung dari selisih harga jual kambing dan biaya pinjaman yang harus dikembalikan kepada perusahaan selaku pemberi bantuan pinjaman.

Bantuan pinjaman modal usaha semacam ini memberikan kesempatan bagi pada komunitas untuk melakukan kegiatan usaha produktif yang menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Pemilihan jenis kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat menjadi pelajaran yang patut dicatat dalam keberhasilan program ini.

2.3.3. Penerapan CSR Bidang Pertanian dan Perdesaan di Thailand dan Pakistan

Penerapan CSR bidang pertanian dan perdesaan telah dilakukan oleh Nestle melalui pemberian pemahaman tentang praktek pengelolaan lingkungan dan air yang baik. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pemasok. Perusahaan ini memiliki 675 ahli pertanian dan sekitar 5.000 pekerja tambangan dan kontraktor, adapun dukungan dan bantuan yang ditawarkan adalah pelatihan kepada 111.800 petani melalui proyek di 21 negara. Namun tidak tertutup kemungkinan bantuan pelatihan ini diberikan kepada petani di luar pemasok atau tidak adanya persyaratan untuk menjual hasil pertaniannya kepada Nestle.

Nestle's Doi Tung Experimental and Demonstration Farm merupakan salah satu contoh kegiatan pelatihan menanam kopi yang dilakukan untuk membantun ratusan petani di utara Thailand. Hasil dari pelatihan ini adalah meningkatnya kesuburan tanaman kopi, irigasi dan cara memanen yang baik yang dan membantu kopi mereka dihargai lebih tinggi. Nestle Pakistan bekerjasama dengan UNDP dan Engro Foods melakukan pelatihan kepada 4.000 penasehat pertanian perempuan untuk membantu peningkatan produksi susu di perdesaan Pakistan selaku pemasok susuk bagi Nestle.

Dua pengalaman Nestle dalam menerapkan CSR di bidang pertanian dan perdesaan di atas menunjukkan keberhasilan akibat dari penyiapan tenaga ahli yang berkompeten untuk melatih masyarakat. Melalui pelatihan yang dilakukan, masyarakat memperoleh manfaat yang cukup positif demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

2.4. Variabel Penerapan CSR Bidang Perumahan

Tujuan penelitian adalah mengkaji penerapan CSR bidang perumahan di desa binaan perusahaan. Apabila tujuan penelitian tersebut dikaitkan dengan kajian pustaka, diperoleh variabel-variabel penelitian sebagaimana Tabel II.2.

TABEL II.2.
VARIABEL PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN

SASARAN	SUMBER	VARIABEL	INDIKATOR/PARAMETER
1. Karakteristik Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> - Arena, 2008 - Carroll (1991) - Henningfeld, Pohl, Tolhurst (2006) - Pemerintah RI (2007) - Sholihin (2008) - The World Bank Group (2008) - Wibisono (2007) - Walgito (2004) 	Motivasi perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi - Hukum - Etika - Kesukarelaan
		Pengalaman perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Positif - Negatif
		Latar belakang pemimpin	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan - Pengalaman intelektual
2. Karakteristik dan tipologi penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> - Wilburn 2009 - Kemenpera (2007) - Kemenpera (2009) - Koentjaraningrat (2007) - Turner (1976) - Walgito (2004) 	Kondisi penerima bantuan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosial - Ekonomi - Fisik
		Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Aturan main - Pelaku yang terlibat
		Proses pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Pemilihan penerima bantuan - Pelaksanaan perbaikan rumah - Pemeliharaan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenpera (2009) - Koentjaraningrat (2007) - Pitaloka (2009) - Walgito (2004) - Widjaja dan Pratama (2008) - Turner (1976) 	Kebutuhan menghuni rumah layak	Tingkat persetujuan
		Pendampingan	Tingkat persetujuan
		Partisipasi masyarakat	Tingkat persetujuan
		Dukungan perangkat desa	Tingkat persetujuan
		Dukungan pembiayaan	Tingkat persetujuan
		Tenaga tukang	Tingkat persetujuan
		Bahan bangunan	Tingkat persetujuan
		Insentif/reward	Tingkat persetujuan

Sumber : analisis penulis, 2009

BAB III

GAMBARAN PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN DI KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

Kecamatan Nanggung merupakan kecamatan di Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Posisi kecamatan ini berada di sebelah barat daya wilayah Kabupaten Bogor. Terdapat 10 desa di kecamatan ini, masing-masing adalah Desa Malasari, Cisarua, Curug Bitung, Nanggung, Bantar Karet, Pangkal Jaya, Kalong Liud, Parakan Muncang, Hambaro, dan Sukaluyu. Terdapat banyak lokasi-lokasi wisata, diantaranya : Curug Cikaung, Situ Paranje, Taman Bunga Cisangku, Perkebunan Teh, Batu Tulis, Curug Pi'it, dan Taman Nasional Gunung Halimun. Jumlah penduduk tahun 2009 di kecamatan ini sebanyak 80.667 jiwa atau sejumlah 20.722 keluarga. Kecamatan Nanggung dialiri oleh dua sungai yakni Sungai Cikaniki di bagian timur dan Sungai Cigudeg di bagian barat. Terdapat dua jalan utama di wilayah ini yang membujur di sepanjang Sungai Cikaniki yakni jalan yang menghubungkan Panjaungan yang merupakan pertigaan di jalan provinsi yang menghubungkan kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak, Nanggung ke arah Curug Bitung dan Malasari, dan jalan yang menghubungkan Kecamatan Lebak, Kalong Liud, Pangkal Jaya, dan Bantar Karet.

TABEL III.1
JUMLAH KELUARGA DI SETIAP DESA KECAMATAN NANGGUNG

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KELUARGA (KK)
1	Malasari	7.623	2.121
2	Cisarua	8.473	2.133
3	Curug Bitung	8.891	2.497
4	Nanggung	7.288	1.457
5	Bantar Karet	9.015	2.634
6	Pangkal Jaya	6.602	1.652
7	Kalong Liud	8.161	2.158
8	Parakan Muncang	12.531	3.117
9	Hambaro	6.539	1.635

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	JUMLAH KELUARGA (KK)
10	Sukaluyu	5.544	1.318
	Jumlah per Kecamatan	80.667	20.722

Sumber : Data Potensi Desa di Kecamatan Nanggung, 2009

Tampak dalam tabel di atas bahwa Desa Parakan Muncang merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbesar di antara desa-desa lainnya. Posisi desa berada di sepanjang jalan utama bagian barat yang juga merupakan pusat Kecamatan Nanggung. Desa ini merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk pendatang, disamping Desa Kalong Liud dimana terdapat perumahan karyawan PT. Aneka Tambang Tbk. Dua desa yang berbatasan langsung dengan daerah operasi perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang pertambangan emas dan perak ini meliputi Desa Malasari dan Desa Bantar Karet. Dua desa ini pula yang memiliki luas wilayah terbesar dibanding delapan desa lainnya.

3.1.1. Kondisi Sosial Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

Kondisi sosial Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor digambar dalam dua hal yakni berdasarkan mata pencaharian penduduk dan tingkat pendidikan penduduk di setiap desa. Mata pencaharian dimaksudkan memberikan gambaran jenis kegiatan yang dilakukan penduduk Kecamatan Nanggung dalam melangsungkan kehidupan dan penghidupannya. Sedangkan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kualitas pendidikan penduduk setempat khususnya penduduk angkatan kerja. Kecamatan Nanggung merupakan salah satu wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Beberapa Program Bina Lingkungan telah dilaksanakan di beberapa desa di kecamatan ini antara lain pembangunan prasarana dan sarana umum, serta perbaikan rumah penduduk tidak layak huni.

Potensi Kecamatan Nanggung adalah pertanian dan perkebunan, sehingga dominasi mata pencaharian penduduk di wilayah ini adalah tani. Urutan kedua jenis pekerjaan terbanyak yang dilakukan oleh warga Kecamatan Nanggung adalah buruh, terdiri atas buruh tani, kuli, dan pembantu rumah tangga. Urutan jenis pekerjaan dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dan seterusnya adalah

swasta, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Swasta yang dimaksudkan adalah bekerja di sektor swasta meliputi bidang dan bekerja di perusahaan swasta. Data PNS, Polri, TNI yang dimaksudkan termasuk pensiunan, sedangkan wiraswasta terdiri atas pengusaha kecil dan menengah, pedagang, dan perajin. Adapun jenis pekerjaan lain-lain terdiri atas dukun dan ahli pengobatan alternatif. Data di atas tidak termasuk Desa Hambaro, karena informasi mengenai mata pencaharian di desa tersebut tidak diperoleh.

TABEL III.2
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN NANGGUNG

NO	NAMA DESA	JENIS MATA PENCAHARIAN (JIWA)						
		TANI	BURUH	PNS, Polri, TNI	SWASTA	WIRA- SWASTA	LAIN- LAIN	JUMLAH
1	Malasari	1.611	3.324	23	1.306	351	8	6.623
2	Cisarua	1.026	781	15	2	17	9	1.850
3	Curug Bitung	528	253	60	8	17	0	866
4	Nanggung	209	44	55	46	87	3	444
5	Bantar Karet	3.238	729	29	64	215	0	4.275
6	Pangkal Jaya	794	304	30	39	200	6	1.373
7	Kalong Liud	99	601	35	63	266	3	1.067
8	Parakan Muncang	434	858	97	182	89	6	1.666
9	Hambaro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
10	Sukaluyu	142	835	34	72	168	3	1.254
	Jumlah	8.081	7.729	378	1.782	1.410	38	19.418

Sumber : Data Potensi Desa di Kecamatan Nanggung, 2009

Jenis pekerjaan masyarakat Kecamatan Nanggung yang tidak secara eksplisit tercatat dalam data potensi desa adalah penambang liar atau biasa dikenal dengan nama *gurandil*. Jenis pekerjaan ini tumbuh karena wilayah Kecamatan Nanggung khususnya di Desa Malasari dan Bantar Karet memiliki kandungan dimana UBPE Pongkor bekerja, dan awalnya lebih banyak dikerjakan oleh masyarakat pendatang.

Bagaimana orang dapat dikatakan sebagai *gurandil* adalah ketika dia melakukan pekerjaan sebagai penggali tanah untuk memperoleh kandungan emas dengan cara yang tidak legal atau tanpa ijin. Biasanya dia melakukan di gunung yang pernah orang memperoleh emas, dan bisa saja dia menggali sangat dalam sehingga dia menembus lokasi tambang legal. Apabila terjadi hal demikian, orang tersebut biasanya ditangkap oleh petugas keamanan tambang dan dilaporkan ke

pihak kepolisian untuk disidik. Tidak jarang oleh karena kedekatan antara kepala desa dimana orang tersebut tercatat sebagai warganya, dengan pihak perusahaan tambang, akhirnya orang tersebut dibebaskan dengan jaminan kepala desa tersebut. Pihak tambang melarang penggalian ilegal bukan tanpa alasan, biasanya gurandil melakukan penggalian tanpa pengamanan dan sering membahayakan dirinya sendiri dan lingkungan. Dalam pengolahan hasil galian hampir semua dilakukan dengan metode yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan sianida atau merkuri. Hal ini cukup membahayakan lingkungan sehingga pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya patut untuk mengatur dan mengendalikannya.

Keberadaan gurandil di Kecamatan Nanggung yang telah merambah daerah operasional tambang PT. Aneka Tambang Tbk. diperkirakan cukup besar dengan prosentasi penduduk asli Kecamatan Nanggung dan penduduk di luar sekitar 70 : 30 atau sekarang ini mencapai 60 : 40. Kenaikan penduduk asli Kecamatan Nanggung disebabkan oleh minimnya lapangan kerja yang dapat menampung pengangguran di setiap desa di Kecamatan Nanggung. Beberapa desa yang cukup besar jumlah gurandilnya adalah Desa Bantar Karet dan Desa Cisarua. Disamping kurangnya lapangan kerja, peningkatan jumlah gurandil juga disebabkan oleh adanya penghasilan yang cukup menggiurkan. Penghasilan ini membuat gurandil mendadak kaya dan ini yang menimbulkan keinginan bagi orang lain atau tetangga untuk mengikuti jejak pendahulunya.

TABEL III.3
TINGKAT PENDIDIKAN ANGKATAN KERJA PENDUDUK
KECAMATAN NANGGUNG

NO	NAMA DESA	TINGKAT PENDIDIKAN (JIWA)						JUMLAH
		BUTA AKSARA	TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD	TAMAT SMP	TAMAT SMA	TAMAT PT	
1	Malasari	431	748	2.373	1.097	924	3	5.576
2	Cisarua	43	185	844	574	339	21	2.006
3	Curug Bitung	735	295	580	2.188	895	210	4.903
4	Nanggung	245	7	159	164	16	7	598
5	Bantar Karet	410	1.400	550	150	110	7	2.627
6	Pangkal Jaya	2.947	1.179	958	56	41	7	5.188
7	Kalong Liud	543	127	1.670	1.400	998	137	4.875
8	Parakan Muncang	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	Hambaro	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

NO	NAMA DESA	TINGKAT PENDIDIKAN (JIWA)						
		BUTA AKSARA	TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD	TAMAT SMP	TAMAT SMA	TAMAT PT	JUMLAH
10	Sukaluyu	46	475	868	1.248	610	96	3.343
	Jumlah	5.400	4.416	8.002	6.877	3.933	488	29.116

Sumber : Data Potensi Desa di Kecamatan Nanggung, 2009

Kualitas angkatan kerja penduduk Kecamatan Nanggung dapat dilihat dari jenis atau tingkat pendidikan yang diperoleh penduduk. Dari data di atas diperoleh gambaran bahwa angka buta aksara di Kecamatan Nanggung masih cukup tinggi, dan jumlah terbesar tersebut terdapat di Desa Pangkal Jaya. Secara keseluruhan jumlah penduduk yang tamat Sekolah Dasar adalah yang paling besar, meskipun demikian jumlah penduduk yang tidak tamat SD juga masih tinggi. Penduduk angkatan kerja yang telah mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi dengan jumlah terbesar adalah Desa Curug Bitung, Kalong Liud, dan Sukaluyu, adapun jumlah terkecil adalah di Desa Malasari. Data tingkat pendidikan hanya meliputi delapan desa, dua desa lainnya yakni Desa Parakan Muncang dan Desa Hambaro tidak diperoleh.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

Kondisi ekonomi penduduk Kecamatan Nanggung dapat digambarkan berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga itu sendiri telah ditentukan oleh tiap-tiap desa yang dibedakan menjadi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera 3 plus. Informasi mengenai kesejahteraan keluarga ini tidak seluruhnya diperoleh, enam desa telah lengkap datanya, sedangkan satu desa yakni Desa Cisarua hanya menampilkan jumlah keluarga prasejahtera saja. Jumlah keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya di Desa Nanggung, Bantar Karet, dan Hambaro tidak dapat diperoleh.

TABEL III.4
TINGKAT PEREKONOMIAN PENDUDUK KECAMATAN NANGGUNG
BERDASARKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	NAMA DESA	TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA (KK)					JUMLAH
		PRA SEJAHTERA	SEJAHTERA 1	SEJAHTERA 2	SEJAHTERA 3	SEJAHTERA 3 PLUS	
1	Malasari	325	847	702	198	49	2.121
2	Cisarua	670	NA	NA	NA	NA	670
3	Curug Bitung	149	228	566	1.132	422	2.497
4	Nanggung	NA	NA	NA	NA	NA	
5	Bantar Karet	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Pangkal Jaya	634	286	316	168	148	1.552
7	Kalong Liud	868	1.038	252	NA	NA	2.158
8	Parakan Muncang	1.178	943	736	253	7	3.117
9	Hambaro	NA	NA	NA	NA	NA	
10	Sukaluyu	662	315	211	129	12	1.329
	Jumlah	4.486	3.657	2.783	1.880	638	13.444

Sumber : Data Potensi Desa di Kecamatan Nanggung, 2009

Dari data yang tersaji dalam tabel dapat digambarkan bahwa sepertiga keluarga di desa-desa Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor merupakan keluarga pra sejahtera. Selebihnya adalah keluarga sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3 plus. Hal ini menunjukkan bahwa warga masyarakat di kecamatan ini masih memerlukan pelayanan dan akses dalam perbaikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.3. Kondisi Fisik Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor

Kondisi fisik Kecamatan Nanggung berkaitan dengan tujuan penelitian ini terkait dengan kondisi perumahan di sepuluh desa. Kondisi perumahan warga dibagi dalam jenis bahan bangunannya, meliputi jenis dinding, lantai, dan atap. Kondisi fisik rumah yang disajikan diperoleh dari data potensi desa dengan pemahaman masing-masing perangkat desa, sehingga jumlah rumah secara keseluruhan dapat digambarkan, dapat memiliki beberapa ciri dari setiap jenis bahan bangunan. Dalam tabel tersebut juga tampak bahwa salah satu desa yaitu Desa Sukaluyu tidak dapat disajikan.

TABEL III.5
KONDISI RUMAH BERDASARKAN JENIS DINDING

NO	NAMA DESA	KONDISI RUMAH BERDASARKAN JENIS DINDING (UNIT RUMAH)				
		TEMBOK	KAYU	BAMBU	LAIN-LAIN	JUMLAH
1	Malasari	257	1.134	690	0	2.081
2	Cisarua	1.027	879	52	0	1.958
3	Curug Bitung	2.029	116	32	100	2.277
4	Nanggung	1.364	23	5	0	1.392
5	Bantar Karet	1.000	1.400	1.800	0	4.200
6	Pangkal Jaya	487	14	679	0	1.180
7	Kalong Liud	1.500	115	0	500	2.115
8	Parakan Muncang	2.063	590	375	0	3.028
9	Hambaro	1.490	0	145	0	1.635
10	Sukaluyu	NA	NA	NA	NA	
	Jumlah	11.217	4.271	3.778	600	19.866

Sumber : Data Potensi Desa di Kecamatan Nanggung, 2009

Kondisi rumah berdasarkan jenis dinding dibedakan menurut bahan bangunan tembok, kayu atau papan, bambu atau biasa disebut warga setempat sebagai *bilik*, dan lain-lain. Data jenis rumah menurut jenis dinding di Desa Sukaluyu tidak dapat ditampilkan karena tidak diperoleh. Dalam tabel di atas tergambar bahwa sebagian besar rumah-rumah penduduk desa di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor ber dinding tembok, selebihnya berbahan kayu, bambu, dan lainnya. Peningkatan kualitas dinding rumah yang dilakukan oleh masyarakat di desa-desa penelitian biasanya mengganti dinding bambu menjadi tembok atau kayu, jenis dinding inilah yang dianggap lebih permanen dibanding jenis bambu atau lainnya.

TABEL III.6
KONDISI RUMAH BERDASARKAN JENIS LANTAI

NO	NAMA DESA	KONDISI RUMAH BERDASARKAN JENIS LANTAI (UNIT RUMAH)				
		KERAMIK	SEMEN	KAYU	TANAH	JUMLAH
1	Malasari	247	134	1.693	7	2.081
2	Cisarua	984	217	138	0	1.339
3	Curug Bitung	2.029	0	19	0	2.048
4	Nanggung	988	76	5	3	1.072
5	Bantar Karet	1.500	1.400	1.800	2.000	6.700
6	Pangkal Jaya	487	189	14	0	690
7	Kalong Liud	1.010	490	0	3	1.503
8	Parakan Muncang	1.480	880	592	296	3.248
9	Hambaro	490	1.020	125	20	1.655
10	Sukaluyu	NA	NA	NA	NA	
	Jumlah	9.215	4.406	4.386	2.329	20.336

Sumber : Data Potensi Desa di Kecamatan Nanggung, 2009

Kondisi rumah berdasarkan jenis lantai dibedakan menurut bahan bangunan keramik, semen, kayu, dan tanah. Sebagaimana data jenis rumah menurut jenis dinding, data jenis lantai Desa Sukaluyu juga tidak dapat ditampilkan karena tidak diperoleh. Bagi warga masyarakat Kecamatan Nanggung, kualitas rumah yang baik adalah bila lantai terbuat dari keramik. Dalam tabel kondisi rumah berdasarkan jenis lantai dapat digambarkan bahwa hampir sebagian rumah penduduk berlantai keramik, selebihnya berlantai semen, kayu, dan tanah. Lantai kayu yang dimaksud di sini dapat berupa rumah panggung atau rumah-rumah dengan lantai kayu/bambu. Namun yang banyak dijumpai adalah rumah berlantai kayu/bambu.

TABEL III.7
KONDISI RUMAH BERDASARKAN JENIS ATAP

NO	NAMA DESA	KONDISI RUMAH BERDASARKAN JENIS ATAP (UNIT RUMAH)				
		GENTENG	SENG	ASBES	RUMBIA/LL	JUMLAH
1	Malasari	940	43	623	475	2.081
2	Cisarua	1.906	0	8	0	1.914
3	Curug Bitung	2.029	216	118	0	2.363
4	Nanggung	1.567	0	32	0	1.599
5	Bantar Karet	1.400	200	300	2.700	4.600
6	Pangkal Jaya	120	0	3	0	123
7	Kalong Liud	1.800	0	0	0	1.800
8	Parakan Muncang	2.368	118	178	296	2.960
9	Hambaro	1.510	10	10	100	1.630
10	Sukaluyu	NA	NA	NA	NA	
	Jumlah	13.640	587	1.272	3.571	19.070

Sumber : Data Potensi Desa di Kecamatan Nanggung, 2009

Kondisi rumah berdasarkan jenis atap dibedakan menurut bahannya meliputi genteng, seng, asbes, rumbia atau lainnya seperti daun kelapa atau biasa disebut *atap* oleh penduduk setempat. Data rumah berdasarkan jenis atap Desa Sukaluyu tidak dapat ditampilkan karena tidak diperoleh. Dalam tabel disebutkan bahwa sebagian besar rumah-rumah warga beratap genteng, selebihnya rumbia, asbes, dan seng. Menurut warga setempat atap rumah yang memenuhi kualitas konstruksi bangunan rumah adalah genteng, sehingga banyak masyarakat yang menginginkan rumahnya beratap genteng.

3.2. Gambaran Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.

3.2.1. Gambaran Program CSR PT. Aneka Tambang Tbk.

PT. Aneka Tambang Tbk. merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pertambangan. PT. Aneka Tambang Tbk. didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang dan merupakan penggabungan dari tujuh perusahaan negara independen, yakni PT. Nikel Indonesia, PN Tambang Bauksit Indonesia, PN Logam Mulia, BPU Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara, Proyek Pertambangan Intan Martapura Kalimantan Selatan, PN Tambang Emas Cikotok, dan Proyek Emas Logas, dan Pekanbaru Riau (Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2009). Wilayah operasi perusahaan ini tersebar di seluruh Indonesia, dengan kegiatan usaha meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran hasil produksi. Selain melakukan kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan yang biasa disebut Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Masing-masing Unit Bisnis Pertambangan memiliki wilayah binaan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat.

Dalam melaksanakan CSR PT. Aneka Tambang Tbk. memiliki empat bidang (*stream*) yang menjadi perhatian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Konsep tersebut diberi nama Kompas, sesuai empat arah mata angin. *North* untuk *Nature*, *South* untuk *Social*, *West* untuk *Well being* dan *East* untuk *Economic*. Komitmen pengembangan CSR PT. Aneka Tambang Tbk. dimulai dengan pembentukan organisasi baru yakni satuan kerja *Community Development (Comdev) Group* di bawah koordinasi Direktur Umum dan SDM. Pada tahun 2007 perusahaan kembali melakukan perubahan beberapa satuan kerja, antara lain menggantikan satuan kerja *Comdev Group* menjadi *CSR Group*. Dalam pelaksanaannya, *CSR Group* selalu melakukan koordinasi dengan Divisi atau satuan kerja lain yang terkait, seperti *Operation Controlling*, *Environment* dan *Post Mining*, *Corporate Secretary* dan *Public Relation*.
<http://www.portalhr.com/majalah/edisi/sebelumnya/hubungan/lid811.html>.

Perusahaan dalam menerapkan CSR berpedoman pada visi CSR perusahaan 2013 yakni “menjadi perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang terkemuka dan terpercaya di industri pertambangan Indonesia” (Master Plan CSR PT. Antam Tbk. : 12) dan misi CSR 2013 “mewujudkan CSR yang terpercaya dengan kemanfaatan tinggi bagi stakeholder; mewujudkan CSR yang terbaik diantara perusahaan tambang nasional; dan mewujudkan CSR excellent yang mengacu pada standar internasional (ISO 26000, IFC, dan GRI). Visi dan misi CSR perusahaan ini masih berlaku meskipun perusahaan telah mengumumkan perpanjangan masa beroperasi hingga tahun 2019. Dalam menerjemahkan masterplan CSR, perusahaan juga mengacu pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Bidang-bidang pembangunan yang teralokasi dalam Musrenbangda didukung oleh perusahaan dan diupayakan untuk dapat dialokasikan dalam program-program CSR PT. Aneka Tambang Tbk.

Sebagai Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), PT. Aneka Tambang Tbk. melaksanakan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Terdapat dua bagian kegiatan dalam PKBL, yakni Program Kemitraan (PK) dan Program Bina Lingkungan (BL). Program Kemitraan dimanfaatkan sebagai dana bergulir (*revolving fund*) yang diambil dari penyisihan maksimal 2% bagian dari laba bersih tahun sebelumnya. Dalam skala prioritas, pelaksanaan bantuan pinjaman dana diperuntukkan bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk koperasi yang berada dalam wilayah operasi PT. Aneka Tambang Tbk. Program Bina Lingkungan merupakan bentuk pengembalian sebagian keuntungan perusahaan untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di setiap daerah operasi perusahaan yang bersangkutan.

3.2.2. Gambaran Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.

Kebijakan perusahaan dalam CSR ini tercantum dalam Master Plan CSR 2013 PT. Aneka Tambang Tbk. yakni Mendukung Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, dan Lingkungan, serta Penyediaan Infrastruktur. Penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Tbk. berupa fasilitas pendidikan seperti sekolah, Rumah Belajar Masyarakat (RBM), dan

fasilitas sosial lain seperti pembangunan jalan desa, jembatan poskamling, puskesmas, gedung pertemuan desa, sarana air bersih, dan gedung olah raga.

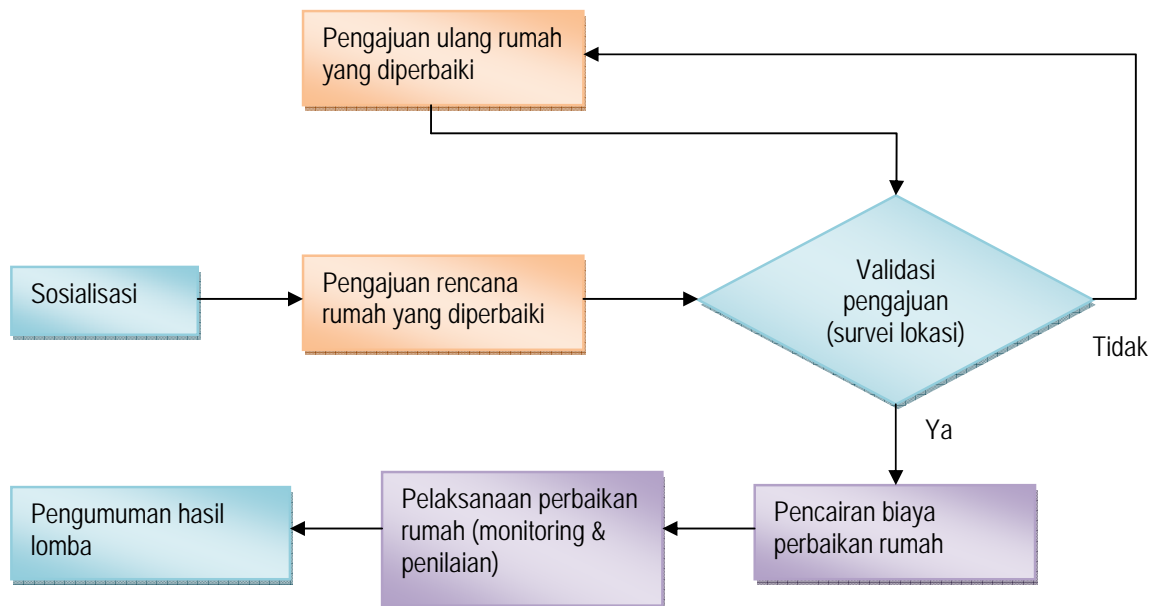
Dukungan bagi pembangunan perumahan dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Tbk. melalui upaya pembangunan perumahan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan dimulai sejak 1997. Namun ketika itu pembangunan perumahan masih berupa *charity* dan belum ada perencanaan khusus, sejak tahun 2005 mulai melakukan bidang perumahan diprogramkan menjadi salah satu bagian dari CSR perusahaan. Pada tahun 2007–2008 PT. Aneka Tambang Tbk. melaksanakan program renovasi rumah ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dua wilayah besar unit operasi perusahaan yakni Unit Bisnis Pertambangan Nikel–Pomalaa dan Unit Bisnis Pertambangan Emas–Pongkor. Program renovasi rumah di UBP Nikel dinamakan Program Aladin–Atap, Lantai, dan Dinding. Sedangkan di UBP Emas Pongkor dinamakan Program Rumah Jompo yaitu program peremajaan kembali rumah-rumah warga miskin yang tidak layak huni di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tahun 2009 ini dalam rangka HUT PT. Aneka Tambang Tbk., UBPE Pongkor melakukan lomba rumah sehat melalui perbaikan minimal 3 rumah setiap desa bagi masyarakat miskin di 10 desa sekitar wilayah operasi perusahaan, di Kecamatan Nanggung. Masing-masing desa diberikan modal sebesar Rp. 27,5 juta. Kegiatan ini terkait dengan peningkatan kesehatan keluarga, sehingga salah satu persyaratan bagi rumah yang diperbaiki adalah dihuni oleh ibu hamil dan balita. Lomba rumah sehat ini bertujuan untuk menekan angka kematian ibu hamil dan balita yang disebabkan oleh buruknya kualitas rumah dan lingkungan perumahannya.

Selain program-program tersebut pada tahun 2009 ini PT. Aneka Tambang Tbk. bekerjasama dengan *Habitat for Humanity* Indonesia berencana untuk melakukan Program Bedah Rumah Adat Betawi di Kampung Betawi, Situ Babakan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Program ini dimaksudkan untuk membangun kembali rumah warga yang tidak layak huni agar memenuhi standar kelayakan dengan desain adat Betawi, dan bertujuan untuk melestarikan budaya Betawi. Proses perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh dua unit bisnis PT. Aneka Tambang Tbk. dilakukan bekerjasama dengan

perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga sekitar (Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2009).

3.2.3. Lomba Perbaikan Rumah antar Desa di Kecamatan Nanggung

Lomba perbaikan rumah antar desa di Kecamatan Nanggung merupakan bentuk program CSR bidang perumahan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk. dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Bina Lingkungan (BL) yang dirancang oleh Satuan Kerja Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) PT. Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor. Penerapan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan upaya peningkatan kesehatan khususnya balita secara swadaya melalui perbaikan rumah.



Sumber : TOR Lomba Perbaikan Rumah Sehat antar Desa se Kecamatan Nanggung, 2009

GAMBAR 3.1.
PROSES LOMBA PERBAIKAN RUMAH ANTAR DESA

Persyaratan utama dalam lomba perbaikan rumah yang menjadi kriteria rumah yang diperbaiki meliputi rumah warga asli desa setempat, diutamakan yang

dihuni oleh keluarga yang memiliki anak balita, termasuk keluarga prasejahtera 2, dan minimal rumah yang diperbaiki sebanyak 3 rumah. Pelaksanaan perbaikan rumah di setiap desa diserahkan kepada masing-masing Kepala dan Perangkat Desa. Berdasarkan ketentuan dan keleluasaan itu, setiap desa dapat melakukan perbaikan rumah sesuai kondisi dan kebijaksanaan setempat. Adapun perusahaan memberikan kriteria penilaian sebagai acuan meliputi realisasi jumlah rumah yang diperbaiki, kualitas hasil perbaikan rumah, tingkat kesesuaian kategori rumah sehat, serta peran serta dan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan perbaikan rumah.

Dalam upaya mendorong setiap desa agar memenuhi kriteria perbaikan rumah, perusahaan memberikan penghargaan/*reward* kepada pemenang lomba sebesar Rp. 12.500.000 kepada juara I, Rp. 7.500.000 kepada juara II, dan Rp. 5.000.000 kepada juara III. Disamping penghargaan, perusahaan juga mengenakan sanksi diskualifikasi apabila desa tersebut tidak memenuhi syarat minimal 3 rumah, dengan mengembalikan biaya perbaikan rumah sebesar Rp. 10.000.000 untuk tiap rumah (TOR Lomba Perbaikan Rumah Sehat antar Desa se Kecamatan Nanggung, 2009). Berdasarkan penilaian Tim Comdev yang menjadi juara I, II, dan III, masing-masing adalah Desa Cisarua, Bantar Karet, dan Sukaluyu.

3.3. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat

Ketentuan utama dalam lomba perbaikan rumah sehat adalah jumlah minimal rumah yang diperbaiki adalah 3 buah, pemilihan penerima bantuan dan pola pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab kepala desa. Masing-masing desa melakukan kegiatan ini sesuai dengan kondisi masyarakat setempat dan kebijakan kepala desa.

3.3.1. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Malasari

Berdasarkan pemahaman kepala desa, lomba perbaikan rumah sehat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, dan di Desa Malasari jumlah rumah dengan kondisi demikian mencapai 400 rumah. Kepala Desa mengajak para kepala Rukun Warga (RW) untuk menentukan siapa saja

yang akan dibantu dalam kegiatan perbaikan rumah sehat ini. Berdasarkan usulan para ketua RW tersebut diputuskan bahwa masyarakat yang diperbaiki rumahnya dialokasikan di 3 lokasi/kampung yang berbeda yakni Ibu Ilah Kampung Malasari, Bapak Ating Kampung Nyuncung, dan Ibu Iyum Kampung Kopo. Prioritas pilihan adalah pada keluarga miskin dengan kondisi rumah yang hampir roboh. Ketiga calon penerima bantuan tersebut selanjutnya diusulkan kepada perusahaan dan disetujui untuk dicairkan dananya. Pembangunan rumah dipimpin masing-masing ketua RW dengan terlebih dulu menaksir kebutuhan bahan bangunan di setiap calon rumah yang akan diperbaiki. Masing-masing rumah disediakan 2 orang tukang dan bahan bangunan sesuai kebutuhan dan melibatkan masyarakat setempat untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Rumah-rumah tersebut dirubuhkan lebih dulu dan dibangun kembali. Pembangunan 3 rumah selesai dalam waktu yang ditentukan yakni 14 hari dan telah dihuni kembali oleh para penerima bantuan.

Kondisi rumah hasil perbaikan, hampir serupa dengan ciri atap rumah berupa asbes, lantai semen, sedang dinding berupa triplek, bambu, atau papan, dengan cat warna hijau. Ketiga rumah sebelum diperbaiki tidak memiliki sarana air bersih, kamar mandi dan WC, setelah diperbaiki ketiga sarana rumah tersebut disediakan.

3.3.2. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Cisarua

Informasi tentang lomba rumah sehat dari perusahaan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Cisarua dengan mengumpulkan ketua RW di desanya untuk memilih penanggung jawab kegiatan dan penerima bantuan perbaikan rumah. Seleksi terhadap penanggung jawab diperlukan karena dalam lomba dibatasi oleh waktu dan agar penerima bantuan dapat terpilih secara tepat. Ketiga lokasi yang diusulkan adalah Kampung Jangkar dengan calon penerima Bapak Mamat, Kampung Ciparai dengan penerima Bapak Yanto, dan salah satu penghuni Kampung Sukamanah. Pemilihan tersebut sempat membuat persoalan oleh karena ketidaksetujuan warga Sukamanah, mereka meminta agar bukan hanya sebuah rumah saja yang diperbaiki. Berdasarkan rembug warga di Kampung Sukamanah, akhirnya disepekatkan bahwa perbaikan dilakukan di semua

rumah di kampung ini, melalui perbaikan jendela bagi rumah yang memerlukan, rumah lainnya dilakukan pengecatan. Kampung ini sebelumnya tidak teraliri listrik, setelah dilakukan kegiatan ini perusahaan memberikan bantuan listrik sehingga kampung ini dapat menikmati sumber energi ini.

Penanggung jawab perbaikan rumah di Kampung Sukamanah adalah Ketua RT setempat. Penanggung jawab pembangunan rumah Pak Mamat di Kampung Jangkar adalah Pak Fahir Ketua RT 05 RW 01. Penyediaan tukang dan bahan bangunan dilakukan oleh penanggung jawab, dan dalam pembangunan dibantu masyarakat secara gotong-royong. Penanggung jawab pembangunan rumah Pak Yanto di Kampung Ciparai adalah Kepala Desa sendiri Bapak Idris. Sebelumnya, penerima bantuan tidak memiliki rumah dan tanah, sehingga kepala desa memberikan sebidang tanah untuk dibangun rumah bagi keluarga penerima bantuan. Pembangunan rumah di Kampung Jangkar dan Ciparai meliputi pembangunan lantai, dinding, atap, kamar mandi dan WC. Atas pembangunan rumah ini, Desa Cisarua berhasil menjadi juara pertama lomba perbaikan rumah sehat di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

3.3.3. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Curug Bitung

Pemilihan calon penerima bantuan dilakukan oleh Kepala Desa dibantu RT, RW di Desa Curug Bitung. Kriteria pemilihan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang miskin dan kondisi rumah yang rawan roboh atau tidak layak dihuni lagi. Penerima bantuan tersebut tersebar di wilayah desa, yakni Ibu Iyah di RT 01 RW 08 Kampung Cibeber, Ibu Amah RW 12 Kampung Taluk Waru, dan Bapak Samah RT 03 RW 01 Kampung Nunggul. Setiap RT atau RW menjadi penanggung jawab pembangunan rumah di wilayah masing-masing. Tugasnya adalah membelanjakan bahan bangunan, menyediakan tukang, dan mengkoordinasikan pembangunan rumah dengan menggerakkan masyarakat untuk turut gotong-royong. Pembangunan rumah selesai dalam waktu yang ditentukan dengan kondisi secara umum lantai semen, dinding bambu, genteng, untuk kamar mandi dan WC hanya dibangun di Kampung Taluk Waru saja.

3.3.4. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Nanggung

Kepala Desa Nanggung mengajak para tokoh masyarakat dan RW untuk melakukan pemilihan warga yang berhak dibantu untuk diperbaiki rumahnya. Berdasarkan kondisi masyarakat dan hasil rembug tersebut diputuskan bahwa lokasi perbaikan rumah diprioritaskan di RW 9 Kampung Banar yang memang terdapat banyak masyarakat tidak mampu dengan kondisi rumah yang memprihatinkan. Sebagai ketua RW 9, Bapak Mukim ditunjuk sebagai penanggung jawab dan mengkoordinasikan perbaikan rumah 4 keluarga miskin. Keluarga penerima tersebut adalah Ibu Mimih, Ibu Arum, Bapak Emog, dan Bapak Mumuh. Pembangunan rumah dilakukan secara bergiliran dengan dua tukang dibantu keluarga penerima bantuan dan perangkat desa. Gotong-royong warga masyarakat agak sulit dilakukan karena masing-masing kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Pembangunan setiap rumah memerlukan waktu 3 sampai 4 hari dan dikerjakan siang malam, meskipun demikian pada waktu yang ditentukan semua rumah berhasil diperbaiki. Kondisi rumah hampir seragam dengan lantai keramik, dinding bambu atau triplek dan atap genteng, tanpa kamar mandi dan MCK.

3.3.5. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Bantar Karet

RT, RW, dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam pemilihan calon penerima bantuan perbaikan rumah. Kriteria pemilihan rumah yang akan dibantu adalah kondisinya sudah tidak layak dan rentan roboh dan ketidakmampuan keluarga untuk memiliki rumah. Terdapat 3 keluarga yang dipilih, 2 diantaranya dipilih karena kondisi rumahnya sudah tidak layak dan miskin, satu lainnya karena keluarga miskin dengan anggota besar dan belum memiliki rumah dan masih menumpang di rumah orang tua. Ketiga penerima bantuan tersebut tersebar di wilayah Bantar Karet yang cukup luas, yakni di Cadas Leueur Bapak Jasuni, Sidempok Bapak Tarpik (alm), dan Bajong Sari atau Baju Rambeng Bapak Amas. Penanggung jawab pembangunan adalah para RW setempat yang mengkoordinasikan pembelian bahan bangunan, menyediakan tukang, dan mengajak masyarakat untuk ikut bergotong-royong membantu pembangunan rumah warga penerima bantuan. Hasil pembangunan rumah di Desa Bantar Karet

dengan kondisi lantai keramik, dinding setengah tembok, triplek dan bambu di bagian atas, serta atap asbes. Penerima bantuan di Kampung Baju Rambeng, tidak memiliki tanah sehingga rumah dibangun di atas tanah milik orang tua dan atas pinjaman tetangga di depan rumah. Desa Bantar Karet memperoleh juara kedua dalam lomba perbaikan rumah sehat di Kecamatan Nanggung.

3.3.6. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Pangkal Jaya

Kepala Desa Pangkal Jaya menunjuk perangkat desa yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan rumah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam lomba perbaikan rumah sehat. Dalam melakukan pemilihan penerima bantuan, didasarkan atas kondisi masyarakat miskin dan rumah yang sudah tidak layak huni atau hampir roboh. Berdasarkan kondisi rumah tidak layak di desa ini yang cukup besar, kepala desa memilih 5 keluarga yang benar-benar tidak mampu dan kondisi rumahnya paling parah. Masing-masing keluarga tersebut adalah Pak Sarha dan Ibu Aneh di RT 01 RW 08, Pak Ata di RT 02 RW 06 Kampung Pangkalan, Pak Anen dan Pak Upeh di RW 11 Kampung Ciketeug. Pembangunan rumah di setiap lokasi dikerjakan oleh 2 tukang dan dibantu oleh masyarakat setempat secara gotong-royong. Kondisi masyarakat yang sangat miskin tidak memungkinkan mereka mendukung pembiayaan dalam pembangunan rumahnya sendiri secara swadaya. Hasil pembangunan rumah di 4 tempat berupa rumah dengan kondisi lantai semen, dinding bambu, dan atap berupa genteng, tidak ada kamar mandi dan WC. Sedangkan rumah Pak Ata di Kampung Pangkalan, kondisinya permanen, dengan lantai semen, dinding sebagian tembok, dan atap genteng, tanpa kamar mandi dan WC.

3.3.7. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Kalong Liud

Pemilihan calon penerima bantuan di Desa Kalong Liud sempat mengalami permasalahan, karena satu keluarga menolak rumahnya diperbaiki karena menuntut dibangun rumah permanen dan diberikan mebel sebagaimana *reality show* “Bedah Rumah” di TV. Usulan penerima bantuan selanjutnya diganti dan diusulkan kepada perusahaan, dan disetujui untuk dicairkan dana pembangunannya. Kepala desa menunjuk RT, RW setempat untuk disertai

tanggung jawab dalam pembangunan rumah di setiap wilayah yang terpilih. Pembangunan rumah dilakukan oleh tukang, keluarga penerima, dan dibantu masyarakat tetangga penerima sesuai waktu yang ditentukan. Keluarga yang dibantu adalah Ibu Anih di RT 4 RW 5, Ibu Siti – Bapak Busong di RT 3 RW 3, dan Bapak Mamat di RT 6 RW 1. Hasilnya, rumah yang sebelumnya sudah tidak layak dan rawan roboh, menjadi berdiri lagi dengan kondisi lantai semen, dinding sebagian tembok dan bambu, serta atap berupa genteng. Keluarga Ibu Anih, seorang janda yang tinggal bersama anak dan menantunya mengungkapkan, semenjak rumahnya diperbaiki kondisi anaknya menjadi tidak sehat dan ingin selalu lari dari rumah. Bapak Busong yang tinggal di rumah ibunya Ibu Siti, dan dibantu karena kondisi rumahnya tidak layak dengan jumlah anggota keluarganya cukup besar, mengungkapkan kondisinya makin suram setelah rumahnya diperbaiki. Sebaliknya keluarga Bapak Mamat yang diwakili istrinya menyampaikan bahwa perbaikan rumah yang dilakukan oleh desa ini cukup membantu keluarga dalam menghuni rumah yang lebih layak.

3.3.8. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Parakan Muncang

Desa Parakan Muncang merupakan desa dengan penduduk tertinggi di Kecamatan Nanggung, banyak laporan yang diterima kepala desa tentang kondisi rumah warganya yang hampir roboh dan perlu diperbaiki. Dalam pemilihan keluarga yang diperbaiki rumahnya, kepala desa mencoba menjelaskan kepada warganya agar bersabar, karena alokasi untuk tahun ini hanya 3 rumah. Apabila di tahun-tahun mendatang ada alokasi lagi akan dipilih lagi kondisi rumah yang perlu diperbaiki berikutnya. Keluarga yang berhak diperbaiki rumahnya adalah Bapak Samin di RT 02 RW 02, Bapak Sasmita di Pasir Gintung, dan Bapak Harun di Kampung Lukut. Pemilihan 3 lokasi yang berbeda ini dimaksudkan untuk melakukan pemerataan pembangunan dan mengurangi kecemburuan masyarakat. Dibantu RT dan RW setempat, pembangunan rumah di 3 lokasi dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dan kebutuhan masing-masing penerima bantuan. Kondisi rumah Pak Samin dan Pak Sasmita, berlantai semen, dengan dinding tembok, dan atap genteng, sedangkan rumah Pak Harun, kondisi lantai semen, dinding sebagian tembok sisanya bambu, atap genteng, dan tanpa MCK.

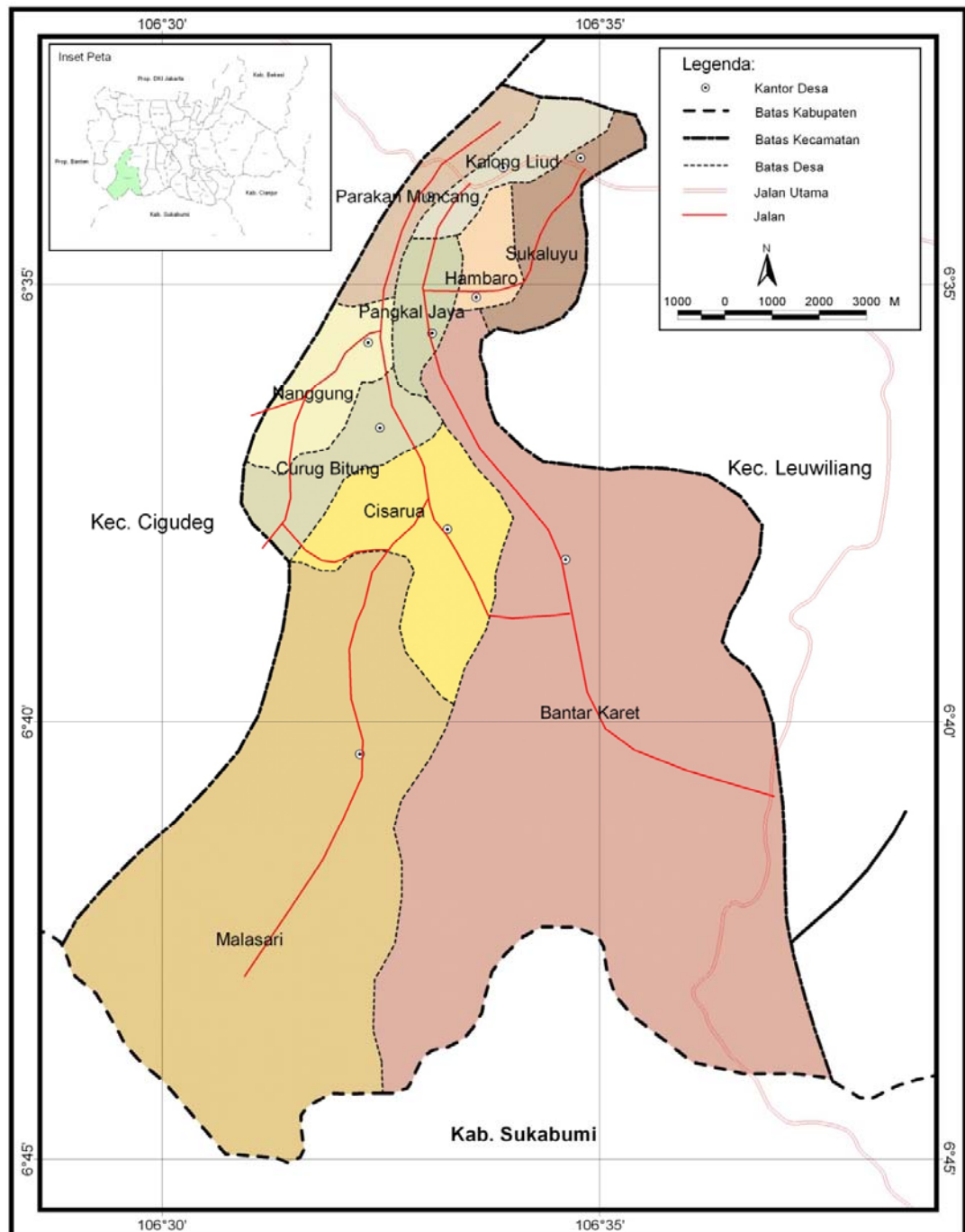
3.3.9. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Hambaro

Desa Hambaro memiliki jumlah rumah yang tidak layak huni cukup besar dan perlu memperoleh perhatian. Dalam pemilihan penerima bantuan perbaikan rumah, kepala desa mengajak RT RW untuk menentukan siapa saja keluarga yang prioritas dan berhak dibantu lebih dulu. Keluarga tersebut adalah Ibu Juhati dan Bapak Maman di RW 4 dan Bapak Uba Sobani di RW 2. Pemilihan tersebut didasarkan atas kondisi rumah yang paling rawan roboh dan kondisi ekonominya yang tidak mampu. Dalam pembangunan yang dikoordinasikan oleh RW setempat, masyarakat penerima bantuan tidak mengeluarkan biaya apapun bahkan untuk konsumsi tukang dan warga yang bergotong-royong membantu pembangunan rumahnya, disediakan oleh RW setempat atau Kepala Desa. Kondisi hasil perbaikan rumah, jenis lantai berupa lantai teras keramik, ruang dalam berupa semen, dinding setengah tembok dan bambu, dan atap berupa genteng, tanpa MCK.

3.3.10. Pelaksanaan Perbaikan Rumah Sehat di Desa Sukaluyu

Pemilihan penerima bantuan perbaikan rumah diprioritaskan kepada keluarga yang tinggal di rumah yang sudah tidak layak atau hampir roboh. Bersama perangkat RW, Kepala Desa Sukaluyu memilih 3 keluarga di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Bapak Uus di RW 7, Bapak Juhari di RW 2 Kampung Dukuh, dan Bapak Encep di RW 9 Kampung Hambaro. Penanggung jawab pembangunan rumah diserahkan kepada perangkat RW, kegiatan yang dilakukan meliputi adalah penyediaan tukang, bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan sampai selesai tepat waktu. Hasil pembangunan rumah Bapak Juhari berupa rumah dengan kondisi lantai semen, dinding sebagian tembok dan bambu, atap berupa genteng. Kondisi rumah Pak Encep, lantainya semen, dinding di bagian muka rumah tembok, di bagian samping dan belakang setengah tembok dan bambu, atap berupa genteng. Kondisi rumah Bapak Uus sebagai ketua RW baru hasil pemekaran, agak berbeda dengan yang lain, dinding semua tembok, lantai sebagian semen dan tanah, atap genteng. Pembangunan rumah Bapak Uus belum sepenuhnya selesai, MCK belum terbangun, dan lantainya masih perlu diperbaiki, namun kondisi temboknya sudah permanen. Pemilik rumah memperkirakan masih

perlu dana yang cukup besar untuk meneruskan pembangunan rumahnya dan ini sudah menjadi tanggung jawabnya.



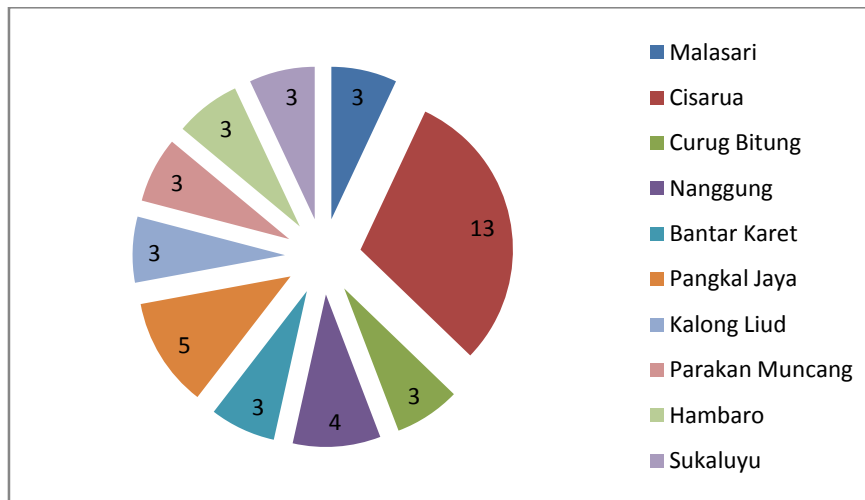
Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.2
PERSEBARAN LOKASI PERBAIKAN RUMAH

3.4. Kondisi Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Penerima bantuan perbaikan rumah dalam rangka penerapan CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. sejumlah 43 keluarga atau unit rumah. Jumlah terbesar yakni 13 rumah terdapat di Desa Cisarua, 5 rumah di Desa Pangkal Jaya, 4 rumah di Desa Nanggung, dan sedangkan 3 rumah di masing-masing desa lainnya Desa Curug Bitung, Bantar Karet, Kalong Liud, Parakan Muncang, Hambaro, dan Sukaluyu. Perbedaan jumlah rumah di setiap desa merupakan kebijakan masing-masing desa sesuai dengan kondisi desa dan inovasi yang diterapkan. Dilihat dari penyebaran lokasi rumah-rumah tersebut juga beragam, ada yang mengelompok seperti di Desa Nanggung dan satu Kampung Sukamanah Desa Cisarua, lokasi lainnya menyebar. Persebaran lokasi dapat digambarkan dalam Gambar 3.2.

Perbaikan rumah dilakukan terhadap 43 rumah, namun dalam menggambarkan kondisi penerima bantuan perbaikan rumah, penulis menyajikan 33 rumah/keluarga. Penyajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesamaan pola perbaikan 11 rumah di satu kampung yakni Kampung Sukamanah Desa Cisarua. Oleh karenanya satu rumah/keluarga dianggap cukup representatif untuk mewakili 10 rumah/keluarga yang lain. Jumlah penerima bantuan setiap desa dapat dilihat dalam Gambar 3.3.



Sumber : Hasil survei, 2009

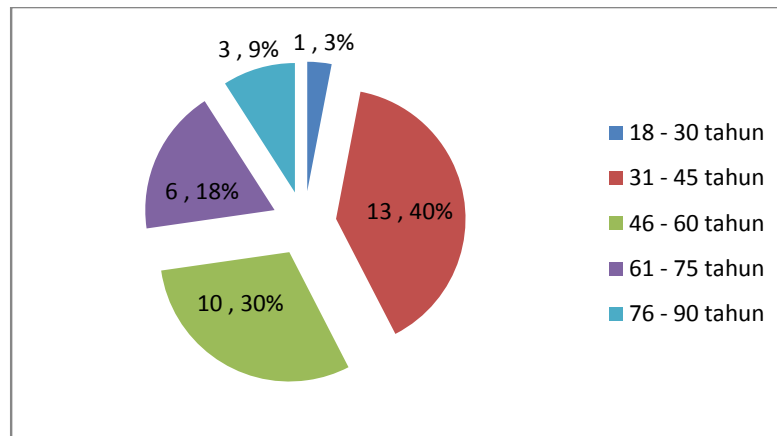
GAMBAR 3.3
JUMLAH KELUARGA PENERIMA BANTUAN

3.4.1. Kondisi Sosial Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Kondisi sosial penerima bantuan perbaikan rumah di 10 desa dapat dijabarkan menurut usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga/penghuni rumah, dan lama tinggal.

a. Usia Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil angket usia penerima bantuan cukup bervariasi, yang paling muda usia 18 tahun dan yang paling tua berusia 90 tahun. Dalam menggambarkan informasi kondisi usia penerima bantuan perbaikan rumah melalui skala interval yakni 18–30 tahun, 31–45 tahun, 46–60 tahun, 61–75 tahun, dan 76–90 tahun. Jumlah dan persentase penerima bantuan berdasarkan interval usia dapat dilihat dalam Gambar 3.4.



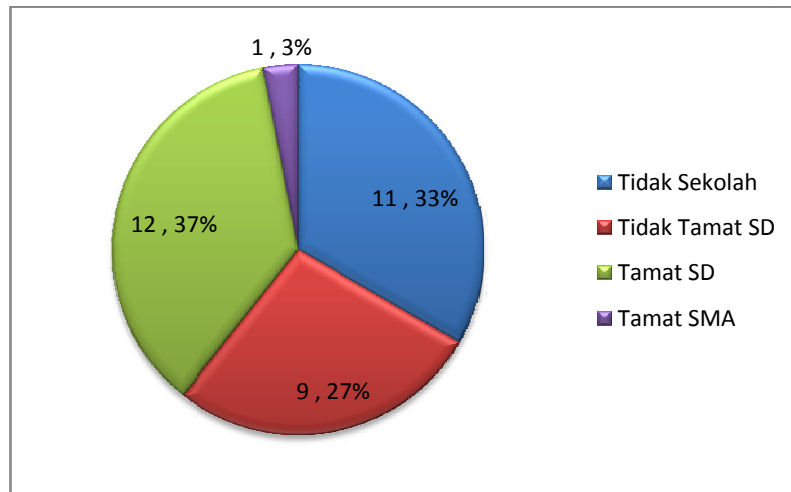
Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.4
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN USIA

Berdasarkan usia penerima bantuan perbaikan rumah sebagaimana tergambar dalam diagram di atas, penerima bantuan yang terbesar adalah di usia antara 31 hingga 45 tahun yaitu sejumlah 13 orang atau 40%. Sedangkan jumlah terkecil adalah pada usia 18–30 tahun yang berjumlah hanya 1 orang yang berada di Desa Cisarua. Usia tertua yakni 76–90 tahun sebanyak 3 orang atau 9% dari jumlah penerima bantuan perbaikan rumah.

b. Tingkat Pendidikan Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil kuesioner, tingkat pendidikan penerima bantuan terdiri atas 4 jenis yakni tidak pernah sekolah, sekolah SD tapi tidak tamat, tamat SD, dan lulusan SMA. Jumlah dan persentase penerima bantuan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam Gambar 3.5.



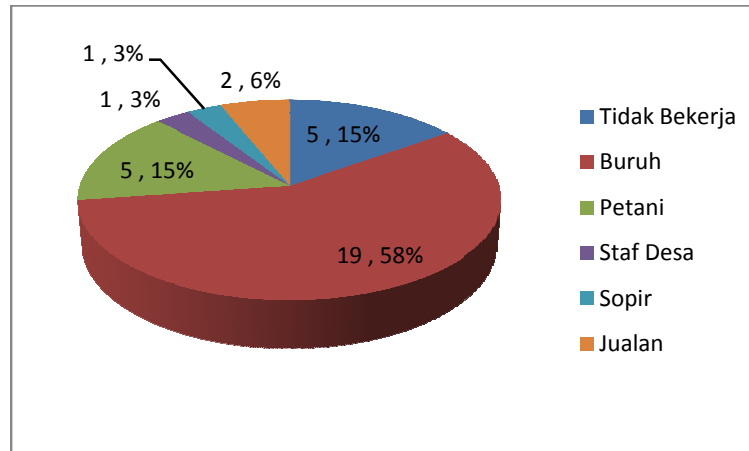
Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.5
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Berdasarkan tingkat pendidikan penerima bantuan perbaikan rumah sebagaimana tergambar dalam diagram di atas, penerima bantuan yang tamat SD sejumlah 12 orang atau 37%, diikuti tidak sekolah sejumlah 11 orang atau 33%, dan tidak tamat SD sejumlah 9 atau 27%. Terdapat seorang penerima bantuan yang tamat SMA.

c. Jenis Pekerjaan Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil kuesioner, jenis mata pencaharian penerima teridentifikasi sejumlah 6 jenis yakni tidak bekerja, buruh, petani, staf desa, sopir, dan pedagang kecil. Tidak bekerja atau menganggur merupakan salah satu jenis profesi penerima bantuan di 10 desa penelitian. Buruh meliputi buruh tani di sawah, buruh kuli, dan tukang cuci. Jumlah dan persentase penerima bantuan berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dalam Gambar 3.6.



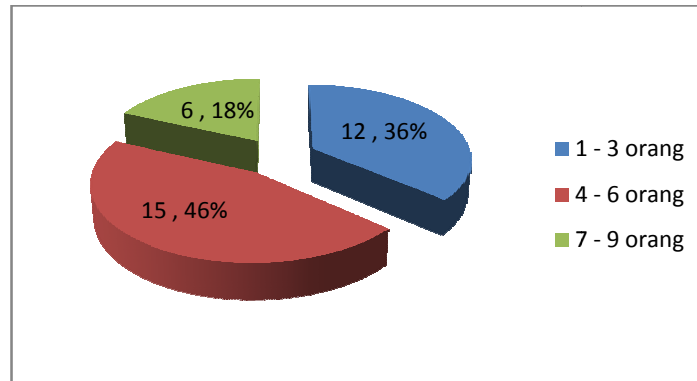
Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.6
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN

Berdasarkan jenis pekerjaan penerima bantuan perbaikan rumah sebagaimana tergambar dalam diagram di atas, penerima bantuan yang terbesar yakni 19 orang atau 58% adalah sebagai buruh. Urutan kedua adalah sebagai petani dan sudah tidak bekerja, masing-masing sejumlah 5 orang atau 15%. Sebanyak 2 orang atau 6% berjualan dan sisanya memiliki pekerjaan sebagai sopir dan staf desa, masing-masing 1 orang.

d. Jumlah Anggota Keluarga Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil angket, jumlah anggota keluarga atau penghuni rumah penerima bantuan cukup beragam, yaitu antara 1 hingga 9 orang. Agar informasi tentang jumlah penghuni rumah lebih mudah dibaca, data disajikan dalam 3 interval yakni 1–3 orang, 4–6 orang, dan 7–9 orang. Jumlah dan persentase penerima bantuan berdasarkan jumlah anggota keluarga dapat dilihat dalam Gambar 3.7.



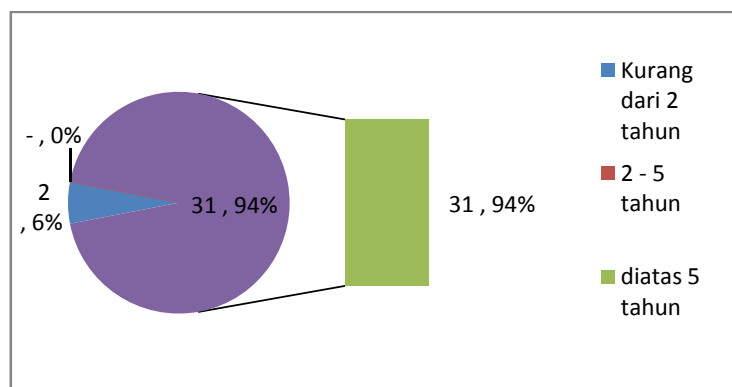
Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.7
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN JUMLAH
ANGGOTA KELUARGA

Berdasarkan kondisi jumlah anggota keluarga atau penghuni rumah yang diperbaiki, sejumlah 15 rumah atau 46% dihuni oleh 4–6 orang, 12 rumah atau 36% dihuni oleh 1–3 penghuni, dan 6 rumah atau 18% dihuni oleh 7–9 jiwa.

e. Lama Tinggal Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil angket, lama tinggal penerima bantuan cukup beragam, yaitu antara 4 bulan hingga 30 tahun. Untuk menyederhanakan informasi, disajikan dengan interval sebagai berikut : kurang dari 2 tahun, 2–5 tahun, dan di atas 5 tahun. Jumlah dan persentase penerima bantuan berdasarkan lama tinggal penghuni dapat dilihat dalam Gambar 3.8.



Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.8
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN LAMA TINGGAL

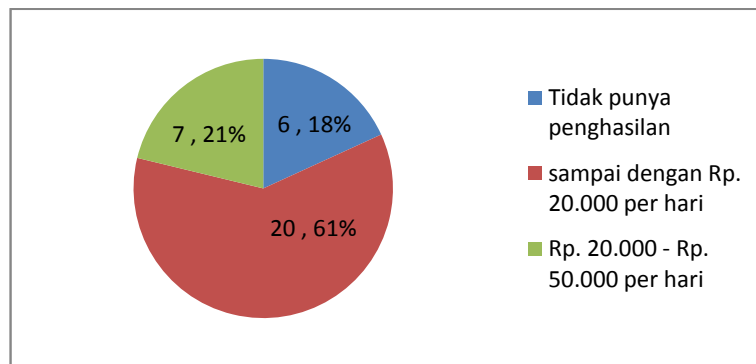
Berdasarkan lama tinggalnya, sebanyak 31 keluarga penerima bantuan atau 94% tinggal di rumah tersebut di atas 5 tahun, 2 keluarga atau 6% lainnya baru tinggal kurang dari 2 tahun tepatnya selama rumah tersebut dibangun.

3.4.2. Kondisi Ekonomi Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Kondisi ekonomi penerima bantuan perbaikan rumah di Kecamatan Nanggung dapat digambarkan berdasarkan jumlah pendapatan harian dan kemampuan menabung penerima bantuan.

a. Tingkat Penghasilan Penerima Bantuan

Penghasilan diukur dalam waktu harian karena didasarkan atas sebagian besar jenis pekerjaan warga penerima bantuan yang bekerja di sektor non formal.



Sumber : Hasil survei, 2009

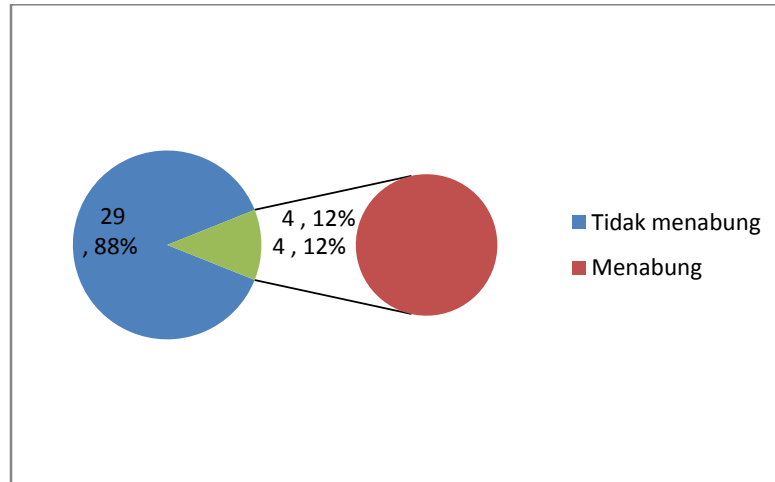
GAMBAR 3.9
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN JUMLAH
PENGHASILAN HARIAN

Jumlah penerima bantuan yang memiliki penghasilan sampai dengan Rp. 20.000 per hari terdapat 20 orang atau 61%. Sebanyak 7 orang atau 21% memiliki penghasilan antara Rp. 20.000 sampai dengan 50.000, dan sebanyak 6 orang atau 18% tidak memiliki penghasilan karena sudah tidak bekerja.

b. Kemampuan Menabung Penerima Bantuan

Kemampuan menabung didasarkan atas upaya penerima bantuan dalam menyisihkan sebagian penghasilannya untuk disimpan. Menabung bagi

masyarakat penerima bantuan dapat melalui dengan menyisihkan uang dengan menyimpannya di rumah atau melalui tabungan anak di sekolah.



Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.10
JUMLAH PENERIMA BANTUAN BERDASARKAN KEMAMPUAN
MENABUNG

Jumlah penerima bantuan yang memiliki tabungan atau berusaha menyisihkan penghasilannya untuk ditabung adalah 4 orang atau 12%, sedangkan 29 orang atau 88% sisanya tidak memiliki tabungan.

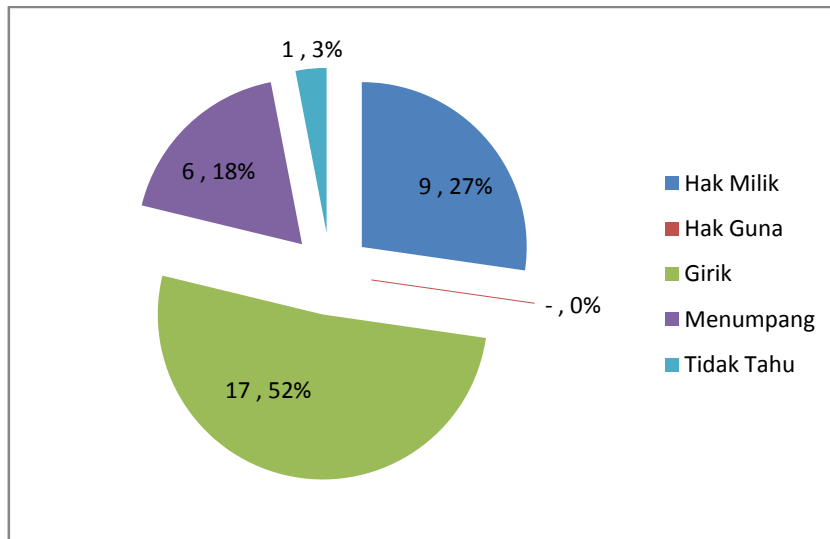
3.4.3. Kondisi Fisik Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Kondisi fisik rumah hasil lomba perbaikan rumah di Kecamatan Nanggung dapat digambarkan melalui status dan luas tanah dimana bangunan rumah berdiri, serta kondisi rumah penerima bantuan. Kondisi rumah itu sendiri digambarkan dengan membandingkan sebelum dan sesudah diperbaiki atau dibangun. Penggambaran informasi data sebelum pembangunan rumah, tidak semuanya diperoleh data, sehingga data yang ditampilkan lebih pada penggambaran sesuai informasi pemilik atau penghuni rumah.

a. Status Penguasaan Tanah

Status tanah meliputi hak milik, hak guna, girik, dan menumpang, dan jenis-jenis status tersebut yang dijadikan acuan dalam memperoleh data dari

masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah di setiap desa di Kecamatan Nanggung. Berdasarkan kuesioner diperoleh gambaran bahwa 17 orang atau 52% menjawab bahwa tanah dimana bangunan rumahnya berdiri merupakan tanah dengan status girik. 9 orang atau 27% menjawab bahwa tanahnya berstatus hak milik, 6 orang atau 18% menjawab masih menumpang, dan 1 orang sisanya tidak tahu tentang status tanahnya.

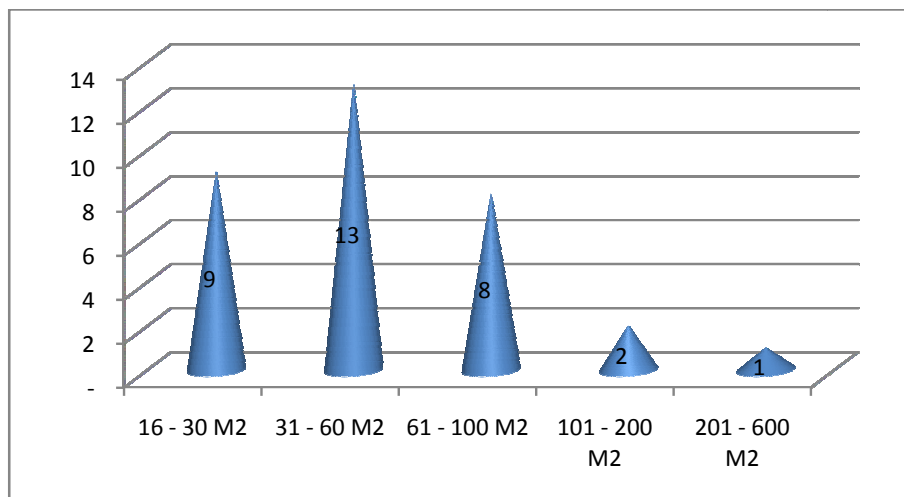


Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.11
KONDISI RUMAH BERDASARKAN STATUS PENGUASAAN TANAH

b. Luas Tanah

Berdasarkan hasil kuesioner kepada penerima bantuan perbaikan rumah dan pengamatan di lapangan, diperoleh data luas tanah dimana bangunan berdiri cukup bervariasi mulai dari 16 m² hingga 600 m². Dalam gambar berikut ini ditampilkan interval luasan tanah penerima bantuan perbaikan rumah sebagai berikut : 13 orang menguasai tanah dimana bangunan rumahnya berdiri seluas 31–60 m², 9 orang luas tanahnya 16–30 m², 8 orang luas tanahnya 61–100 m², 2 orang luas tanahnya 101–200 m², dan seorang dengan luas tanah 600 m².

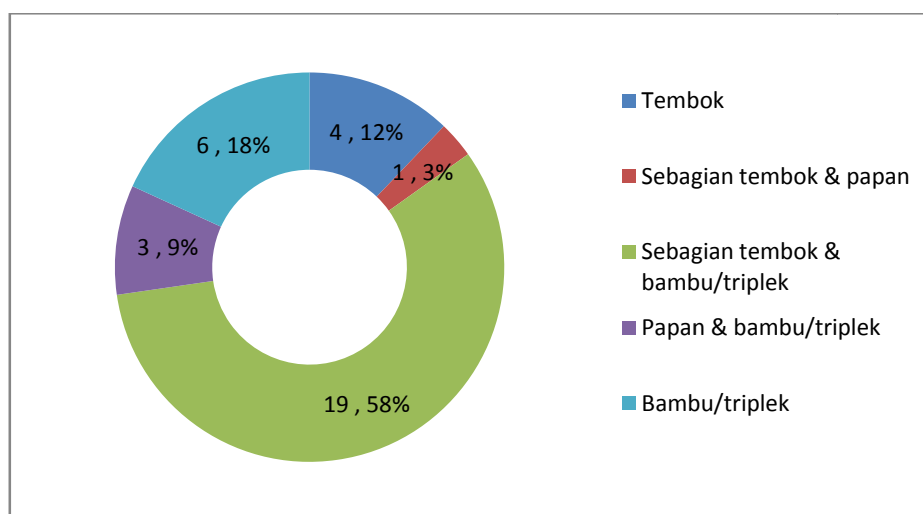


Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.12
KONDISI RUMAH BERDASARKAN LUAS TANAH

c. Jenis Dinding

Syarat rumah sehat yang kedua adalah kelayakan teknis yang dapat dilihat dari konstruksi bangunan dan dapat memenuhi standar keamanan penghuni dari bahaya kerubuhan. Dinding rumah hasil pembangunan yang terbesar adalah dalam kondisi sebagian tembok, sebagian bambu/triplek.

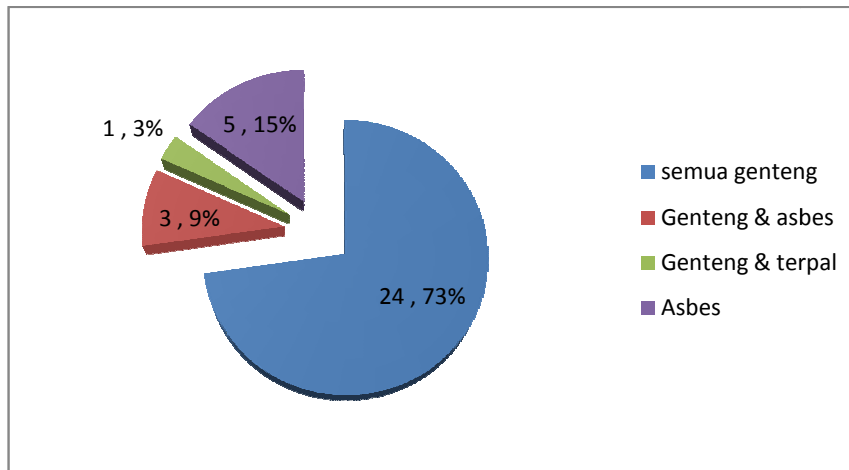


Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.13
KONSTRUKSI RUMAH BERDASARKAN JENIS DINDING

d. Jenis Atap

Jenis atap merupakan salah satu syarat rumah sehat berdasarkan keamanan konstruksi, dalam gambar berikut ini tergambarkan kondisi rumah berdasarkan jenis atapnya. Atap rumah yang terbesar jumlahnya adalah genteng yaitu 24 rumah atau 73%, sedangkan yang terkecil adalah atap genteng dan terpal yaitu 1 rumah. Penggunaan atap ini akan terkait dengan kenyamanan dalam hal berkurangnya tingkat kebocoran bila terjadi hujan.

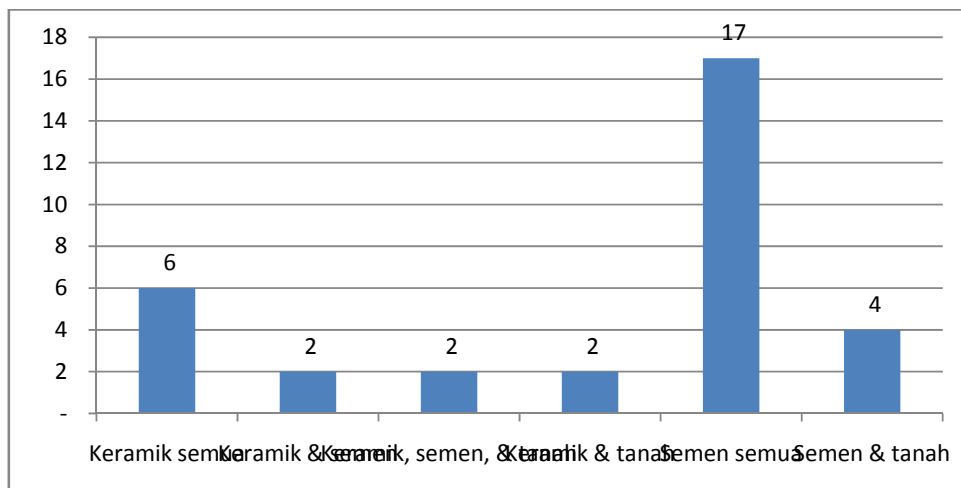


Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.14
KONSTRUKSI RUMAH BERDASARKAN JENIS ATAP

e. Jenis Lantai

Salah satu syarat kesehatan rumah ditentukan tingkat kelembabannya, dan kelembaban itu dipengaruhi jenis lantai, kecukupan udara, dan kecukupan cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, lantai rumah hasil perbaikan terdiri atas keramik di seluruh ruangan; keramik dan semen; keramik, semen, dan tanah; keramik dan tanah; semen di seluruh ruang; semen dan tanah. Diagram berikut ini menunjukkan kualitas rumah dari jenis lantai. Jumlah rumah terbesar yakni 17 rumah lantainya adalah semen di semua ruang, sedangkan 6 rumah lantai keramik. 4 rumah berlantai sebagian semen dan sebagian masih tanah.

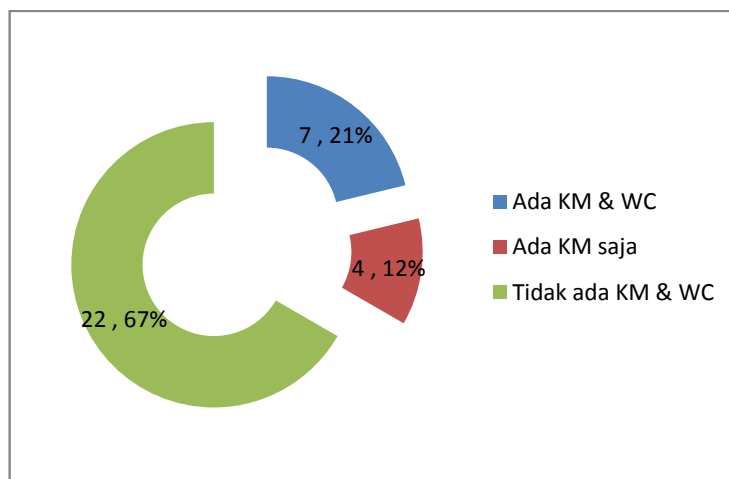


Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.15
KONDISI KESEHATAN RUMAH BERDASARKAN JENIS LANTAI

f. Ketersediaan Kamar Mandi dan Kakus

Selain kelembaban, syarat kesehatan rumah ditentukan oleh ketersediaan MCK, gambar berikut ini menjelaskan mengenai kondisi rumah-rumah hasil perbaikan rumah. 7 rumah dilengkapi kamar mandi dan kakus, 4 rumah hanya ada kamar mandi, sedang 22 rumah atau 67% ternyata masih belum dilengkapi kamar mandi dan kakus.

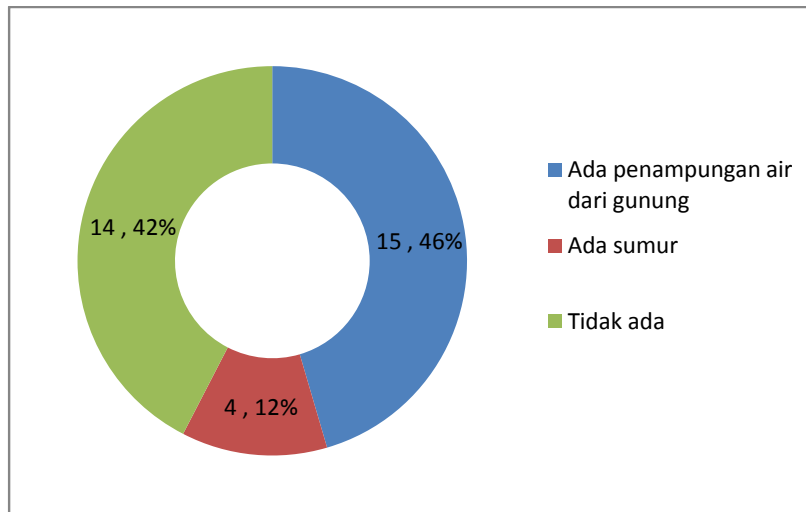


Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.16
KONDISI KESEHATAN RUMAH BERDASARKAN KETERSEDIAAN KAMAR MANDI DAN KAKUS

g. Ketersediaan Prasarana Air Bersih

Air bersih dibutuhkan manusia untuk berbagai keperluan, minum, masak, mandi, cuci dan lainnya. Ketersediaan prasarana air bersih di setiap rumah dapat memenuhi kebutuhan penghuninya. Hasil survey di lapangan diperoleh bahwa ketersediaan air bersih di lokasi penelitian dapat dibedakan menurut ketersediaan penampungan air, ketersediaan sumur, dan tidak adanya dua hal tersebut.



Sumber : Hasil survei, 2009

GAMBAR 3.17
KONDISI KESEHATAN RUMAH BERDASARKAN KETERSEDIAAN
PRASARANA AIR BERSIH

Dalam gambar di atas terlihat bahwa 15 rumah atau 46% tersedia penampungan air bersih, 4 rumah atau 12% dilengkapi sumur, dan 14 rumah atau 42% belum memiliki prasarana air bersih.

BAB IV

PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN PT. ANEKA TAMBANG TBK. DI KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Adapun tahapan yang menjadi sasaran penelitian meliputi mengkaji karakteristik CSR bidang perumahan, mengkaji karakteristik penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk., dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

4.1. Kajian Karakteristik Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.

Kajian karakteristik program CSR bidang perumahan hasil inisiasi PT. Aneka Tambang Tbk. dimaksudkan untuk membandingkan program CSR tersebut berdasarkan pada teori tentang model performa CSR dan kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat. Berdasarkan dokumen masterplan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Aneka Tambang Tbk. dan hasil wawancara dengan berbagai narasumber diperoleh beberapa informasi yang dapat dijadikan acuan dalam menilai performa CSR bidang perumahan ini. Untuk melihat performa CSR terlebih dulu ditelusuri mengenai motivasi perusahaan, pengalaman perusahaan baik positif maupun negatif, dan latar belakang pimpinan yang dalam hal ini manajer CSR PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor.

4.1.1. Analisis Karakteristik Program CSR Bidang Perumahan terhadap Model Performa CSR

Program CSR bidang perumahan oleh PT. Aneka Tambang Tbk. dirancang sebagai penjabaran dari program utama CSR bidang pelayanan kesehatan. Disamping adanya program utama CSR tersebut, Satuan Kerja

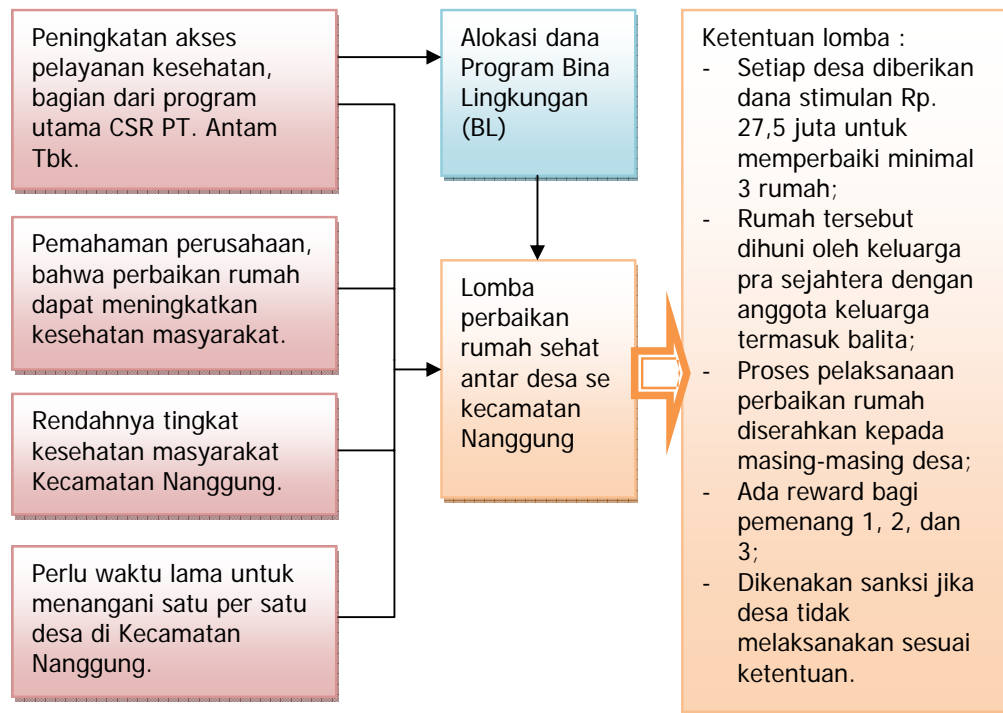
Pengembangan Masyarakat selaku pelaksana program CSR di UBPE Pongkor mengidentifikasi persoalan kesehatan masyarakat di wilayah binaan perusahaan. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan kesehatan tersebut adalah karena tidak layaknya kualitas lingkungan terdekat masyarakat yakni perumahan. Kondisi kesehatan masyarakat yang demikian tersebut menarik perhatian perusahaan dan sekaligus mendorong perusahaan untuk melakukan sesuatu bagi upaya peningkatan kualitas lingkungan. Hal ini disampaikan oleh narasumber perusahaan sebagai berikut :

“Contohnya ketika saya ke lapangan menemukan banyak sekali murtad (jemur pantat) ini indikasinya sanitasi keseluruhan ga bener. Setelah kita survei rumah-rumah, calon rumah sehat ini untuk sanitasi kelihatannya masih menjadi sesuatu yang mahal, apalagi yang masih punya kebon yang luas.” (KC/P/01/01)

Sebagai wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor, desa-desa di Kecamatan Nanggung memiliki karakteristik kualitas lingkungan perumahan yang sejenis, sehingga semua wilayah desa perlu ditangani. Mengingat di Kecamatan Nanggung terdapat 10 desa, dan bila penanganan perbaikan kualitas lingkungan perumahan dilakukan secara bergiliran, dibutuhkan waktu sepuluh tahun untuk mengatasi persoalan tersebut. Oleh karena itu upaya yang ditempuh perusahaan adalah dengan cara melakukan kegiatan secara serempak. Upaya PT. Aneka Tambang Tbk. dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tersebut direalisasikan dalam sebuah lomba perbaikan rumah antar desa se Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi bagian dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan perusahaan milik negara, sehingga pembiayaannya termasuk dalam alokasi Program BL.

Pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah melalui pola kompetisi ini selain dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hunian juga dilakukan dalam upaya mengembangkan kapasitas masyarakat di tiap desa se Kecamatan Nanggung. Setiap desa harus memperbaiki minimal 3 rumah yang dihuni oleh keluarga tidak mampu dan terdapat anggota keluarga umur balita, merupakan ketentuan dasar yang dibuat perusahaan, sedangkan bagaimana realisasi perbaikan rumah tersebut menjadi peran masing desa-desa. Pemberlakuan ketentuan dan penyediaan sejumlah dana stimulan sebagai modal desa untuk melaksanakan perannya, menggambarkan bahwa perusahaan tersebut ingin menjadikan desa

setempat sebagai partner sekaligus pelaku utama dalam peningkatan kualitas hunian masyarakat. Pemberian insentif atau reward ketika desa tersebut telah melaksanakan fungsinya secara baik merupakan upaya mendorong motivasi masing-masing desa untuk bersaing menjadi yang terbaik. Demikian halnya dengan pengenaan sanksi, upaya ini dilakukan adalah untuk mendorong setiap desa benar-benar melakukan perbaikan rumah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Hal ini tentunya menjadi bentuk pembelajaran bagi setiap desa untuk bertanggung jawab atas amanat yang diberikan perusahaan yang peduli terhadap masyarakat di wilayah binaan perusahaan tambang milik negara ini.



Sumber : hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.1
GAMBARAN PROGRAM CSR BIDANG PERUMAHAN PT. ANTAM Tbk.

Karakter atau ciri CSR bidang perumahan yang diinisiasi oleh PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor, dapat ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah motivasi perusahaan. Motivasi perusahaan merupakan harapan atau hal-hal yang ingin dicapai perusahaan baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Program CSR yang dirancang perusahaan, diakui atau tidak merupakan salah satu upaya yang tidak pernah lepas dari bisnis yang dikerjakan perusahaan, sehingga

motivasi perusahaan secara tidak langsung dapat dinilai melalui motivasi perancangan maupun penerapan CSR.

TABEL IV.1
KARAKTERISTIK PROGRAM BERDASARKAN MOTIVASI
PERUSAHAAN

Motivasi Perusahaan	Teori	Justifikasi Narasumber	Keterkaitan Motivasi Perusahaan terhadap Teori
Ekonomi	Teori instrumental digunakan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan utama berbisnis yaitu memaksimalkan profit yang menunjukkan keberpihakan terhadap pemegang saham. (Carrol dalam Henninfield, Pohl, dan Tolhurst, 2006)	<i>“Jangan pagari perusahaan dengan tembok yang tinggi tapi pagari perusahaan dengan masyarakat” jadi mereka yang ikut mengelola keamanan.” (KC/P/01/02)</i>	Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bagian investasi operasional bisnis perusahaan.
Hukum	Teori Kelembagaan menunjukkan nilai-nilai yang menciptakan stabilitas jangka panjang dan ketekunan organisasi, adaptasi lembaga sesuai waktu berdasarkan historis. Penerapan peraturan dapat membuat perusahaan beradaptasi secara lebih cepat. Teori Integratif berfokus pada pendeteksian, scanning, dan menanggapi tuntutan sosial untuk mencapai prestise, penerimaan sosial, dan legitimasi sosial. Prinsipnya adalah koordinasi dengan berbagai pelaku. (Carrol dalam Henninfield, Pohl, dan Tolhurst, 2006)	<p><i>“Yang melatarbelakangi program ini adalah adanya penjabaran program dalam CSR, sebenarnya ada lima program utama, mengembangkan program agroindustrialism, mendukung kegiatan konservasi, penguatan kemandirian institusi ekonomi lokal, peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan ibu dan anak, dan pendidikan dasar 9 tahun.” (KC/P/02/01)</i></p> <p><i>“Yang menjadi pegangan kita adalah musrenbang desa, kecamatan, kabupaten, mana-mana pengajuan masyarakat yang tidak tercover oleh pemerintah daerah, itu yang kita bicarakan, yang kedua ada program yang kita kerjakan bareng-bareng dengan pemda, LSM, lembaga-lembaga sosial.” (KC/P/01/03)</i></p> <p><i>“Kerjasama banyak, dengan adanya rencana pasca tambang, kita sinkronkan dengan Pemda, kita kan pasca tambang akan jadi wisata tambang, pemda kan buka akses jalan. Relatif hubungan dengan pemda baik.” (KC/P/01/04)</i></p>	Motivasi perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR didasarkan atas tuntutan hukum tertulis dan tidak tertulis seperti himbauan atau permintaan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Motivasi Perusahaan	Teori	Justifikasi Narasumber	Keterkaitan Motivasi Perusahaan terhadap Teori
Etika	Teori Etika didasarkan atas teori stakeholder, bahwa setiap perusahaan memiliki tanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan yakni investor, pemegang utang, karyawan, masyarakat, dan lain-lain, disamping pemegang saham. (Carrol dalam Henninfield, Pohl, dan Tolhurst, 2006)	<p><i>“Ke depannya, kalau kita lihat tambang-tambang di luar negeri kan itu begitu masuk di tambang, begitu masuk tambang, itu geliat ekonomi itu kelihatan, tapi yang di sini itu tidak kelihatan. Masih kayak gini. Ini ada tambang emas, tapi rumah masyarakat di sini masih jelek-jelek.”</i> (KC/P/01/05)</p> <p><i>“Dalam menerjemahkan peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan ibu dan anak ini, kita membidiknya adalah diawali dari diri masyarakat, kondisi lingkungannya seperti apa, sehingga dari situ kita punya gagasan bagaimana kalau untuk melakukan itu kita melakukan lomba.”</i> (KC/P/02/02)</p> <p><i>“Masyarakat sini cuma nanam padi ternak ikan, kalau sekarang tercemar, kita juga mau makan ikan juga takut. Tapi Itu sebetulnya merupakan tantangan bagi Antam untuk mengubah hal itu.”</i> (KC/P/01/06)</p>	Perusahaan merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar wilayah operasional oleh adanya aktivitas eksplorasi sumber daya. Kepedulian ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk beretika terhadap permasalahan sosial dan lingkungan (<i>people and planet</i>)
Kesukarela-an	Tataran sebuah institusi atau perusahaan telah dengan sukarela dan menempatkan diri sebagai bagian dari warga negara yang baik. (Carrol dalam Henninfield, Pohl, dan Tolhurst, 2006)	<p><i>“Ini sebetulnya, gagasan dasarnya kan di filosofi pengembangan masyarakat, dari oleh dan untuk masyarakat, untuk menuju tataran filosofi seperti itu kan tidak serta merta. Kan kita harus bangun dari sedikit-sedikit, dalam konsep lomba rumah sehat ini yang kita bidik adalah bagaimana dengan komplemen dana yang tidak banyak, tapi ada partisipasi masyarakat.”</i> (KC/P/02/03)</p>	Pengembangan masyarakat merupakan suatu proses panjang yang memerlukan komitmen dan konsistensi, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sukarela menjadi bagian dalam pengembangan masyarakat.

Sumber : hasil analisis, 2010

Pengalaman perusahaan dapat membentuk karakteristik program CSR, demikian halnya yang terjadi dalam perancangan program lomba perbaikan rumah antar desa se Kecamatan Nanggung. Melalui wawancara dengan salah satu pimpinan perusahaan tambang emas di Pongkor ini dapat diperoleh informasi mengenai pengalaman baik positif dan negatif yang dialami perusahaan.

Pengalaman perusahaan tersebut merupakan cerminan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya memperbaiki kinerja CSR perusahaan.

TABEL IV.2
KARAKTERISTIK PROGRAM BERDASARKAN PENGALAMAN
PERUSAHAAN

Pengalaman Perusahaan	Teori	Justifikasi Narasumber	Keterkaitan Pengalaman Perusahaan terhadap Teori
Positif	Komitmen perusahaan yang diimplementasikan dalam sebuah program CSR juga dipengaruhi oleh pengalaman perusahaan baik positif maupun negatif. Arena (2008)	<p><i>"Dulu ada istilah kalau orang menjual pisang dari berangkat masih mentah, sampai di pasar sudah matang karena jalannya terlalu jauh. Ada jalan kan karena ada kita. Mulai jembatan Cikaniki jalan kaki."</i> (KC/P/01/07)</p> <p><i>"SMA Negeri kita bangun trus kita bikin kerjasama dengan Yayasan Bina Insani yang masih jalan, yang dulu masuk kecamatan Nanggung sekarang masuk Kecamatan Sadeng."</i> (KC/P/01/08)</p>	<p>Pembangunan prasarana dan sarana umum bagi perkembangan wilayah di sekitar lokasi perusahaan, menjadi pengalaman yang cukup positif bagi perusahaan, sedangkan praktek penambangan liar baik yang dialami perusahaan sendiri maupun perusahaan tambang lainnya, serta penilaian negatif masyarakat terhadap perusahaan menjadi pengalaman negatif perusahaan. Informasi narasumber tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman positif merupakan hal yang ditingkatkan dan pengalaman negatif menjadi hal yang harus dihindari dan diminimalisasi dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.</p>
Negatif		<p><i>"Tantangannya sendiri, di sini itu kan, hampir semua tambang emas, itu kan diserbu dengan gurandil dimanapun itu juga ada,....."</i> (KC/P/01/09)</p> <p><i>"...kalau di timah gurandilnya sudah pakai kapal cepat. Polisi mau ngejar gurandil ya kalah..."</i> (KC/P/01/10)</p> <p><i>"Begitu sampai Leuliliang, mereka protes lagi karena ada pabrik Bantonik itu bahan kimia yang lebih relatif kalau ke badan lebih reaksinya lebih gatal..."</i> (KC/P/01/11)</p>	

Sumber : hasil analisis (2010)

Latar belakang pimpinan sebuah divisi perusahaan yang dijabarkan dalam pendidikan dan pengalaman intelektual, dapat menjadi dasar seseorang untuk secara profesional melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan atau seorang manajer CSR yang berhak menentukan inisiasi program CSR dapat

diterapkan, merupakan aktor kunci penanggung jawab program tersebut. Melihat karakteristik program CSR bidang perumahan yang dilakukan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor, tentu saja perlu melihat latar belakang pimpinan atau manajer CSR institusi tersebut.

TABEL IV.3
KARAKTERISTIK PROGRAM BERDASARKAN LATAR BELAKANG PIMPINAN

Latar Belakang Pemimpin	Teori	Justifikasi Narasumber	Keterkaitan Latar Belakang terhadap Teori
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan program CSR bidang perumahan sebagaimana perumusan program pada umumnya, sangat dipengaruhi oleh siapa pelaku/perumus dan faktor lingkungan yang melatarbelakangi pelaku tersebut. - Hanya manusia yang memiliki moral yang bertanggung jawab dalam tindakannya. - Untuk melihat moral seseorang amatlah sulit, oleh karena itu latar belakang pelaku dibatasi pada latar belakang pendidikan dan pengalaman intelektual pimpinan 	<p><i>"Saya dari ekonomi akunting, orang keuangan yang nyasar...."</i> (KC/P/01/12)</p>	<p>Latar belakang pendidikan pimpinan CSR yang tidak sesuai bidang pekerjaan, tidak mempengaruhi pekerjaan divisi CSR yang dipimpin, hal ini karena pengalaman sebelumnya di bidang yang berkaitan dengan permasalahan di tingkat masyarakat.</p>
Pengalaman Intelektual		<p><i>"....saya sebelum di Antam di kantor akuntan publik 2 tahun, sempat pegawai negeri di Departemen Koperasi 2 tahun, sempat diperbantukan dulu menangani Kotak Pos 5000 waktu wakil (Presiden) Pak Tri Sutrisno, nangani kasus-kasus di Jawa Tengah, areal kerja saya, sering bersentuhan dengan masyarakat. Kita kan dari orang kampung jadi lebih gampang diterima masyarakat."</i> (KC/P/01/13)</p>	

Sumber : Walgito (2004), Henninfield, Pohl, dan Tolhurst (2006) dan hasil wawancara (2009)

4.1.2. Pembahasan Karakteristik Program CSR Bidang Perumahan PT. Aneka Tambang Tbk.

Sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya Program CSR bidang perumahan ini merupakan turunan dari program CSR dalam mendukung kebijakan pemerintah dengan pola kompetisi perbaikan rumah antar desa. Pola semacam ini merupakan upaya perusahaan untuk mendorong tanggung jawab setiap desa dalam pemenuhan kebutuhan perumahan dan upaya peningkatan kesehatan bagi warganya. Karakteristik program CSR bidang perumahan PT.

Aneka Tambang Tbk. memang tidak secara eksplisit tertuang dalam masterplan. Dalam dokumen masterplan yang selalu dievaluasi setiap lima tahun tersebut, hanya menyebutkan lima sasaran program yang terkait dengan pengembangan masyarakat dan menjadi pedoman bagi kegiatan lebih rinci. Sasaran program yang dimaksud adalah dalam upaya mendukung program pembangunan daerah meliputi 1) pelayanan kesehatan, 2) pendidikan dasar, 3) penyediaan infrastruktur, 4) kecukupan pangan, serta 5) penguatan kapasitas kelembagaan, perlindungan budaya lokal, dan pelestarian lingkungan. Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor yang diterapkan di sepuluh desa se Kecamatan Nanggung oleh perangkat desa dan masyarakat setempat, merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Rumah merupakan salah satu sarana dan wujud kondisi fisik yang tampak dan dapat diupayakan untuk ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan lomba perbaikan rumah sehat antar desa se Kecamatan Nanggung merupakan pemahaman perusahaan tentang pentingnya sebuah rumah dalam upaya peningkatan kesehatan generasi di tingkat masyarakat. Pemahaman perusahaan tersebut diperkuat dalam hasil wawancara dengan Satuan Kerja Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor.

“Kalau untuk riset tentang dampak rumah terhadap kesehatan memang belum pernah, tapi kalau membaca literatur, kalau kesehatan itu kan didukung dari lingkungan dia yang terdekat, lingkungan terdekat yang mana ya rumahnya itu dan lingkungannya. Mudah-mudah teori ini memang benar.” (KC/P/02/04)

Carrol dalam Henninfield, Pohl, dan Tolhurst (2006) menyebutkan bahwa terdapat hirarki dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab pada tataran terendah adalah ketika perusahaan melakukan CSR hanya semata-mata demi keuntungan perusahaan contohnya bertanggung jawab atas pekerja, konsumen, dan produk. Tataran kedua adalah ketika perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab terkait dengan ijin berusaha di suatu wilayah, dan harus memenuhi regulasi yang dipersyaratkan. Tataran ketiga adalah ketika perusahaan sudah mampu menghormati keberadaan sosial dan lingkungan di luar aktivitas yang berkaitan dengan perolehan keuntungan. Tataran tertinggi adalah ketika perusahaan telah dengan sukarela dan menempatkan diri sebagai bagian

dari warga negara yang baik. Masing-masing tataran tersebut jika dilaksanakan secara keseluruhan merupakan wujud dari tanggung jawab perusahaan yang menyeluruh dan menghasilkan performa yang ideal.

Berdasarkan hasil analisis pada sub bab sebelumnya, diperoleh gambaran informasi mengenai bagaimana karakteristik CSR PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor. Berdasarkan motivasi perusahaan dalam aspek ekonomi, pengakuan manajer CSR perusahaan ini menunjukkan bahwa perusahaan memerlukan ijin berusaha dari masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan. Banyaknya penambangan liar yang dilakukan para *gurandil* menjadi permasalahan tersendiri bagi dunia pertambangan. Selain dapat membahayakan penambang, praktek tambang liar yang sewaktu-waktu dapat menerobos wilayah operasi perusahaan, menjadi persoalan hukum yang terkadang merepotkan banyak pihak. Proses pengolahan hasil penambangan liar ini tidak jarang merugikan masyarakat karena penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti sianida. Pencemaran lingkungan sering terjadi oleh karena ketidaktahuan atau kelalaian warga pengolah hasil tambang tersebut. Sudah barang tentu hal ini menjadi persoalan sosial yang tidak jarang menyebabkan dakwaan bahwa pihak perusahaan lah yang harus bertanggung jawab. Langkah yang ditempuh perusahaan adalah bagaimana memulihkan nama baik dan bagaimana menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang berbahaya ini.

“Jangan pagari perusahaan dengan tembok yang tinggi tapi pagari perusahaan dengan masyarakat” jadi mereka yang ikut mengelola keamanan.” (KC/P/01/14)

Melihat latar belakang pimpinan yang memang telah banyak menghadapi masyarakat dan tahu bagaimana memperlakukan masyarakat sebagai mitra untuk mencapai solusi, dapat mengindikasikan kemauan dan kemampuan perusahaan dalam berkomitmen terhadap CSR. Perusahaan ini memiliki komitmen dan motivasi yang beragam terhadap semua aspek motivasi yang memang harus dimiliki perusahaan dalam berbisnis. Secara ekonomi, perusahaan ini memang menunjukkan harapan dan komitmen yang tinggi terhadap pemegang saham dalam hal ini negara. Secara hukum, perusahaan ini telah menunjukkan komitmen untuk melakukan semua regulasi yang sepatutnya dilakukan perusahaan tambang,

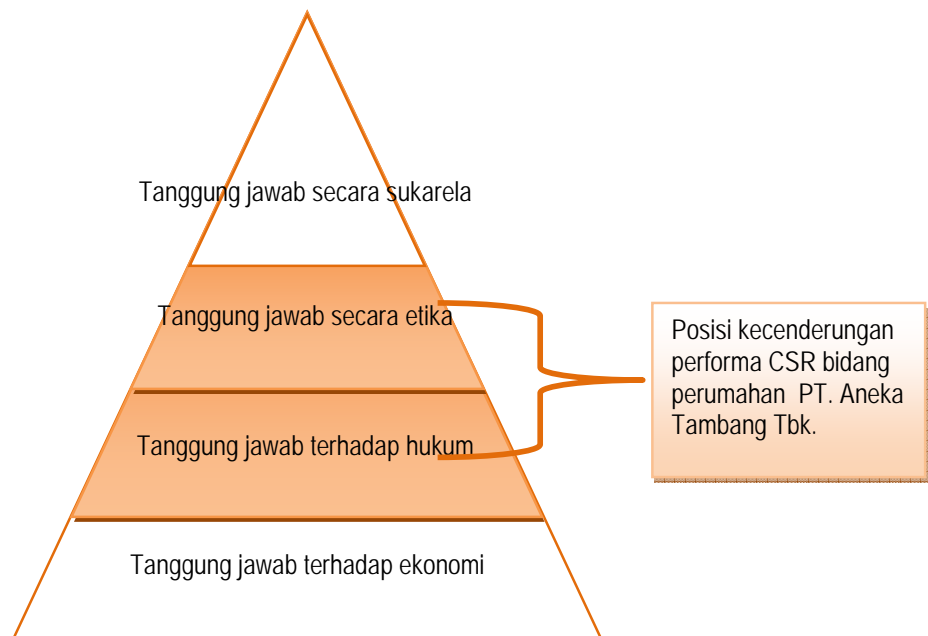
hususnya dalam mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi masa pasca tambang. Dalam hal etika, kepedulian pimpinan CSR untuk meningkatkan derajat masyarakat sekitar perusahaan karena beroperasinya perusahaan emas di wilayahnya, menjadi satu poin khusus yang patut dihargai. Kerelaan perusahaan yang barangkali sulit diukur, namun secara implisit dapat terindikasi adanya kepedulian bahwa perusahaan tambang emas milik negara ini memang berniat untuk menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa.

Dalam Tabel IV.1 tergambar bahwa narasumber sebagai pelaku CSR bidang perumahan dalam perusahaan tambang Pongkor lebih cenderung menekankan pada pentingnya menjaga hubungan dengan pemerintah daerah dan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah ini. Tabel IV.2 yang menjelaskan mengenai pengalaman perusahaan, mengindikasikan bahwa perusahaan menjadikan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pelajaran berharga untuk menentukan langkah strategis yang dapat menjaga keberlangsungan jalannya usaha sekaligus dapat membantu masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera. Dalam Tabel IV.3 diperoleh informasi tentang pengalaman intelektual pimpinan CSR di UBPE Pongkor yang telah berpengalaman menyelesaikan konflik sosial. Diadakannya lomba perbaikan rumah sehat antar desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, ini dapat dimaknai sebagai tanggung jawab sosial atau kompensasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan.

Ini ada tambang emas, tapi rumah masyarakat di sini masih jelek-jelek.
(KC/P/01/15)

Kalimat di atas merupakan pernyataan ironi sekaligus bentuk keprihatinan pelaku bisnis perusahaan tambang. Ada kata kunci yang patut disimak, yakni tambang emas – sebuah potensi yang sangat berharga, dan rumah jelek – sebuah kondisi sosial masyarakat yang menunjukkan kekurangan dan ketidakberdayaan. Dalam pernyataan itu pula dapat digambarkan sebagai bentuk kesenjangan yang sangat jauh dan memerlukan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi. Upaya tersebut akhirnya ditempuh dengan menumbuhkan tanggung jawab pihak desa untuk meningkatkan kualitas rumah-rumaharganya melalui mengadakan lomba perbaikan rumah antar desa. Melalui Program Bina Lingkungan, salah satu bidang kegiatan CSR/PKBL perusahaan

milik negara, kegiatan pengurangan kesenjangan melalui rumah ini diterapkan, sebagai bentuk etika perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen perusahaan dalam bidang perumahan bagi masyarakat miskin di wilayah binaan yang berada dalam lingkaran tambang perusahaan, merupakan perpaduan antara etika perusahaan dan penerapan peraturan yang harus dijalankan perusahaan sebagai syarat beroperasinya perusahaan. Meskipun perusahaan selalu berupaya untuk memenuhi semua hirarki performa CSRnya, namun ada kecenderungan yang mengarahkan pada dua penekanan yakni tanggung jawab secara etika dan tanggung jawab secara hukum, sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut ini.



Sumber : Carrol dalam Henningfeld, Pohl, dan Tolhurst (2006)/hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.2 **KECENDERUNGAN PERFORMA CSR PT. ANEKA TAMBANG Tbk.**

Dalam teori integratif mengajarkan perusahaan untuk berfokus pada pendeteksian permasalahan dan tuntutan sosial untuk mencapai penerimaan sosial dan legitimasi sosial. Dengan menerapkan bahwa masyarakat adalah tetangga yang baik yang dapat menjaga kegiatan tetangganya (perusahaan tambang), akan menjadi keuntungan perusahaan bukan saja dalam waktu dekat tapi menerus atau jangka panjang. Koordinasi dengan masyarakat dan para berbagai pelaku dan

mendeteksi kebutuhan masing-masing pelaku untuk selanjutnya memenuhi kebutuhan tersebut, adalah kunci jaminan “bertetangga yang baik” dapat terwujud. Demikianlah pagar tersebut telah tercipta dan siapapun yang menolak keberadaan perusahaan, akan berhadapan dengan masyarakat karena perusahaan telah menjadi bagian dari mereka. Penerapan CSR dalam bentuk lomba perbaikan rumah antar desa se Kecamatan Nanggung yang dilakukan PT. Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor yang tahun 2010 ini akan dikembangkan kembali, merupakan upaya menjaga komitmen perusahaan.

Tanggung jawab secara etika dan hukum selanjutnya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial berupa program CSR bidang perumahan yang diterapkan di wilayah binaan perusahaan. Bentuk program CSR bidang perumahan melalui lomba perbaikan rumah antar desa, bila dicermati lebih lanjut, menggambarkan bahwa perusahaan mencoba untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Upaya tersebut sekaligus dilakukan melalui pengembangan kapasitas masyarakat desa dengan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam penanggulangan permasalahan yang ada.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik program CSR bidang perumahan yang dirancang oleh PT. Aneka Tambang Tbk. terbentuk dalam dua aspek yakni performa tanggung jawab sosial dan bentuk tanggung jawab sosial. Dilihat dari aspek performa tanggung jawab sosial, perusahaan ini cenderung menekankan pada upaya melakukan tanggung jawab secara etika dan hukum. Aspek bentuk tanggung jawab sosial, perusahaan melakukan tanggung jawab dalam bentuk pengembangan masyarakat untuk menciptakan kemandirian.

4.2. Kajian Karakteristik dan Tipologi Penerapan CSR Bidang perumahan di Wilayah Binaan PT. Aneka Tambang Tbk.

Karakteristik dan tipologi penerapan CSR bidang perumahan di wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. sesuai dengan tujuan penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni kondisi penerima bantuan, kelembagaan, dan proses pelaksanaan perbaikan rumah. Masing-masing aspek tersebut dibahas dalam kajian berikut menggunakan alat analisis distribusi frekuensi.

4.2.1. Analisis Karakteristik Penerapan CSR Bidang Perumahan dari Sisi Kondisi Masyarakat Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Karakteristik dari aspek kondisi penerima bantuan dapat dijabarkan dalam beberapa sub aspek meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan fisik setiap penerima bantuan. Kondisi sosial diuraikan dalam informasi umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga dan lama tinggal. Kondisi ekonomi diuraikan dalam informasi tingkat pendapatan dan kemampuan menabung. Sedangkan fisik diuraikan dalam luas dan status tanah, kondisi fisik rumah, yang terdiri atas luas rumah, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, ketersediaan MCK, dan air bersih.

a. Karakteristik Sosial Penerima Bantuan

Kondisi sosial penerima bantuan perbaikan rumah dapat memberikan gambaran tentang karakteristik penerapan CSR bidang perumahan dari sisi sosial penerima bantuan. Dihampir semua desa, dalam menentukan penerima bantuan didasarkan atas kondisi sosial yang rawan mandiri, artinya masyarakat tersebut memiliki keterbatasan dalam menghuni rumah layak secara sosial.

Tingkat usia sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.3 dapat menunjukkan bahwa 27% penerima bantuan berusia di atas 60 tahun, usia yang tidak lagi produktif. Tingkat usia ini sangat terkait erat dengan jenis pekerjaan masyarakat, usia lanjut yang demikian itu cenderung sudah tidak mampu bekerja sehingga keluarganya tidak memiliki penghasilan. Beberapa desa yang memilih penerima bantuan dengan sebagian besar kondisi demikian antara lain adalah Desa Malasari, Desa Nanggung, Pangkal Jaya, dan Parakan Muncang.

Selain tingkat usia, rawan kemandirian masyarakat juga ditunjukkan dari tingkat pendidikan penerima bantuan yang cukup rendah. Gambar 3.4 menunjukkan bahwa 33% penerima tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, 27% tidak tamat sekolah dasar, dan 37% tamat SD. Semakin rendah tingkat pendidikan, semakin rawan untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Tingkat pendidikan yang demikian terdapat di hampir semua desa.

Rawan kemandirian juga tergambar dari jenis pekerjaan yang hanya memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan terbatas. Gambar 3.5

menunjukkan 58% penerima bantuan bekerja sebagai buruh. Pekerjaan sebagai buruh menggambarkan tingkat pendapatan yang rendah, kondisi ini terdapat di hampir semua desa.

Gambaran tentang rawannya kemandirian masyarakat dalam menjangkau rumah layak huni juga dapat dilihat berdasarkan jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga yang menghuni rumah tersebut jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi keluarga, menggambarkan jumlah tanggungan keluarga, sedangkan jika dikaitkan dengan ukuran rumah akan menggambarkan kepadatan rumah atau kecukupan luas ruang. Berdasarkan Gambar 3.6 dapat dilihat 18% penerima bantuan memiliki anggota keluarga 7-9 orang, jika penghasilan keluarga cukup terbatas. Jumlah tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan jika luas rumah juga terbatas. Desa-desa yang memiliki kondisi sosial demikian antara lain adalah Desa Bantar Karet, Pangkal Jaya, Kalong Liud, Parakan Muncang, dan Hambaro.

b. Karakteristik Ekonomi Penerima Bantuan

Karakteristik ekonomi penerima bantuan dapat digambarkan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat dan kemampuan menabung. Berdasarkan Gambar 3.8 dapat dilihat bahwa 18% penerima bantuan tidak memiliki penghasilan karena sudah tidak bekerja, 61% berpenghasilan sampai dengan Rp. 20.000 per hari, dan sisanya 21% berpenghasilan antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 50.000. Kondisi tersebut terjadi di hampir semua desa penelitian.

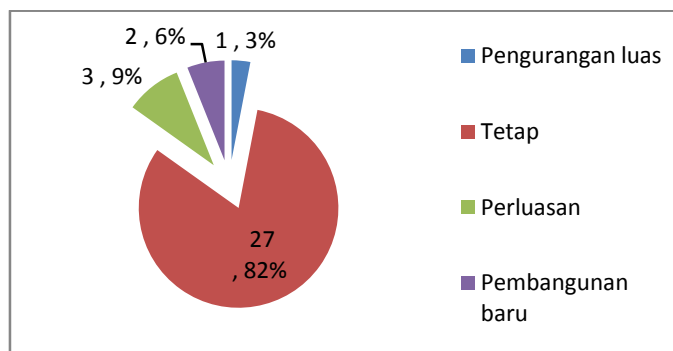
Karakteristik ekonomi masyarakat penerima bantuan juga dapat digambarkan atas kemampuan menabung suatu keluarga, sebagaimana dalam Gambar 3.9. Sejumlah 88% penerima bantuan tidak mampu menabung akibat penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 12% penerima bantuan yang mampu menyisihkan penghasilannya untuk disimpan, itupun hanya kadangkala dan dalam jumlah yang sangat terbatas. Cara penyimpanan uang tabungan antara lain dengan menabung pada sekolah anak, karena nantinya juga digunakan untuk keperluan sekolah anak.

Berdasarkan hasil analisis karakteristik ekonomi, tergambar bahwa hampir seluruh penerima bantuan tergolong warga yang rawan kemandirian. Untuk itu penerapan CSR bidang perumahan ini mencoba untuk membantu agar masyarakat yang rawan mandiri ini dapat menjangkau rumah yang layak huni.

c. Karakteristik Fisik Rumah Hasil Perbaikan

Rumah yang diperbaiki atau dibangun melalui lomba perbaikan rumah sehat yang diinisiasi oleh PT. Aneka Tambang Tbk. berjumlah 43 rumah yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Nanggung, namun dalam melakukan analisis jumlah responden dipilih 33 keluarga atau rumah. Perbaikan rumah merupakan upaya meningkatkan kondisi rumah tersebut didasarkan atas luasan ruang, jenis lantai, dinding, atap, keberadaan kamar mandi dan kakus, dan air bersih. Dalam analisis mengenai kondisi rumah hasil lomba perbaikan rumah antar desa menggunakan standar atau kriteria rumah sehat layak huni berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (2008). Ada tiga kriteria utama yang akan menjadi topik pembahasan yakni 1) Kecukupan luas ruang, 2) Kelayakan teknis bangunan, dan 3) Pemenuhan syarat kesehatan bagi penghuni.

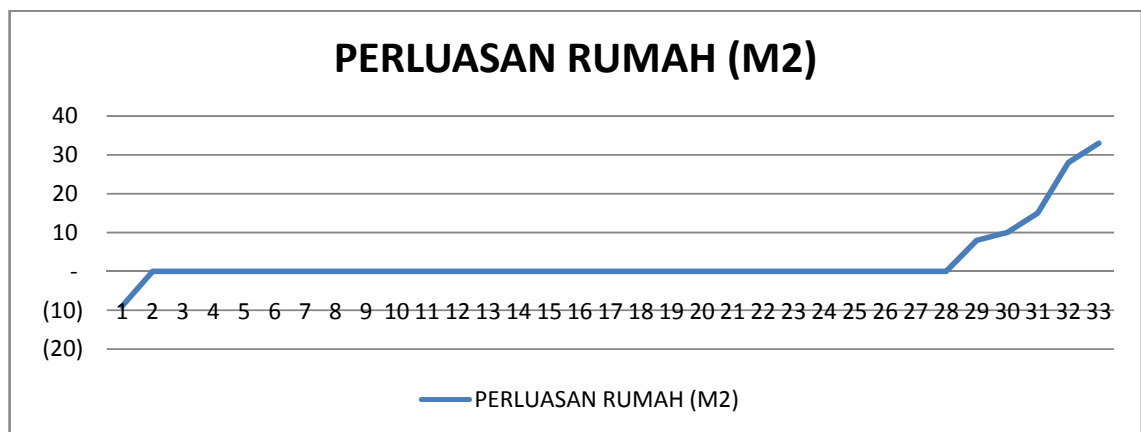
Perbaikan rumah yang dilakukan di setiap desa mempunyai karakter yang berbeda demikian halnya antar rumah pun tidak selamanya sama. Perbaikan rumah dikaitkan dengan luasan rumah menurut Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya (2007), dapat diartikan sebagai perbaikan dengan mengubah luasan rumah atau tidak. Dalam perbaikan rumah di 10 desa Kecamatan Nanggung ditemukan informasi, terjadi tiga tipe pengubahan luas rumah dan pembangunan baru. Sebagaimana tergambar dalam gambar berikut bahwa terdapat 27 rumah yang tidak mengalami perubahan luas atau luas rumahnya tetap, 3 rumah mengalami perluasan, dan 1 rumah justru mengalami pengurangan luas, serta 2 rumah bukan perbaikan, melainkan pembangunan baru.



Sumber : Hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.3
JUMLAH RUMAH BERDASARKAN PERLUASAN RUANG

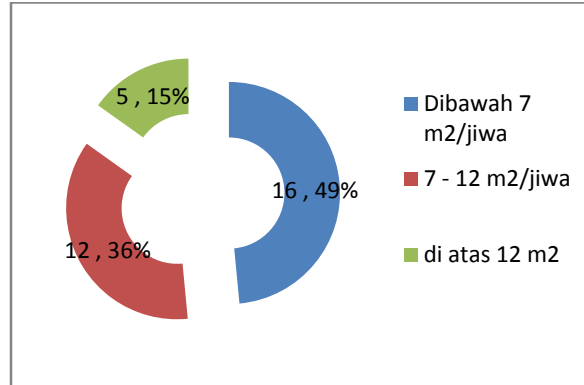
Gambar diatas dapat dijelas lebih detil dalam penjelasan tentang besaran luasan sebagaimana dalam gambar berikut ini. Penambahan luas itu sendiri mulai dari 8 m² hingga 33 m², namun apabila dikaitkan dengan jenis pembangunan apakah baru atau perbaikan, penambahan luasa rumah dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama perluasan hasil perbaikan rumah yang terjadi pada 3 rumah, masing-masing mengalami perluasan 8 m², 10 m², dan 15 m². Dan yang kedua penambahan luas rumah oleh karena pembangunan baru di 2 rumah dengan luasan 28 m² dan 33 m². Kasus menarik adalah terjadinya penurunan luas rumah di satu rumah hingga 9 m².



Sumber : Hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.4
PERLUASAN RUMAH

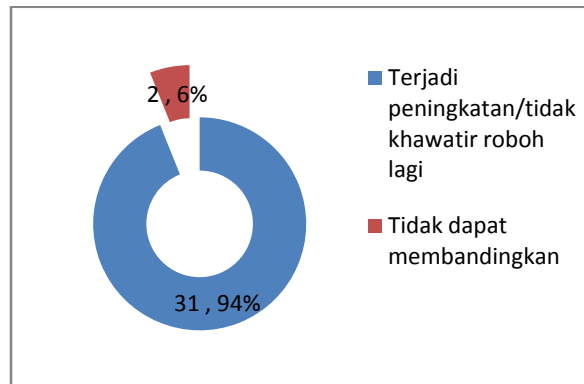
Pemenuhan kebutuhan luas ruang dapat dihitung melalui luasan rumah dibagi jumlah penghuni, berdasarkan informasi itu akan diketahui seberapa layak rumah tersebut. Kriteria rumah sehat berdasarkan kecukupan ruang berdasarkan SPM Perumahan Rakyat adalah 7,2 m², standar ini yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya. Berdasarkan hasil survei di lapangan ditemukan bahwa 16 rumah atau 49% tidak memenuhi kecukupan ruang, karena setiap penghuni hanya memperoleh ruang di rumahnya tidak sampai 7 m². 12 rumah atau 36% telah memenuhi standar kecukupan luas ruangan yakni antara 7–12 m² per penghuni, sedang 5 rumah atau 15% telah memenuhi lebih dari cukup karena setiap penghuni memperoleh ruang gerak yang cukup leluasa di atas 12 m².



Sumber : Hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.5
KECUKUPAN LUAS RUMAH

Dari hasil perbaikan rumah yang dilakukan di 10 desa, dan melalui 33 responden, ditanyakan pendapatnya mengenai kenyamanan rumahnya. Hal yang dilihat adalah tentang kekhawatiran penghuni terhadap rumahnya setelah rumahnya diperbaiki. 94% atau 31 penghuni menjawab tidak lagi khawatir rumahnya rubuh karena konstruksi bangunannya jauh lebih kuat dari sebelum diperbaiki. Sedang 2 penghuni lainnya menjawab bisa membandingkan karena ini adalah rumah baru bagi mereka.

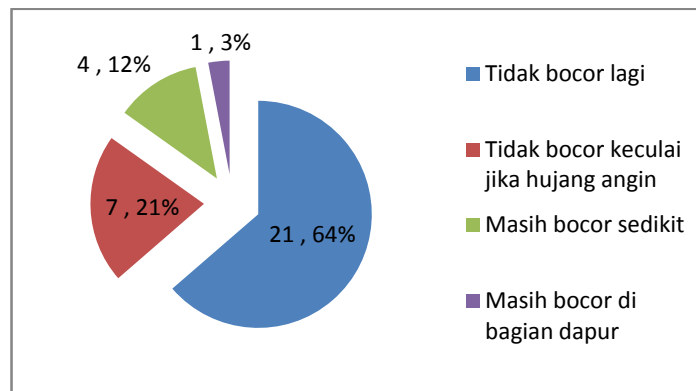


Sumber : Hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.6
PENINGKATAN KENYAMANAN BERDASARKAN KONSTRUKSI DINDING

Terjadinya kebocoran atau ketidaknyamanan penghuni dapat digambarkan dalam diagram berikut. Berdasarkan hasil angket terhadap para

penghuni di 33 rumah hasil pembangunan di desa-desa Kecamatan Nanggung diperoleh bahwa 21 rumah atau 64% sudah tidak bocor lagi. 7 rumah masih bocor jika terjadi hujan angin, dan 4 rumah mengalami kebocoran sedikit ketika hujan lebat tanpa angin. 1 rumah masih mengalami kebocoran di bagian dapur rumah, hal ini terkait dengan jenis atap yang digunakan, jika dikaitkan dengan gambar sebelumnya bahwa ada satu rumah yang menggunakan atap genteng dan terpal, barangkali ini yang menyebabkan rumah ini masih bocor.



Sumber : Hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.7

PENINGKATAN KENYAMANAN BERDASARKAN KONSTRUKSI ATAP

4.2.2. Analisis Karakteristik Penerapan CSR Bidang Perumahan dari Sisi Kelembagaan Perbaikan Rumah

Dari sisi kelembagaan perbaikan rumah sehat ini dapat dijelaskan dalam dua hal yaitu siapa saja yang terlibat dan bagaimana aturan mainnya. Pelaksanaan perbaikan rumah sehat sebagaimana digambarkan dalam bab sebelumnya, mengindikasikan ada kesamaan pola dalam pengelolaan perbaikan rumah ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan rumah sehat ini adalah kepala desa, perangkat desa, RW, RT, penerima bantuan, dan masyarakat sekitar. Kepala desa bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan rumah sesuai waktu dan kriteria yang ditentukan. Perangkat desa, RW, dan RT, sesuai dengan penunjukkan oleh kepala desa, melakukan pengelolaan terhadap dana perbaikan rumah, mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah seperti menyediakan bahan bangunan, tukang dan lain-lain. Penerima bantuan

mendukung pembangunan secara swadaya seperti biaya, konsumsi, bahan bangunan, ataupun tenaga. Namun untuk warga miskin swadaya dalam hal pembiayaan, dan konsumsi cukup sulit dipenuhi, sehingga yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan bahan bangunan yang masih bisa digunakan dan membantu pembangunan rumah dalam bentuk tenaga.

4.2.3. Analisis Karakteristik Penerapan CSR Bidang Perumahan dari Sisi Proses Pelaksanaan Perbaikan Rumah

Dari sisi proses pelaksanaan perbaikan rumah sehat dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang ditempuh setiap desa untuk menyelesaikan kompetisi. Proses yang ditempuh setiap desa secara garis besar meliputi sosialisasi, pemilihan calon penerima, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan. Mekanisme yang ditetapkan pihak pemberi stimulan dana cukup sederhana yakni adanya usulan calon penerima bantuan yang sesuai dengan kriteria dan jumlah minimal rumah yang harus dibangun. Setelah usulan dari setiap desa disetujui pihak perusahaan, secara bersamaan dilakukan pencairan dana sebesar Rp. 27,5 juta untuk setiap desa, sehingga pembangunan rumah dapat dimulai secara bersamaan sesuai tenggat waktu yang dipersyaratkan yakni 2 minggu atau 14 hari.

Setelah memperoleh informasi tentang adanya lomba perbaikan rumah, setiap kepala desa mencoba menyosialisasikan kepada para tokoh masyarakat dalam hal ini RT atau RW setempat untuk bersama-sama menentukan calon penerima bantuan perbaikan rumah. Dalam proses sosialisasi ini ditemukan kesamaan pola di masing-masing desa, yakni dilakukan secara terbatas pada perangkat desa atau tokoh masyarakat. Hal ini barangkali dimaksudkan agar tidak terjadi gejolak di tingkat masyarakat, pertama karena jumlah rumah yang akan diperbaiki hanya 3 rumah, kedua karena waktu yang sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk mengajak masyarakat luas berembuk. Masing-masing desa perlu mengatur strategi agar dapat menyelesaikan perbaikan rumah sesuai ketentuan, sosialisasi dengan beberapa orang yang tahu kondisiarganya juga dapat membantu kepala desa untuk menentukan langkah-langkah strategis termasuk kepanitiaan pengelola.

Dalam pemilihan calon penerima bantuan perbaikan rumah, kepala desa dibantu panitia yang terdiri atas perangkat desa atau tokoh masyarakat, memilih berdasarkan kondisi rumah warga miskin yang tidak layak huni atau hampir roboh. Hampir semua desa menjadikan kondisi rumah semacam itu sebagai kriteria pemilihan calon penerima bantuan, namun itu bukan satu-satunya karena jumlah ada 3 rumah yang akan diperbaiki. Desa Bantar Karet dan Desa Cisarua memilih masing-masing 1 keluarga yang belum punya rumah dan masih menumpang di rumah kerabat. Desa yang mengalami kesulitan dalam proses ini adalah Desa Kalong Liud, dikarenakan ada salah satu keluarga yang akan diusulkan ternyata menuntut yang lebih dari sekedar rumah sederhana, setelah dirembug bersama panitia lainnya akhirnya berhasil ditentukan calon baru sesuai kriteria. Desa lainnya yang mengalami hal sama adalah Desa Cisarua, kepala desa diprotes warga yang salah satu tetangganya akan diperbaiki rumahnya. Penyelesaian kasus ini melalui rembug warga di kampung tersebut, dan diperoleh kesepakatan bahwa bantuan terhadap satu rumah di kampung ini akan dibagi di setiap rumah di kampung tersebut. Permasalahan pemilihan calon penerima bantuan hanya dialami 2 desa, sedang 8 lainnya tidak mengalami permasalahan. Proses pemilihan ini selanjutnya diusulkan kepada perusahaan untuk divalidasi.

Setelah proses validasi, pencairan dana dilakukan, dan masing-masing desa melalui kepanitian yang dibentuk tersebut bekerja mengelola dan mengkoordinasikan pembangunan rumah di setiap lokasi yang disepakati bersama. Semua desa melakukan hal yang sama, yakni dalam pengelolaan dana stimulan perbaikan rumah dilakukan oleh panitia, bukan diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan. Penerima bantuan cukup diberi tahu bahwa rumahnya yang tidak layak akan diperbaiki melalui dana bantuan dari perusahaan tambang, kecuali di Desa Sukaluyu, karena salah satu penerima bantuan dalam waktu yang tidak terlalu lama dari waktu pengusulan, terpilih sebagai ketua RW. Kebutuhan bahan bangunan telah dihitung oleh panitia dan dibelanjakan sesuai perhitungan tersebut. Dalam pembangunan rumah, di 9 desa kecuali Desa Nanggung, memiliki pola pembangunan yang sama. Masing-masing rumah dibangun secara serentak dengan penanggung jawab perangkat RT atau RW, pelaksana tukang yang terdiri atas 2 orang, dan dibantu warga masyarakat. Di

Desa Nanggung, oleh karena penanggung jawabnya ketua RW dan lokasinya hanya di RW tersebut, pembangunan 4 rumah dilakukan secara bergiliran dalam waktu 14 hari. Pelaksananya 2 tukang dibantu penerima bantuan dan perangkat desa, hal ini dikarenakan budaya gotong-royong di Kampung Banar mulai luntur. Gotong-royong yang agak sulit ini juga dialami di Desa Parakan Muncang tepatnya di Kampung Pasir Gintung dan Kampung Lukut. Bentuk pembangunan rumah dapat dibedakan menjadi 3 tipe yaitu 1) perbaikan rumah, 2) perbaikan dengan pembongkaran struktur rumah di lokasi lama, 3) pembangunan baru untuk menggantikan rumah lama dengan lokasi di sekitar rumah lama, dan 4) pembangunan rumah baru di lokasi baru. Yang termasuk di kategori 1) rumah-rumah di Kampung Sukamanah, Desa Cisarua. Kategori 4) di Desa Bantar Karet dan Desa Cisarua. Kategori 3) di Kampung Pasir Gintung dan Pekapuran Desa Parakan Muncang, Kampung Jangkar Desa Cisarua. Rumah-rumah selain yang disebutkan tersebut termasuk dalam kategori 2).

Dalam hal pemeliharaan hasil pembangunan, semua desa menyerahkan kepada penghuni atau penerima bantuan. Perangkat desa menyampaikan kepada masyarakat penerima bantuan bahwa sifat bantuan hanya cukup sampai di sini, seterusnya menjadi tanggung jawab sendiri, sebagaimana pernyataan berikut.

“.....ya wajar kalau dia setelah kita habis dengan anggaran sekian, dia betulkan sendiri itu wajar layak gitu, misalkan dia kekurangan semen lagi se sak sak buat plester samping rumah setelah kita ambil finishnya sampai disini pak ini uang, wajar kalau dia beli sendiri se sak dua sak mah.” (KP/D07/01/01)

4.2.4. Pembahasan Karakteristik dan Tipologi Penerapan CSR Bidang Perumahan

Berdasarkan analisis terhadap kondisi penerima bantuan perbaikan rumah, kelembagaan dalam pelaksanaan lomba perbaikan rumah, dan proses pelaksanaan perbaikan rumah di masing-masing desa, telah telah tergambarkan bahwa setiap desa menerapkan CSR PT. Aneka Tambang Tbk. dengan cara masing-masing. Meskipun berbeda-beda dalam penerapan tersebut, namun ada beberapa hal yang menunjukkan kecenderungan kesamaan yang dapat dicatat. Pembahasan tipologi penerapan CSR bidang perumahan akan diawali dengan pembahasan kondisi rumah hasil pembangunan di 10 desa se Kecamatan

Nanggung. Kondisi rumah ini merupakan output dari proses pembangunan yang diterapkan oleh pelaku di tingkat desa. Keterlibatan pengelola dalam penentuan aturan main/mekanisme pembangunan serta proses pelaksanaan, disamping kondisi masyarakat selaku penerima bantuan, inilah yang menjadi input dalam proses pembangunan sehingga menghasilkan 43 produk rumah.

“Dari dia, dari dia mah boro-boro, rokok saja saya, kasian, beras aja ya, saya keliling seikhlasnya, di sini mah alhamdulillah, gotong-royong masih bagus.” (KP/D08/01/01)

“Kagak punya rumah anaknya banyak, trus ama bapak dibangun di sini.” (KP/D05/02/01)

“Biasanya hujan angin kita ngabur di sana di masjid.” (KP/M07/02/01)

“Bukan bocor2 lagi pada banjir. Begini nih (sambil mengacungkan tangan yang dimiringkan) sudah miring.” (KP/M09/02/01)

Bila diperhatikan kondisi masyarakat yang dibantu, rata-rata merupakan masyarakat yang memiliki sumber daya yang rendah dalam memenuhi kebutuhan papan secara layak. Kualitas rumah yang tidak layak, dan keluarga yang masih menumpang di rumah kerabat, menunjukkan adanya kebutuhan pembangunan rumah yang bukan dilakukan oleh pemilik atau penghuni sendiri. Program perbaikan rumah sehat yang dicanangkan PT. Aneka Tambang Tbk. di seluruh desa Kecamatan Nanggung merupakan bentuk intervensi sekaligus tantangan bagi setiap perangkat desa untuk dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan kegiatan dibatasi oleh waktu dan kriteria mengikat yang perlu dipatuhi oleh adanya reward dan ancaman sanksi bila produk yang dihasilkan tidak sesuai syarat. Meskipun reward dan sanksi bukan menjadi perhatian khusus dalam penerapan program ini, namun cukup mendorong setiap desa bergerak dan melakukan tugasnya secara baik. Keleluasaan pengelolaan yang diberikan pemberi dana stimulan, merupakan salah satu pendorong munculnya nilai-nilai lokal patut dihargai.

“.....diantara RT mana yang mampu atau siap untuk membantu swadaya karena dana tidak mencukupi. Akhirnya ada 3 orang yang sanggup jadi saya kasih ke orang yang 3 gitu.” (KP/D02/01/01)

“.....tapi itulah keadaan di masyarakat suka cemburu sosial padahal program kan cuma tiga kan satu desa.” (KP/K/01/01)

Melalui keleluasaan inilah, perangkat desa yang dipimpin langsung oleh masing-masing kepala desa melakukan tugasnya membangun rumah untuk masyarakat dengan segala kemampuan manajerial dan sumber daya lainnya. Pemilihan tim yang solid yang dapat mendukung kepala desa untuk menjalankan kegiatan merupakan hal strategis yang bukan sekedar membagi-bagi pekerjaan. Tujuan pelaksanaan kegiatan sudah jelas, dan inilah yang disampaikan kepada tim yang terdiri atas perangkat desa yang mampu mempertanggungjawabkan kerja dan dedikasinya. Aturan main dalam pelaksanaan pembangunan rumah ditentukan dan disepakati bersama untuk selanjutnya dijalankan dan diawasi. Masing-masing desa memang memiliki keleluasaan, namun dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, hampir seluruhnya dilakukan secara terbatas, agar tidak menimbulkan gejolak. Masyarakat penerima bantuan pun ditentukan berdasarkan penilaian tim perangkat desa yang biasanya telah mengantongi nama-nama warganya yang memenuhi kriteria untuk dibantu. Proses ini, di beberapa desa mengalami kendala oleh adanya penolakan warga calon terpilih maupun protes masyarakat yang merasa cemburu karena merasa senasib dan perlu memperoleh perhatian. Hampir semua desa menerapkan pendekatan kekeluargaan dengan menyampaikan bahwa masyarakat yang protes itu pun telah diusulkan untuk dibantu, namun belum dalam waktu itu, karena bantuan yang turun cukup terbatas dan menuntut pihak perangkat desa secara ketat menentukan prioritas.

“Kalau yang ini Uus, karena dia aparatnya, kalau di tempat lain RT RW. Dia kan RWnya, dibantu sama RTnya, kebetulan RTnya punya kayu.” (KP/D10/01/01)

“Kita rinci semua, pembelanjannya dirinci, dirinci ma kita, misalkan butuh kayu berapa, kita belikan, butuh semen berapa, bata berapa, triplek berapa. Tidak kita itukan, kita uangnya kan transparan, terbuka, karena anggaran cuman segini. Ya udah ya sisanya beli-beli rokok gotong-royong gitu kan, beli sebungkus dua bungkus.” (KP/D07/01/02)

Penunjukkan penerima bantuan dari setiap Kepala Desa dapat diartikan sebagai ijin mendirikan bangunan sekaligus sarana memperoleh bantuan perbaikan rumah. Namun demikian ijin yang praktis hanya berlaku di kota-kota memang seakan tidak pernah masuk dalam proses pembangunan sebagaimana yang direncanakan oleh perangkat desa bersama jajarannya. Dalam proses pelaksanaan pembangunan diperlukan berbagai macam keperluan pembangunan

baik bahan bangunan, tenaga tukang, tenaga kerja lain yang membantu, dan konsumsi untuk bagi pekerja. Pengelola kegiatan dalam proses pembangunan ini mulai mulai mendayakan semua sumber daya yang ada agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Bagi penerima bantuan yang mampu, didorong kebutuhan memiliki rumah yang lebih layak, akan berusaha untuk memberikan dayanya sesuai kemampuan baik materi maupun tenaga. Sedangkan bagi penerima bantuan yang tidak mampu, cukup dengan tenaga yang masih dapat didayagunakan.

“Yang bantuin juga banyak, tetangga-tetangga tuh banyak, satu RT. Nggak dikasih upah, nggak, cuman makan aja.” (KP/M05/01/01)

“Sebelah sini tanahnya punya neneknya sebagian punya Pak Mastur, harus dibeli. Belum bisa dibayar.” (KP/D05/02/02)

“Kadang-kadang ya kalau anggaran sebenarnya lebih dari sekian, lebih dari yang dikerjakan (diberikan) Antam. Kita juga rogoh kantong sendiri dari desa buat beli-beli kopi, yang jelas yang punya rumah tuh tidak dibebankan.....” (KP/D07/01/03)

“Bahkan swadaya masyarakat kita catat lebih besar, jika diprosentasekan bahkan 70% swadaya.” (KP/D10/01/02)

Pelaksanaan pembangunan rumah memerlukan banyak tenaga, selain tukang diperlukan tenaga tambahan yang dapat membantu terselesaikannya kegiatan ini dalam waktu sesegera mungkin. Biasanya di perdesaan, kegiatan ini akan menarik adanya gotong-royong masyarakat, oleh karena sifat masyarakat yang masih *guyub*. Namun beberapa wilayah di Desa Nanggung dan Desa Parakan Muncang, keguyuban ini terasa mahal dan sulit diperoleh. Di Parakan Muncang, kondisi ini terjadi karena sifat wilayahnya di sepanjang jalur utama kecamatan dan banyak penduduk pendatang, sehingga kepala desa mengaku agak kesulitan menggerakkan masyarakatnya untuk melakukan kegiatan yang cukup posotif ini. Di Nanggung lain lagi, kondisi demikian bukan karena banyaknya penduduk pendatang, melainkan setiap masyarakat mulai berpikir praktis untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena dengan ikut bergotong-royong berarti tidak memperoleh penghasilan pada hari itu, dan kebutuhan keluarga tak dapat dipenuhi. Terlepas dari berbagai permasalahan sosial di tingkat masyarakat, melalui swadaya masyarakat telah terlihat sumber daya lokal yang cukup

membanggakan. Desa Sukaluyu bahkan mencatat sumber daya pembangunan rumah di desanya mencapai 70%.

Desain awal program rumah sehat oleh Antam adalah perbaikan rumah, namun dalam perjalanannya melalui keleluasaan yang diberikan, bukan perbaikan rumah yang dilakukan. Bagi keluarga yang tidak memiliki rumah dan termasuk kategori tidak mampu sebagaimana ketentuan dari pihak pemberi dana, dilakukan pembangunan rumah baru, yang nilainya barangkali tak tercukupi oleh dana stimulan. Pengembangan ini merupakan inovasi yang muncul dari kebutuhan warga dan pengolahan strategi penerapan program CSR bidang perumahan.

“Tidur? Nggak, nggak muat, ini pada di teras ini tengah.”
(KP/M05/01/02)

“Ini aja di selokan, ini ketahuan airnya. Ga ada WC, sumur aja.”
(KP/M07/01/01)

“Permasalahan pasti ada aja, tinggal tergantung pada kemauan kepala desa, karena uang itu cair kan ke kepala desa. Kepala desa yang nanti jadi pelaksana di lapangan. Kalau kepala desa yang bener-bener pengen memperhatikan masyarakat desanya ya pasti dibangun, emang suka aja ada kepala desa yang nakal gitu.” (KP/K/01/02)

Hasil dari pendayagunaan semua potensi yang ada adalah 43 rumah yang siap dihuni oleh pemiliknya dengan berbagai kualitas bangunan. Sebagian besar menyatakan bahwa dengan digantinya konstruksi bangunan meskipun beberapa bagian bahan lama dipergunakan lagi, membuat kekhawatiran terhadap kerubuhan bangunan rumahnya mulai menghilang. Penggantian atap rumah dari rumbia atau anyaman daun kelapa dengan genteng atau asbes atau perpaduan dari bahan-bahan itu, membuat tingkat kebocoran jika terjadi hujan, agak mereda. Meskipun demikian, oleh karena penggunaan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti terpal yang dipasang untuk atap, menyebabkan rumah tetap bocor, kondisi inilah yang terjadi di Desa Hambaro rumah Ibu Yuyun. Pembangunan yang tergesa oleh karena ketersediaan tukang yang terbatas sementara 4 rumah yang harus diselesaikan dalam waktu 14 hari, menjadikan pemasangan genteng juga tidak sempurna, sehingga rumah Bapak Emog di Kampung Banar Desa Nanggung tetap bocor ketika hujan. Pemahaman setiap desa terhadap rumah sehat sangat beragam dan ini menjadi catatan yang perlu

perhatian. Syarat kecukupan ruang bagi penghuni, kelayakan teknis konstruksi rumah, dan syarat kesehatan bangunan, masih dipahami secara berbeda. Beberapa desa seperti Malasari, Cisarua (di dua rumah, karena Kampung Sukamanah adalah kasus khusus) telah menerapkan standar rumah sehat dengan membangun kamar mandi dan WC untuk penghuninya. Perhatian terhadap ketersediaan MCK ini belum diberikan oleh perangkat desa lainnya. Dalam hal kecukupan luas ruang, sepertinya setiap desa belum bisa berbuat banyak, karena masih ada 49% penerima bantuan yang tinggal dalam ruang gerak dalam ruang seluas di bawah 7 m² per jiwa. Beberapa rumah memang tidak agak sulit untuk dikembangkan atau diperluas oleh terbatasnya tanah yang dikuasai penghuni, namun ada beberapa keluarga yang menguasai tanah dan memungkinkan untuk ditambah luasnya. Hal yang perlu memperoleh catatan adalah adanya rumahnya yang dikurangi luasnya dari 36 m² menjadi 27 m² padahal luas tanahnya cukup yaitu 80 m², lagi-lagi oleh alasan keterbatasan dana yang tersedia. Penerapan CSR diharapkan dapat membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Oleh karena itu komitmen yang telah dibangun di awal pencanangan program ini perlu dikawal agar tidak terjadi hal-hal yang justru merusak komitmen terpuji perusahaan.

Penerapan CSR bidang perumahan di setiap desa Kecamatan Nanggung memiliki karakteristik sesuai dengan variabel-variabel yang dibahas sebelumnya. Karakteristik penerapan CSR bidang perumahan di dasarkan atas kondisi penerima bantuan perbaikan rumah, kelembagaan perbaikan rumah di setiap desa, proses perbaikan di setiap desa. Penggambaran karakteristik tersebut dapat dilihat dalam Tabel IV.4.

TABEL IV.4
KARAKTERISTIK PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN DI KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR

NO	KONDISI PENERIMA BANTUAN			KELEMBAGAAN		PROSES			
	SOSIAL	EKONOMI	FISIK	PELAKU YANG TERLIBAT	ATURAN MAIN	SOSIALISASI	PEMILIHAN PENERIMA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M01/01	Keluarga janda yang bekerja sebagai buruh, 3 jiwa.	Ketiga penerima merupakan keluarga miskin dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari.	Kondisi rumah sebelum diperbaiki, atap rumbia, dinding bambu, lantai tanah, rawan rubuh. Setelah diperbaiki, ketiga rumah tersebut memenuhi syarat kecukupan ruang, keselamatan bangunan, dan syarat kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa dipimpin oleh Kades, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua RW, - Para Ketua RT, - Masyarakat setempat, dan - Penerima bantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan - Perangkat desa sebagai pengelola dana. - Lokasi tersebar di 3 wilayah dikoordinasikan kepala RW setempat dibantu RT setempat. - Pembangunan serentak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi lomba perbaikan rumah dari perusahaan, oleh kepala desa disampaikan kepada para perangkat desa. - Pemberitahuan kepada calon penerima setelah memperoleh persetujuan dari pemberi dana. 	Dilakukan melalui musyawarah Kepala desa dengan perangkat desa dan para tokoh masyarakat, berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi rumah tidak layak huni, dan - kondisi masyarakat yang tidak mampu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan bangunan, tukang disediakan oleh pengelola. - Setiap rumah dikerjakan oleh 2 tukang dan dibantu masyarakat. - Swadaya penerima bantuan berupa tenaga. Pembangunan : <ul style="list-style-type: none"> - Struktur rumah - Atap asbes - Dinding triplek/ kayu, bambu - Lantai semen. - MCK. 	Masyarakat penghuni melakukan pemeliharaan sendiri setelah pembangunan selesai dilakukan.
M01/02	Keluarga usia lanjut bekerja sebagai buruh, 2 jiwa.								
M01/03	Keluarga janda yang tidak bekerja, tinggal bersama anak dan cucunya, 3 jiwa.								
M02/01	2 keluarga, sebelumnya 8 jiwa, setelah dibangun jadi 5 jiwa, bekerja sebagai buruh	Merupakan keluarga miskin dengan penghasilan yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari.	Atap genteng, dinding bambu, lantai semen retak, tanah, rawan rubuh.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa, - Perangkat desa, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua RW, - Kepala RT Kampung 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan - Ketua RW/RT dimana terdapat pembangunan rumahnya ditunjuk sebagai pengelola dana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi lomba perbaikan rumah dari perusahaan, oleh kepala desa disampaikan kepada para perangkat 	Dilakukan melalui musyawarah Kepala desa dengan perangkat desa dan para tokoh masyarakat, berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi rumah 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan bangunan, tukang disediakan oleh pengelola. - Pembangunan di Jangkar perlu 2 tukang, sedang di Ciparai perlu 5 tukang, keduanya dibantu masyarakat 	Penghuni melakukan pemeliharaan rumahnya sendiri. Khusus bagi penerima M02/02, oleh

NO	KONDISI PENERIMA BANTUAN			KELEMBAGAAN		PROSES			
	SOSIAL	EKONOMI	FISIK	PELAKU YANG TERLIBAT	ATURAN MAIN	SOSIALISASI	PEMILIHAN PENERIMA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M02/02	Keluarga belum memiliki rumah/ menumpang bekerja sebagai guru ngaji dan tukang ojek.	Keluarga tidak mampu.	Sebelumnya tidak memiliki rumah.	Jangkar, - Kepala RW & RT Kampung Ciparai, - Kepala RT Kampung Sukamanah, - RT setempat, - Masyarakat setempat, dan - Penerima bantuan.	- Lokasi tersebar di 3 wilayah dikoordinasikan kepala RW setempat dibantu RT setempat. - Pembangunan serentak.	desa. - Bagi ketua RW atau RT yang siap dan di wilayahnya terdapat masyarakat dengan kriteria layak dibantu, dialah yang dipilih sebagai pengelola. - Pemberitahuan kepada calon penerima menerima protes di Kampung Sukamanah.	tidak layak huni, dan - kondisi masyarakat yang tidak mampu/ belum memiliki rumah. Sempat diprotes masyarakat, lalu dilakukan musyawarah kembali sehingga dan perbaikan satu rumah, dibagi menjadi 11 rumah.	secara gotong-royong. - Perbaikan rumah-rumah di Sukamanah memerlukan satu tukang yang dikelola oleh ketua RT. Jenis perbaikan di Jangkar : - Struktur rumah - Atap genteng - Dinding sebagian tembok, triplek, bambu - Lantai semen MCK. Pembangunan di Ciparai: - Pondasi - Atap genteng - Dinding setengah tembok, kayu - Lantai keramik MCK.	karena status tanahnya adalah pinjaman dari kepala desa, penerima bantuan harus membeli tanah dengan cara mengangsur.
M02/03	Rukun Tetangga (RT) tertinggal	Rata-rata miskin	Kondisi rumah rata-rata masih layak dihuni. Perbaikan jendela di satu rumah dan pengecatan di 10 rumah.						
			Kedua rumah M02/01 & M02/02 memenuhi syarat kecukupan ruang, keselamatan bangunan, dan syarat kesehatan, sedangkan 11 rumah tidak memenuhi syarat kesehatan rumah karena tidak ada MCK.						
M03/01	Keluarga janda, buruh cuci, 4 jiwa	Keluarga miskin	Sebelum rumah diperbaiki, atap rumbia/genteng, dinding bambu, lantai tanah, rawan rubuh. Ketiga rumah tersebut	- Perangkat desa dipimpin oleh Kades, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua	- Kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan - Ketua RW/RT dimana terdapat pembangunan	- Kepala desa menyampaikan informasi lomba perbaikan rumah kepada para perangkat	Dilakukan melalui musyawarah Kepala desa dengan perangkat desa dan para tokoh	- Bahan bangunan, tukang disediakan oleh pengelola. - Setiap rumah dikerjakan oleh 2 tukang dan dibantu	Masyarakat penghuni melakukan pemeliharaan sendiri setelah pembangunan

NO	KONDISI PENERIMA BANTUAN			KELEMBAGAAN		PROSES			
	SOSIAL	EKONOMI	FISIK	PELAKU YANG TERLIBAT	ATURAN MAIN	SOSIALISASI	PEMILIHAN PENERIMA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M03/02	Keluarga janda, buruh tani, 5 jiwa	Keluarga miskin	memenuhi syarat keselamatan bangunan, M03/02 & M03/03 memenuhi kecukupan ruang, sedang M03/01 tidak, dan M03/01 yang memenuhi syarat kesehatan.	RW, - Para Ketua RT, - Masyarakat setempat, dan - Penerima bantuan.	rumahnya ditunjuk sebagai pengelola dana. - Lokasi tersebar di 3 wilayah dikoordinasikan kepala RW setempat dibantu RT setempat. - Pembangunan serentak.	desa. - Pemberitahuan kepada calon penerima setelah memperoleh persetujuan dari pemberi dana.	masyarakat, berdasarkan : - Kondisi rumah tidak layak huni, dan - kondisi masyarakat yang tidak mampu.	masyarakat. - Swadaya penerima bantuan berupa tenaga. Pembangunan : - Struktur rumah - Atap genteng - Dinding sebagian tembok, triplek/ kayu, bambu (M03/01 & M03/02), bambu (M03/03) - Lantai semen. - MCK hanya di M03/01.	selesai dilakukan.
M03/03	Keluarga besar, buruh, 8 jiwa	Keluarga miskin							
M04/01	Keluarga janda usia lanjut, tani, 3 jiwa	Keluarga miskin	Kondisi rumah sebelum diperbaiki, atap rumbia, asbes, genteng, dinding bambu, lantai tanah, rawan rubuh. Ketiga rumah tersebut memenuhi syarat kecukupan ruang, keselamatan bangunan, dan belum memenuhi syarat kesehatan karena tidak ada MCK.	- Perangkat desa dipimpin oleh Kades, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua RW, - Para Ketua RT, - Penerima bantuan.	- Kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan - Ketua RW setempat sebagai pengelola dana - Lokasi tersebar di satu wilayah RW 9 Kampung Banar. - Pembangunan bergiliran.	- Informasi yang diperoleh perusahaan disampaikan kepada para perangkat desa. - Pemberitahuan kepada calon penerima setelah memperoleh persetujuan dari pemberi dana.	- Melalui musyawarah dengan para tokoh masyarakat - Berdasarkan kondisi rumah tidak layak huni, kondisi masyarakat miskin	- Bahan bangunan, tukang disediakan oleh pengelola - Swadaya penerima bantuan berupa tenaga. - Pembangunan secara bergiliran Pembangunan : - Struktur rumah - Atap genteng - Dinding setengah tembok, triplek, bambu - Lantai keramik.	Masyarakat penghuni melakukan pemeliharaan sendiri setelah pembangunan selesai.
M04/02	Keluarga usia lanjut, tani, 2 jiwa	Keluarga miskin							
M04/03	Keluarga usia lanjut, tani, 2 jiwa	Keluarga miskin							
M04/04	Keluarga tidak mampu, buruh, 5 jiwa	Keluarga miskin							
M05/01	Keluarga tidak	Keluarga miskin	Kondisi rumah	- Kepala Desa,	- Kepala desa sebagai	Informasi yang	- Melalui	- Bahan bangunan,	Masyarakat

NO	KONDISI PENERIMA BANTUAN			KELEMBAGAAN		PROSES			
	SOSIAL	EKONOMI	FISIK	PELAKU YANG TERLIBAT	ATURAN MAIN	SOSIALISASI	PEMILIHAN PENERIMA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	mampu, buruh, 6 jiwa		M05/01 & M05/02 sebelum diperbaiki, atap berupa genteng/rumbia, dinding bambu, lantai semen, rawan rubuh.	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua RW, - Para Ketua RT, - Penerima bantuan, - Masyarakat sekitar penerima bantuan. 	<p>penanggung jawab kegiatan, koordinator pembangunan di Kampung Cadas Leueur bersama RT setempat sebagai pengelola dana.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua RW dibantu RT setempat sebagai pengelola dana koordinator di Kampung Sidempok dan Baju Rambeng/Bojong Sari. - Lokasi tersebar di 3 wilayah. - Pembangunan serentak. 	<p>diperoleh perusahaan disampaikan kepada para perangkat desa. Setelah calon penerima bantuan disepakati, informasi tersebut baru disampaikan kepada calon penerima koordinator masing-masing wilayah.</p>	<p>musyawarah dengan para tokoh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan kondisi rumah tidak layak huni, kondisi masyarakat miskin, dan keluarga yang belum memiliki rumah. 	<p>tukang disediakan oleh pengelola.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap rumah dikerjakan oleh 2 tukang dan dibantu masyarakat. - Swadaya penerima bantuan berupa tenaga, khusus penerima bantuan di Cadas Leueur menyiapkan bata secara swadaya. 	<p>penghuni melakukan pemeliharaan sendiri dan penambahan jika ada kekurangan.</p> <p>Penerima bantuan yang sebelumnya tidak memiliki rumah, memperoleh tanah sebagian dari keluarga dan pinjaman tetangga, untuk itu penerima bantuan harus mengangsur kepada pemilik.</p>
M05/02	Keluarga janda, usia lanjut, tinggal sendiri	Keluarga miskin	Ketiga rumah tersebut memenuhi syarat keselamatan bangunan, M05/01 & M05/03 tidak memenuhi kecukupan ruang, dan ketiga rumah tersebut belum memenuhi syarat kesehatan karena tidak ada MCK. Belum punya rumah						
M05/03	Keluarga belum memiliki rumah/ menumpang, bekerja sebagai buruh, 7 jiwa	Keluarga miskin							
M06/01	Keluarga usia lanjut, tidak bekerja, 2 jiwa	Keluarga miskin	Kondisi sebelum diperbaiki, atap 4 rumah rumbia dan 1 rumah genteng, dinding bambu, lantai tanah, hampir rubuh.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa, - Perangkat desa, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua RW, 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan - Perangkat desa sebagai pengelola dana - Lokasi tersebar di 3 	Informasi yang diperoleh perusahaan disampaikan kepada para perangkat desa. Setelah disepakati	<ul style="list-style-type: none"> - Melalui musyawarah dengan para tokoh masyarakat - Berdasarkan kondisi rumah 	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan bangunan, tukang disediakan oleh pengelola. - Setiap rumah dikerjakan oleh 2 tukang dan dibantu masyarakat. 	Masyarakat penghuni melakukan pemeliharaan sendiri setelah pembangunan selesai.
M06/02	Keluarga janda, tidak bekerja, tinggal sendiri	Keluarga miskin	Rumah 1, 2, 3 rumah						
M06/03	Keluarga usia	Keluarga miskin							

NO	KONDISI PENERIMA BANTUAN			KELEMBAGAAN		PROSES			
	SOSIAL	EKONOMI	FISIK	PELAKU YANG TERLIBAT	ATURAN MAIN	SOSIALISASI	PEMILIHAN PENERIMA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lanjut, buruh, 2 jiwa		memenuhi syarat kecukupan ruang, sedang rumah 4 dan 5 belum, kelima rumah memenuhi syarat keselamatan bangunan, & kelima rumah belum memenuhi syarat kesehatan karena tidak ada MCK.	- Para Ketua RT, - Penerima bantuan, - Masyarakat sekitar penerima bantuan.	wilayah yaitu sekitar Kantor Desa, Kampung Pangkalan, dan Cikeutug. - Pembangunan serentak.	siapa saja calon penerima bantuannya, penerima diberitahukan.	tidak layak huni atau rentan rubuh, dan kondisi masyarakat miskin, biasanya usia lanjut.	- Swadaya penerima bantuan berupa tenaga. Pembangunan : - Struktur rumah - Atap genteng - Dinding bambu, kecuali rumah Pak Ata, tembok - Lantai semen.	
M06/04	2 keluarga, buruh, 6 jiwa	Keluarga miskin							
M06/05	Keluarga usia lanjut, buruh, 5 jiwa	Keluarga miskin							
M07/01	Keluarga janda, buruh tani, 5 jiwa	Keluarga miskin	Kondisi sebelum diperbaiki, atap 1 berupa rumbia dan 2 rumah genteng, dinding bambu, lantai tanah. Ketiga rumah belum memenuhi syarat kecukupan ruang, ketiga memenuhi syarat keselamatan bangunan, namun belum memenuhi syarat kesehatan karena tidak ada MCK.	- Kepala Desa, - Perangkat desa, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua RW, - Para Ketua RT, - Penerima bantuan, - Masyarakat sekitar penerima bantuan.	- Kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan - Perangkat desa sebagai pengelola dana - Lokasi tersebar di 3 wilayah agar merata. - Koordinator pembangunan adalah RT/RW setempat - Pembangunan serentak.	Informasi yang diperoleh perusahaan disampaikan kepada para perangkat desa. Penerima diberitahu untuk diusulkan, namun sempat terjadi ketidaksetujuan.	- Melalui musyawarah dengan para tokoh masyarakat dan perangkat desa - Berdasarkan kondisi rumah tidak layak huni dan kondisi masyarakat miskin. Pemilihan penerima sempat mengalami ketidaksetujuan karena salah satu penerima meminta dibangun rumah yang	- Bahan bangunan, tukang disediakan oleh pengelola - Setiap rumah dikerjakan oleh 2 tukang dan dibantu masyarakat. - Swadaya penerima bantuan berupa tenaga. Pembangunan : - Struktur rumah - Atap genteng, dan asbes - Dinding setengah tembok dan bambu. - Lantai semen.	Masyarakat penghuni melakukan pemeliharaan sendiri dan penambahan jika ada kekurangan.
M07/02	Keluarga usia lanjut, tinggal bersama keluarga anaknya, 9 jiwa	Keluarga miskin							
M07/03	Keluarga tidak mampu, buruh, 5 jiwa	Keluarga miskin							

NO	KONDISI PENERIMA BANTUAN			KELEMBAGAAN		PROSES			
	SOSIAL	EKONOMI	FISIK	PELAKU YANG TERLIBAT	ATURAN MAIN	SOSIALISASI	PEMILIHAN PENERIMA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	jiwa		1 rumah memenuhi syarat kecukupan ruang, 2 belum, ketiga memenuhi syarat keselamatan bangunan, ketiganya belum memenuhi syarat kesehatan karena tidak ada MCK.	RW, - Para Ketua RT, - Penerima bantuan, - Masyarakat sekitar penerima bantuan.	- Lokasi tersebar di 2 wilayah sesuai kondisi yang paling parah - Koordinator pembangunan adalah RT/RW setempat - Pembangunan serentak.	Penerima bantuan diberitahu oleh Kepala Desa dan RT/RW.	kondisi rumah tidak layak huni, kondisi masyarakat miskin	masyarakat. - Swadaya penerima bantuan berupa tenaga. Pembangunan : - Struktur rumah - Atap genteng - Dinding tembok di 1 rumah , setengah tembok dan bambu 2 rumah. - Lantai semen di dalam, keramik di teras.	usai dan memenuhi kekurangan jika ada.
M09/03	Keluarga usia lanjut, tidak bekerja, 5 jiwa	Keluarga miskin							
M10/01	Keluarga tidak mampu, sopir, 5 jiwa	Keluarga miskin	Kondisi sebelum diperbaiki, atap genteng dan rumbia, dinding bambu, lantai tanah dan semen.	- Kepala Desa, - Perangkat desa, - Tokoh masyarakat, - Para Ketua RW, - Para Ketua RT, - Penerima bantuan, - Masyarakat sekitar penerima bantuan.	- Kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan - Lokasi tersebar di 3 wilayah sesuai kondisi yang paling parah - Koordinator pembangunan dan pengelola dana adalah adalah RT/RW setempat - Bahan bangunan yang dapat diperoleh dari masyarakat setempat dibeli dengan harga diskon dan dihitung sebagai	Informasi yang diperoleh perusahaan disampaikan kepada para perangkat desa. Penerima bantuan diberitahu oleh Kepala Desa dan RT/RW.	- Melalui musyawarah dengan para tokoh masyarakat - Berdasarkan kondisi rumah tidak layak huni, kondisi masyarakat miskin	- Bahan bangunan, tukang disiapkan oleh pengelola - Setiap rumah dikerjakan 2 tukang & dibantu masyarakat. - Swadaya penerima bantuan berupa tenaga. Pembangunan : - Struktur rumah - Atap genteng - Dinding tembok 2 rumah, setengah tembok & bambu 1 rumah. - Lantai semen.	Masyarakat penghuni melakukan pemeliharaan sendiri setelah pembangunan usai dan memenuhi kekurangan jika ada.
M10/02	Keluarga tidak mampu, buruh, 6 jiwa	Keluarga miskin	3 rumah belum memenuhi syarat kecukupan ruang, ketiga memenuhi syarat keselamatan bangunan, ketiganya belum memenuhi syarat kesehatan karena tidak ada MCK.						
M10/03	Keluarga usia lanjut, tidak bekerja, yang bekerja istri, 9 jiwa	Keluarga miskin							

NO	KONDISI PENERIMA BANTUAN			KELEMBAGAAN		PROSES			
	SOSIAL	EKONOMI	FISIK	PELAKU YANG TERLIBAT	ATURAN MAIN	SOSIALISASI	PEMILIHAN PENERIMA	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PEMELIHARAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					swadaya masyarakat - Pembangunan serentak.				

Sumber : Analisis penyusun, 2010

Keterangan :

Pernomoratan M/X/Y

- M menunjukkan masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah;
- X menunjukkan nama desa (01 = Desa Malasari, 02 = Desa Cisarua, 03 = Desa Curug Bitung, 04 = Desa Nanggung, 05 = Desa Bantar Karet, 06 = Desa Pangkal Jaya, 07 = Desa Kalong Liud, 08 = Desa Parakan Muncang, 09 = Desa Hambaro, 10 = Desa Sukaluyu);
- Y menunjukkan nomor urut masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah di setiap desa.

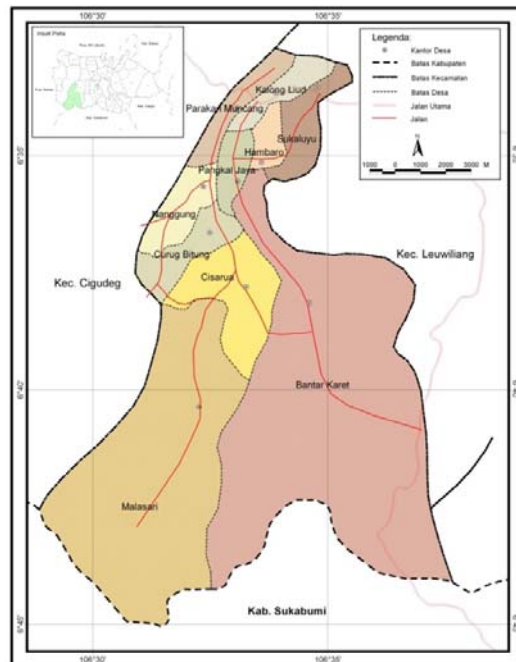
Berdasarkan karakteristik tersebut dapat diperoleh gambaran penerapan CSR bidang perumahan di setiap desa se Kecamatan Nanggung yang didanai melalui Program Bina Lingkungan perusahaan milik negara yang mengeksplorasi tambang emas di Pongkor Jawa Barat. Berdasarkan karakteristik tersebut juga dapat diperoleh suatu tipologi dengan mengelompokkan karakteristik yang sejenis. Tipologi diperoleh melalui keterkaitan antar karakteristik sesuai variabel penelitian, meliputi penerima bantuan rumah sehat, kebijakan desa dalam pembangunan rumah sehat, dan tipologi pembangunan rumah. Perumusan tipologi dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini.

TABEL IV.5
TIPOLOGI PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN

NO	TIPOLOGI	URAIAN	KETERANGAN
1	Penerima bantuan pembangunan rumah sehat	1) Keluarga miskin, jompo, tinggal di rumah tidak layak huni; 2) Keluarga miskin, banyak anak (ada anak balita), tinggal di rumah tidak layak huni; 3) Keluarga miskin, tidak memiliki rumah.	Kolom 2, 3, 4 Tabel IV.4
2	Tipologi kebijakan desa dalam pembangunan rumah sehat	1) Lokasi penerima bantuan tersebar di wilayah desa dalam rangka pemerataan, pelaksanaan pembangunan rumah secara serentak; 2) Lokasi penerima bantuan terkumpul dalam satu kampung dalam rangka mengurangi jumlah rumah tidak layak huni kampung tersebut karena terlalu besar, pelaksanaan pembangunan secara bergiliran; 3) Lokasi penerima bantuan terkumpul dalam satu kampung, pelaksanaan pembangunan secara serentak.	Kolom 6 Tabel IV.4
3	Tipologi pembangunan rumah	1) Perbaikan ringan tanpa pembongkaran struktur bangunan; 2) Pemugaran dengan pembongkaran struktur bangunan di lokasi bekas bangunan lama; 3) Pembangunan rumah melalui pembongkaran struktur bangunan, di lokasi dekat dengan bangunan lama; 4) Pembangunan baru.	Kolom 4 dan 9 Tabel IV.4

Sumber : Analisis penyusun, 2010

Tipologi kebijakan desa dalam pembangunan rumah terkait dengan sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dalam Tabel IV.5 dapat digambarkan dalam Gambar 4.8.

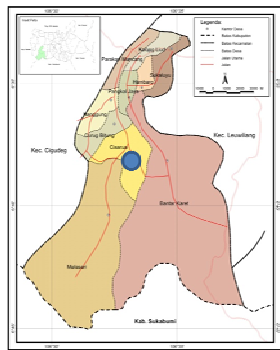


Sumber : Analisis penyusun, 2010

GAMBAR 4.8
TIPOLOGI SEBARAN LOKASI PERBAIKAN RUMAH

Tampak dalam gambar, 9 desa memiliki satu tipologi penyebaran lokasi penerima bantuan perbaikan rumah. Desa Malasari, Curug Bitung, Bantar Karet, Pangkal Jaya, Kalong Liud, Parakan Muncang, Hambaro, dan Sukaluyu menerapkan pola menyebar, dengan pembangunan secara serentak. Desa Nanggung menerapkan pola mengelompok dengan pelaksanaan pembangunan secara bergiliran. Sedangkan Desa Cisarua menerapkan dua tipologi yakni menyebar dengan pembangunan serentak dan mengelompok dengan pembangunan serentak pula.

Tipologi pembangunan rumah 1) Perbaikan ringan tanpa pembongkaran struktur bangunan; 2) Pemugaran dengan pembongkaran struktur bangunan di lokasi bekas bangunan lama; 3) Pembangunan rumah melalui pembongkaran struktur bangunan, di lokasi dekat dengan bangunan lama; 4) Pembangunan baru, sebagaimana dimaksud dalam Tabel IV.5 dapat digambarkan dalam Gambar 4.9, 4.10, 4.11, dan 4.12.



Sumber : Analisis penyusun, 2010



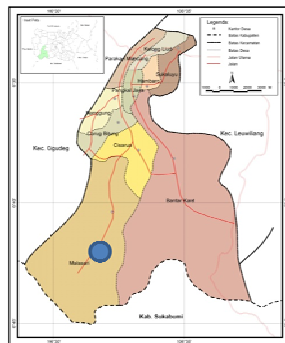
Perbaikan jendela dan pengecatan, hanya meningkatkan kesehatan rumah dalam hal pencahayaan.



Hanya pengecatan rumah, tidak ada upaya peningkatan kualitas kesehatan rumah.

GAMBAR 4.9 TIPOLOGI PERBAIKAN RINGAN

Tipologi pemugaran rumah terjadi di Kampung Sukamanah Desa Cisarua yang hanya terdiri atas 11 rumah dan dihuni oleh 12 keluarga. Perbaikan rumah yang dilakukan hanya perbaikan jendela sebagai pemenuhan syarat kesehatan terkait dengan pencahayaan rumah. Perbaikan jendela ini hanya dilakukan di satu rumah, sedangkan 10 rumah lainnya dilakukan pengecatan, sehingga perbaikan rumah tipologi ini, tidak mengakibatkan peningkatan kualitas rumah.



Peningkatan kualitas kesehatan penghuni melalui perbaikan lantai.



Peningkatan kualitas kesehatan penghuni melalui penyediaan MCK

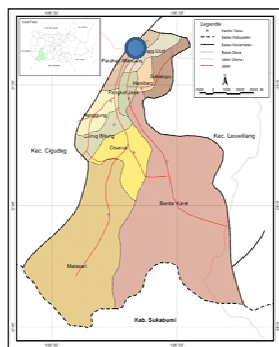


Peningkatan kualitas konstruksi bangunan melalui perbaikan dinding dan atap.

Sumber : Analisis penyusun, 2010

GAMBAR 4.10 TIPOLOGI PEMUGARAN RUMAH

Tipologi perbaikan rumah yang kedua adalah tipe pemugaran dengan pembongkaran struktur bangunan. Rumah-rumah yang diperbaiki awalnya merupakan rumah yang tidak layak huni oleh struktur bangunan yang hampir roboh. Perbaikan struktur berupa dinding dan atap dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya merupakan bentuk dari peningkatan kualitas rumah dari sisi pemenuhan syarat kelayakan teknis. Desa-desa yang menerapkan perbaikan rumah tipologi ini diantaranya adalah Desa Malasari, Curug Bitung, Nanggung, Bantar Karet, Pangkal Jaya, Kalong Liud, Parakan Muncang, Hambaro dan Sukaluyu. Namun demikian tidak semua memenuhi semua ketentuan syarat rumah sehat, hanya Desa Malasari yang menerapkan pemenuhan kesehatan rumah melalui penyediaan MCK dan air bersih.



Peningkatan kualitas konstruksi bangunan melalui perbaikan dinding dan atap.

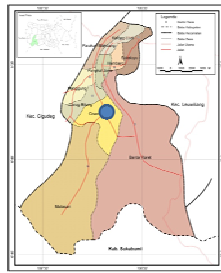


Peningkatan kualitas kesehatan penghuni melalui perbaikan lantai .

Sumber : Analisis penyusun, 2010

GAMBAR 4.11 **TIPOLOGI PEMBANGUNAN RUMAH DEKAT BANGUNAN LAMA**

Tipologi pembangunan rumah berlokasi di dekat bangunan lama diterapkan di Desa Parakan Muncang dan Desa Cisarua. Penerapan tipologi ini disebabkan oleh masih tersedianya tanah yang dikuasai oleh keluarga penerima bantuan. Kualitas bangunan baru jauh lebih baik dibanding bangunan rumah yang lama, karena lebih memenuhi syarat kelayakan konstruksi bangunan, syarat kesehatan, dan kecukupan ruang bagi penghuni. Bangunan lama ada yang dibiarkan tetap berdiri sebagai tempat beraktivitas keluarga seperti memasak, mencuci, dan mandi. Ada pula yang dihuni oleh keluarga yang dulunya memang serumah dengan penerima bantuan.



Pembangunan rumah dengan konstruksi permanen .



Penyediaan air bersih

Sumber : Analisis penyusun, 2010

GAMBAR 4.12 **TIPOLOGI PEMBANGUNAN RUMAH BARU**

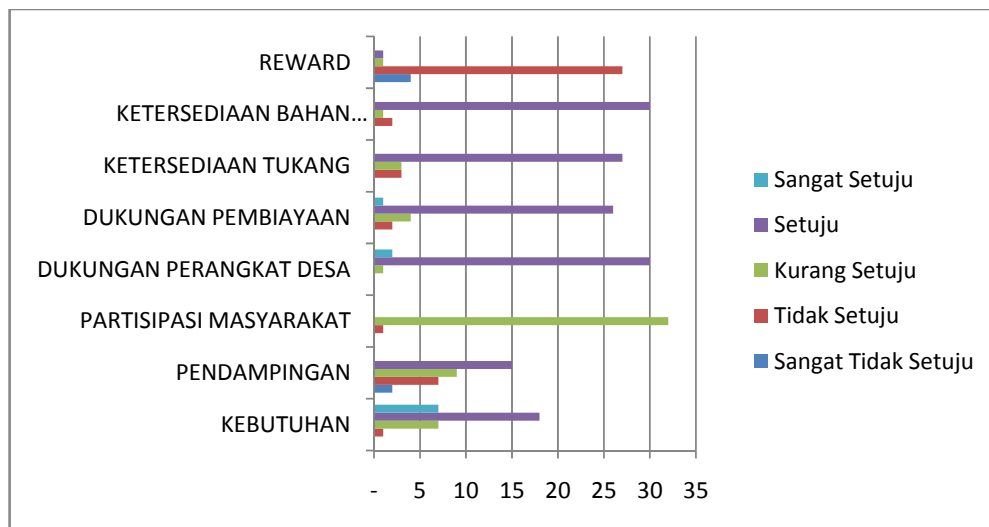
Pembangunan rumah baru di lokasi baru dilakukan di Desa Cisarua dan Bantar Karet. Penerima bantuan sebelumnya tinggal di rumah kerabat dan tidak memiliki atau menguasai tanah. Adanya stimulan dari pihak perusahaan menjadikan masyarakat desa tergerak untuk menyiapkan tanah bagi penerima bantuan dengan cara meminjamkan. Selanjutnya akan diurus status pengalihan penguasaan tanah bila penerima bantuan telah memiliki dana yang cukup.

4.3. Kajian Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Terlaksananya Penerapan CSR Bidang Perumahan di Kecamatan Nanggung

CSR bidang perumahan yang diimplementasikan dalam bentuk lomba perbaikan rumah sehat antar desa ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Penilaian terhadap berpengaruhnya suatu hal atau variabel dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sejumlah 33 orang yang menjadi responden dalam survei yang telah dilakukan. Dalam menentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap penerapan kegiatan tersebut dipergunakan analisis faktor. Analisis faktor ialah analisis untuk menemukan variabel baru yang disebut faktor yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah variabel asli (Supranto, 2004: 26). Dalam analisis ini mengolah pendapat masyarakat penerima bantuan tentang 8 variabel meliputi : 1) Kebutuhan masyarakat terhadap rumah sehat; 2) Adanya pendampingan; 3) Partisipasi masyarakat; 4) Dukungan perangkat desa; 5) Dukungan pembiayaan; 6) Ketersediaan tenaga tukang; 7) Ketersediaan bahan bangunan; 8) Adanya reward.

4.3.1. Penilaian Penerima Bantuan terhadap Terlaksananya Perbaikan Rumah

Masing-masing variabel tersebut dinilai oleh penerima bantuan perbaikan rumah berdasarkan tingkat persetujuan, yakni sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Dalam pengolahan data pendapat responden tersebut dianalogikan dalam angka ordinal yang menunjukkan urutan atau tingkatan (Supranto, 2004: 5). Penerjemahan tingkat penilaian ke dalam angka ordinal adalah sebagai berikut : sangat tidak setuju = 1, tidak setuju = 2, kurang setuju = 3, setuju = 4, dan sangat setuju = 5. Hasil penilaian variabel-variabel yang berpengaruh dalam pelaksanaan penerapan CSR bidang perumahan yang dilakukan penerima bantuan perbaikan rumah, dapat digambarkan dalam Gambar 4.8. Semua variabel dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perbaikan rumah sehat di setiap desa, namun perlu ditentukan faktor yang paling signifikan berpengaruh terhadap kegiatan tersebut, sehingga data perlu diringkas dan direduksi melalui analisis faktor ini.



Sumber : Hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.13
PENILAIAN PENERIMA BANTUAN TERHADAP FAKTOR YANG
BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH
SEHAT

a. Analisis Faktor I

Pada pengolahan data dengan analisis faktor yang pertama, diperoleh hasil bahwa *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) menunjukkan nilai 0,567, nilai ini cukup untuk mengukur ketetapan analisis faktor untuk dilakukan. Bila dilihat korelasi setelah analisis faktor (*Tabel Anti Image Correlation Matrix*), diketahui bahwa masih ada yang nilainya kurang dari 0,5, sehingga model korelasi ini tidak tepat, dan perlu direduksi beberapa variabel untuk dianalisis lagi. Nilai *Measures of Sampling Adequacy* (MSA) untuk mengetahui tingkat kecukupan sampel masing-masing variabel dapat dilihat dalam Tabel IV.6.

TABEL IV.6
NILAI MSA SETIAP VARIABEL

NO	VARIABEL	NILAI MSA	KETERANGAN
1.	Kebutuhan menghuni rumah layak	0,286	<0,5 → tereduksi
2.	Adanya pendampingan	0,511	>0,5 → dapat menjadi faktor
3.	Adanya partisipasi masyarakat	0,269	<0,5 → tereduksi
4.	Dukungan perangkat desa	0,789	>0,5 → dapat menjadi faktor
5.	Dukungan pembiayaan	0,561	>0,5 → dapat menjadi faktor
6.	Ketersediaan tenaga tukang	0,604	>0,5 → dapat menjadi faktor
7.	Ketersediaan bahan bangunan	0,636	>0,5 → dapat menjadi faktor
8.	Adanya reward/insentif	0,493	<0,5 → tereduksi

Sumber : Hasil analisis, 2010

Dalam kolom *initial eigenvalues* pada Tabel *Total Variance Explained* diperoleh nilai komponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, masing-masing 3,433; 1,545; 1,024; 0,785; 0,650; 0,348; 0,146; dan 0,068. Pada analisis ini *initial eigenvalue* lebih dari 1 terdapat 3 komponen, sehingga variabel-variabel yang dianalisis dapat membentuk 3 faktor. Apabila dilihat nilai MSA setiap variabel, beberapa variabel yang bernilai kurang dari 0,5 perlu direduksi untuk dianalisis kembali.

b. Analisis Faktor II

Variabel kebutuhan masyarakat terhadap rumah sehat, partisipasi masyarakat, dan adanya reward, direduksi, sehingga variabel yang dianalisis selanjutnya adalah adanya pendampingan; dukungan perangkat desa; dukungan pembiayaan; ketersediaan tenaga tukang; dan ketersediaan bahan bangunan. Pada

analisis faktor kedua diperoleh hasil *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) menunjukkan nilai 0,704, nilai ini meningkat dari hasil analisis faktor sebelumnya. Ini berarti bahwa 3 variabel yang tereduksi memang dapat meningkatkan tingkat ketepatan analisis ini dilakukan. Dalam Tabel *Anti Image Correlation Matrix*, nilai MSA variabel-variabel pendampingan, dukungan perangkat desa, dukungan pembiayaan, tenaga tukang, dan bahan bangunan, masing-masing 0,742; 0,802; 0,711; 0,661; dan 0,664. Semua variabel bernilai lebih dari 0,5 sehingga semua variabel dapat membentuk faktor.

TABEL IV.7
KONTRIBUSI SETIAP VARIABEL TERHADAP FAKTOR TERBENTUK

NO	VARIABEL	NILAI <i>COMMUNALITIES</i>	KETERANGAN
1.	Adanya pendampingan	0,471	Keempat
2.	Dukungan perangkat desa	0,670	Ketiga
3.	Dukungan pembiayaan	0,435	Kelima
4.	Ketersediaan tenaga tukang	0,756	Kedua
5.	Ketersediaan bahan bangunan	0,865	Kesatu

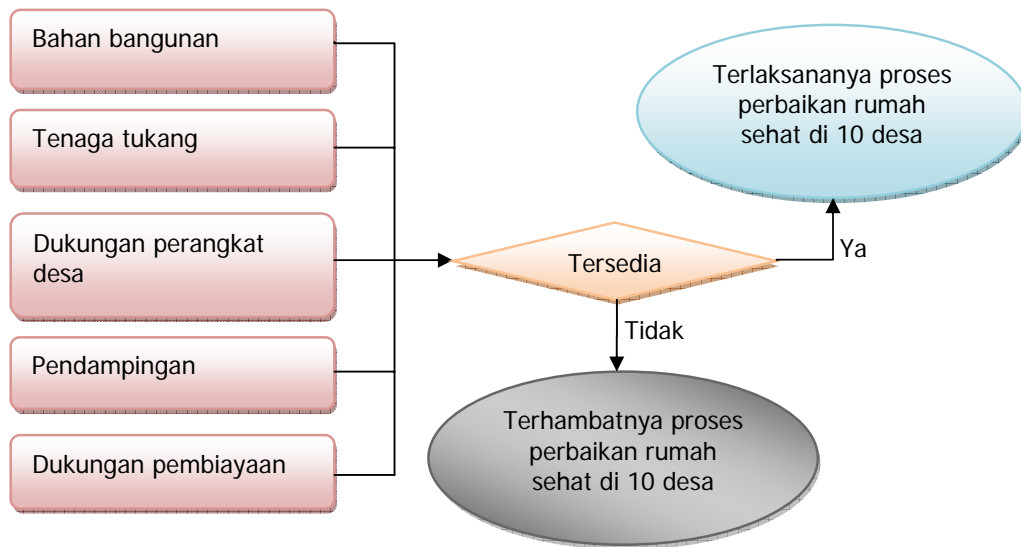
Sumber : Hasil analisis, 2010

Dalam pengolahan ini diperoleh *eigen value* yang memenuhi cuma satu, sehingga komponen atau faktor yang terbentuk hanya satu atau dapat dikatakan satu faktor terbentuk dari 5 variabel pembentuk. Berdasarkan kontribusi variabel dalam Tabel IV.7 diperoleh urutan kontribusi variabel terhadap faktor sebagai berikut : 1) bahan bangunan, 2) tukang, 3) perangkat desa, 4) pendampingan, dan 5) pembiayaan.

4.3.2. Pembahasan Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Terlaksananya Penerapan CSR Bidang Perumahan di Kecamatan Nanggung

Faktor yang diperoleh dari hasil analisis faktor hanya satu dan dibentuk oleh 5 variabel yakni : 1) Ketersediaan tenaga tukang, 2) Ketersediaan bahan bangunan, 3) Dukungan perangkat desa, 4) Adanya pendampingan, 5) Dukungan pembiayaan. Variabel-variabel tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terlaksananya penerapan perbaikan rumah sehat di setiap desa di Kecamatan Nanggung dari sisi di luar masyarakat sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu

faktor tersebut diberi nama faktor eksternal perbaikan rumah sehat. Kelima faktor tersebut diperlukan dalam penerapan CSR bidang perumahan di 10 desa se Kecamatan Nanggung. Ada atau tersedianya faktor tersebut mendorong terlaksananya perbaikan rumah, sebaliknya jika faktor-faktor tersebut tidak ada atau tidak tersedia, proses perbaikan rumah dapat terhambat.



Sumber : hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.14
FAKTOR TERLAKSANANYA PENERAPAN CSR BIDANG
PERUMAHAN DI 10 DESA KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN
BOGOR

a. Faktor Tereduksi

Faktor yang tereduksi dalam analisis faktor pertama adalah kebutuhan menghuni rumah layak, partisipasi masyarakat, dan adanya reward. Berikut ini adalah penyebab yang dapat menjelaskan tentang tereduksinya ketiga faktor tersebut.

Pembangunan atau perbaikan rumah memerlukan sumber daya termasuk pembiayaan. Penerima bantuan perbaikan rumah sehat di setiap desa, hampir seluruhnya masyarakat miskin, bahkan sebanyak 18% dari penerima tersebut tidak memiliki penghasilan. Keinginan untuk memiliki rumah sehat yang layak huni

memang selalu ada, namun dengan kemampuan yang sangat terbatas ini, menjadikan warga miskin di desa-desa Kecamatan Nanggung tidak mampu mewujudkan harapan tersebut secara swadaya. Kemampuan menabung yang menjadi alternatif pengumpulan biaya untuk kebutuhan tertentu seperti perbaikan rumah ini pun kecil sekali peluangnya. 12% penerima bantuan yang memiliki tabungan, itupun jumlahnya sangat kecil dan peruntukannya bukan untuk perbaikan rumah namun untuk biaya sekolah anak ketika kenaikan kelas. Berdasarkan kajian ini dapat disimpulkan faktor internal perbaikan rumah yakni masyarakat, tidak cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan perbaikan rumah.

“Dari dia, dari dia mah boro-boro, rokok saja saya, kasian, beras aja ya, saya keliling seikhlasnya, di sini mah alhamdulillah, gotong-royong masih bagus.” (FP/D08/01/01)

Variabel partisipasi masyarakat yang dirumuskan di awal penelitian berkaitan dengan lokasi penelitian di daerah perdesaan yang dianggap masih tinggi sifat kegotong-royongannya. Namun dalam analisis faktor variabel tersebut direduksi karena tidak cukup kuat mempengaruhi pelaksanaan perbaikan rumah. Hal ini disebabkan oleh kesibukan masing-masing warga atau kebutuhan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Di beberapa desa, peran RT dan RW yang diharapkan dapat menjadi motivator bagi warganya kurang mampu berperan oleh alasan kesibukan bekerja.

“Kan saya mah begini sama masyarakat, silakan jika ada bantuan misalnya 9 juta atau 7 juta, kan tidak cukup, kan coba masyarakat kalau ada kesempatan, minta tolong sekiranya apakah bambu atau apa satu batang atau apa, istilahnya ada kegotong-royongan, justru sebelah sana mah susah. Tahuk dapat bantuan ini kan ada uangnya. Pak RT nya cuek, susah, ya memang masing-masing, apalagi Pak RW nya pada kerja di tambang, ada berapa RW.” (FP/D08/01/02)

“Tukang dibantu perangkat desa, gotong royong agak kurang di sini.” (FP/D04/02/01)

Variabel *reward* atau penghargaan apabila menjadi pemenang lomba juga tidak cukup signifikan membentuk faktor yang mempengaruhi terlaksananya perbaikan rumah sehat. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat penerima bantuan akan lomba antar desa tersebut. Sebagian besar penerima bantuan menganggap bahwa bantuan tersebut memang dari PT. Aneka Tambang

Tbk., namun tidak pernah tahu diadakan lomba. Bagi perangkat desa yang memang tahu betul tentang lomba ini, juga menganggap bahwa reward bukan satu-satunya alasan untuk melakukan perbaikan rumah bagi warganya yang kurang mampu.

“Tahunya ada yang dibangun aja, gak tahu kalau dilombain.”
(FP/M05/01/01)

“Tahu, katanya tapi orang sono yang menang.” (FP/M09/02/01)

b. Faktor Penerapan CSR Bidang Perumahan

Terlaksananya lomba perbaikan rumah di 10 desa se Kecamatan Nanggung sebagai bentuk penerapan CSR bidang perumahan yang dirancang oleh PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor, sesuai dengan hasil analisis faktor ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal masyarakat penerima bantuan. Faktor eksternal tersebut adalah adanya dukungan perangkat desa, adanya pendampingan, adanya dukungan pembiayaan, ketersediaan bahan bangunan, dan ketersediaan tenaga tukang. Faktor eksternal penerapan CSR bidang perumahan di Kecamatan Nanggung tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif. Bila faktor-faktor tersebut ada atau tersedia, maka penerapan CSR bidang perumahan ini dapat berlangsung, sebaliknya jika faktor-faktor itu tidak tersedia, penerapan CSR dapat terhambat.

Ketersediaan tukang menjadi faktor kelima yang memberikan pengaruhnya terhadap pelaksanaan lomba perbaikan rumah yang dibatasi selama 14 hari. Pembangunan rumah bagaimanapun memerlukan orang yang ahli dalam hal pembangunan baik tukang batu ataupun tukang kayu. Jumlah tukang yang diperlukan dalam pembangunan rumah berbeda-beda di setiap desa dan setiap rumah yang ditangani. Sebagian besar setiap rumah memerlukan 2 tukang, kecuali di Desa Cisarua Kampung Ciparai rumah Pak Yanto. Tukang yang bekerja di sana sampai 5 orang, hal ini pula yang menyebabkan kualitas rumah tersebut cukup bagus dan selesai tepat waktu sebagaimana yang dipersyaratkan. Lain halnya dengan di Kampung Banar Desa Nanggung, sebanyak 4 rumah yang dibangun secara bergiliran dan hanya 2 tukang yang bekerja. Kondisi salah rumah di Kampung Banar tersebut, kurang memenuhi syarat karena masih bocor meskipun

hujan tidak terlalu lebat. Ketersediaan tukang dalam pembangunan rumah dengan kondisi bangunan yang dihasilkan dapat disimpulkan memiliki hubungan positif.

“Tukang Cuma 2, gantian pembangunannya.” (FP/D04/02/02)

Ketersediaan bahan bangunan menjadi faktor keempat dalam membantu kelancaran pembangunan rumah-rumah yang dilombakan antar desa se Kecamatan Nanggung. Bahan bangunan di wilayah ini cukup mudah diperoleh, baik kayu, bambu, semen, bata, genteng, dan sebagainya. Beberapa bahan bangunan seperti bambu dan pasir bahkan dapat diperoleh di dekat lokasi pembangunan rumah.

“Bapak mbangun di sini 12 hari beres. Kayunya deket, pasirnya deket, kayu kelas 2 puspa.” (FP/D05/02/01)

Dukungan pembiayaan memengaruhi terlaksananya pembangunan rumah di 10 desa Kecamatan Nanggung sebagai urutan ketiga. Faktor ini dapat dijelaskan dalam contoh pembangunan beberapa rumah yang memerlukan biaya lebih besar dibanding dana yang tersedia. Pihak pemberi stimulan memberikan Rp. 27,5 juta di masing-masing desa untuk dibangun minimal 3 rumah. Setiap desa melakukan pembangunan rumah sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki. Pembangunan rumah Pak Yanto, yang sebelumnya masih tinggal menumpang di rumah kerabat, melalui stimulan dari PT. Antam dan dukungan dari perangkat desa dan swadaya masyarakat, telah berhasil memiliki rumah permanen di atas tanah yang cukup luas. Hal ini menunjukkan ada sumber dana di luar dana stimulan yang mendorong tercapainya kondisi yang demikian. Hal itu pula yang menjadikan Desa Cisarua memperoleh penghargaan sebagai juara satu lomba perbaikan rumah se Kecamatan Nanggung.

Pendampingan sebagai faktor kedua, diperlukan oleh karena sebagian masyarakat penerima bantuan tidak memiliki daya untuk membangun rumahnya sendiri. Kondisi rumah yang sudah tidak layak dan rawan rubuh pun tidak cukup kuat mendorong mereka berusaha memperbaikinya sendiri. Bahkan 6 orang penerima bantuan sudah tidak bekerja lagi karena sudah terlalu tua dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Pendampingan diperlukan bagi masyarakat melalui intervensi dalam bentuk bantuan perbaikan rumah semacam ini. Pendampingan

dan intervensi ini selayaknya dilakukan oleh perangkat desa yang tahu betul kondisi warganya.

Dukungan perangkat desa sebagai faktor terkuat berpengaruh terhadap pelaksanaan perbaikan/pembangunan rumah di setiap desa se Kecamatan Nanggung, hal ini juga diperkuat dengan pendapat pihak kecamatan.

“.....tinggal tergantung pada kemauan kepala desa, karena uang itu cair kan ke kepala desa. Kepala desa yang nanti jadi pelaksana di lapangan. Kalau kepala desa yang benar-bener pengen memperhatikan masyarakat desanya ya pasti dibangun.” (FP/K/01/01)

Lomba perbaikan rumah inisiasi dari PT. Antam ini melibatkan kepala desa sebagai pelaku kunci, karena melalui merekalah kegiatan ini dapat terlaksana. Mulai dari sosialisasi yang disampaikan kepada kepala desa, pencairan dana pun demikian, hingga pengumuman pemenang lomba, nama kepala desa lah yang selalu muncul sebagai pelaku. Dalam bekerja, kepala desa tidak mungkin bekerja sendiri, pelibatan perangkat desa setempat yang dapat dipercaya dapat mendukung terlaksananya kegiatan ini, amatlah diperlukan. Beberapa perangkat RT atau RW sebagai pengelola keuangan dan pelaksana pembangunan di lapangan menjadi ukuran terlaksananya proses ini.

Terlaksananya perbaikan rumah di setiap desa tersebut memperoleh tanggapan yang cukup positif dari berbagai pihak. Tanggapan positif tersebut datang dari penerima bantuan perbaikan rumah, masyarakat sekitar yang turut senang melihat tetangganya yang tidak mampu bisa menghuni rumah layak, perangkat desa termasuk kepala desa, dan pihak kecamatan. Meskipun tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan ini, pihak kecamatan menilai penerapan CSR yang demikian cukup mendukung tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping tanggapan dan penilaian positif ini pun ternyata terungkap adanya beberapa pendapat lain yang barangkali perlu memperoleh kajian lebih khusus. Berikut ini petikan hasil wawancara kepada dua orang penerima bantuan yang berlokasi di satu wilayah, Desa Kalong Liud.

“Ya kalau enak mah enak yang dulu, kalau sekarang enggak, sakit atinya anak yang begini, sakit. Sekarang anaknya bisa begini, dulu kan saya bikin rumah ga sampai begini anak. Kalau sekarang anak sampai begini ga bisa tidur tiap malam. Nggak tahu tuh bilanganya takut-takutan aja. Waktu ditontonin ke mana-mana dari rumah ini, dari sini, kaditu tumbal heula.” (FP/M07/01/01)

“Pas ngebangun ini, saya perasaan gelap, biasanya tidur aja rejeki sudah ada kan, sesudah ini perasaan berat sekali, berat sekali. Tiap hari saya nggeletak, istri saya mah sudah kemana-kemana. Dia ngomong, yah kita mau bagaimana, kan kalau gubuk udeh ga ada ya, wah mau kesana ah, yah kadang-kadang untuk makan yah ada. Sekarang, bukan mau menghilangkan rejeki ya, perasaan ga ada bayangan gitu. Kalau kita mau nafsu, maunya jahat kan, alhamdulillah masih bisa kita kendaliin masalah kejahatan gitu. Jadi perasaan saya gelap gitu. Dulu saya gendut sekarang saya kurut.” (FP/M07/02/01).

Pendapat dua penerima bantuan tersebut menunjukkan adanya kekecewaan terhadap apa yang diperoleh, meskipun jika diminta menilai kondisi rumahnya keduanya berpendapat bahwa kondisi rumah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat setempat yang juga merupakan Kepala Desa Cisarua diperoleh informasi bahwa pembangunan rumah memiliki pengaruh terhadap pelaku atau penghuni rumah tersebut. Berikut ini petikannya.

“Ada yang sering mengatakan kalau bulan ini bikin rumah takut kebakaran, yang kedua yang kerja tidak terlalu segar atau suka lemes. Saya sendiri pernah mengalami, jadi kita hidup di rumah itu tidak nyaman, kurang enak, gelisah.” (FP/D02/01/01)

Ketiga informasi yang diberikan narasumber tersebut dapat disederhanakan dalam bentuk yang lebih sederhana, input, proses, dan output sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL IV.8
TELAAH TEMUAN KASUS

NARASUMBER	INPUT	PROSES	OUTPUT
PB 1	Belum diketahui	Pembangunan rumah	Anak sakit, ketakutan, tidak bisa tidur
PB 2	Belum diketahui	Pembangunan rumah	Perasaan gelap, perasaan berat
TM	Bulan ini	Pembangunan rumah	Tidak nyaman, kurang enak, gelisah

Sumber : analisis penulis, 2010

Keterangan : PB = penerima bantuan, TM = tokoh masyarakat.

Input yang disampaikan tokoh masyarakat tersebut adalah bulan ini, yang menunjukkan waktu tertentu. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa waktu menjadi input dari sebuah proses pembangunan rumah dan menghasilkan kondisi

“negatif” bagi penghuni. Ketika waktu pembangunan rumah tersebut tepat, dalam arti sesuai rencana atau kesiapan penghuni, hasil pembangunan rumah tersebut sudah dalam perkiraan penghuni dan dapat diterima dengan baik. Sebaliknya bila waktu pembangunan tidak sesuai rencana atau kesiapan penghuni, tentunya penghuni juga tidak dapat dengan mudah menerimanya. Dalam kaitannya dengan lomba rumah yang terikat oleh waktu – hanya 14 hari, dan dilaksanakan serentak di 10 desa, setiap penghuni di 43 rumah tersebut belum tentu merasa siap. Apalagi informasi ini tidak diberikan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pembangunan.

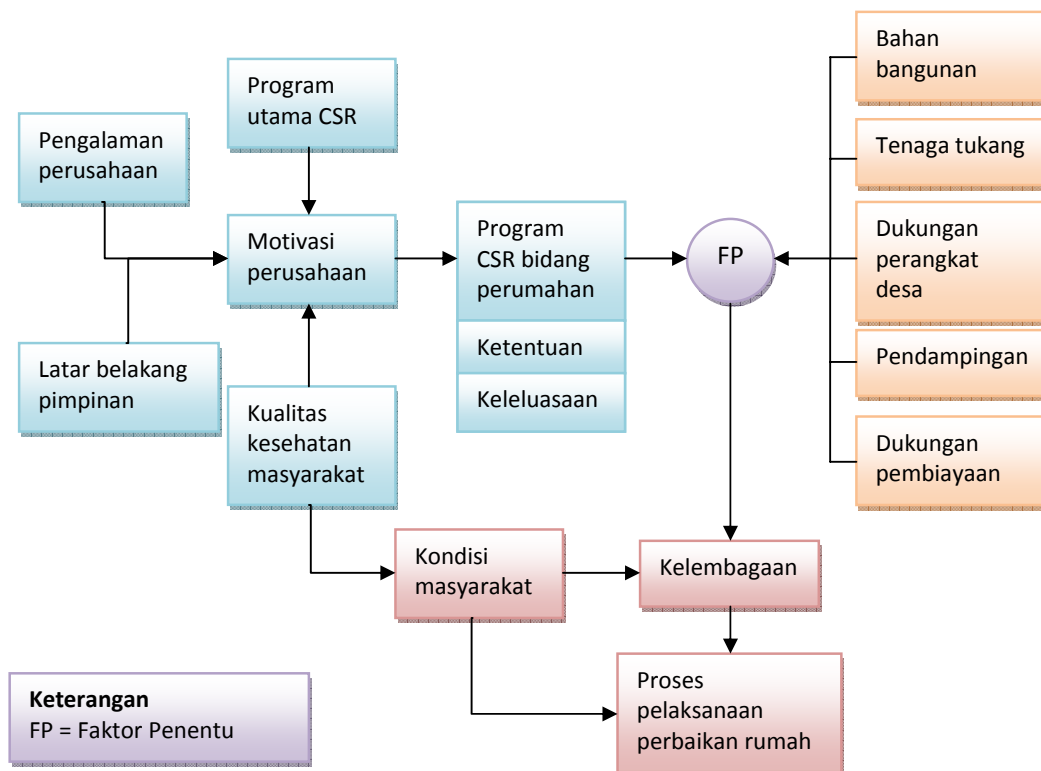
4.4. Pembahasan Keterkaitan Hasil Analisis

Dalam sub bab ini dijabarkan mengenai keterkaitan antar setiap hasil analisis meliputi hasil analisis karakteristik program CSR bidang perumahan, karakteristik penerapan CSR bidang perumahan, dan faktor-faktor terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Pembahasan keterkaitan antar analisis menghasilkan faktor penentu terhadap terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di wilayah penelitian sebagaimana digambarkan dalam Gambar IV.15.

Motivasi perusahaan dalam menginisiasi program CSR bidang perusahaan dipengaruhi oleh pengalaman perusahaan baik positif maupun negatif selama beroperasinya perusahaan tersebut serta latar belakang pimpinan CSR. Pengalaman positif diperoleh dari dukungan perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Nanggung, sedangkan pengalaman negatif diperoleh dari banyaknya *gurandil* yang melakukan penambangan liar di sekitar wilayah operasi perusahaan. Latar belakang pimpinan CSR dari sisi pendidikan menurut hasil analisis tidak memberikan pengaruh terhadap inisiasi program. Adapun pengalaman intelektual pimpinan CSR yang telah cukup lama berkecimpung dalam penanganan permasalahan di tingkat masyarakat, cukup memberikan kontribusi dalam pemilihan bentuk program. Berdasarkan hasil analisis karakteristik program CSR bidang perumahan, penentuan bentuk program didasarkan atas permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat yakni persoalan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam rangka menanggulangi permasalahan

tersebut, perusahaan melakukan identifikasi kesesuaian kebutuhan penanganan dengan program-program utama CSR agar lebih mudah dialokasi penganggarnya.

Bentuk program CSR bidang perumahan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor adalah kompetisi perbaikan rumah antar desa. Dalam lomba antar desa tersebut pihak perusahaan memberikan ketentuan yang terdiri atas besaran stimulan yang diberikan, jumlah minimal rumah yang harus dibangun, batas waktu pelaksanaan pembangunan rumah, adanya insentif dan sanksi. Disamping adanya ketentuan tersebut, penerapan program CSR bidang perumahan diserahkan kepada masing-masing desa peserta lomba perbaikan rumah. Melalui kewenangan tersebut, setiap desa memiliki keleluasaan untuk menerapkan program pembangunan rumah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

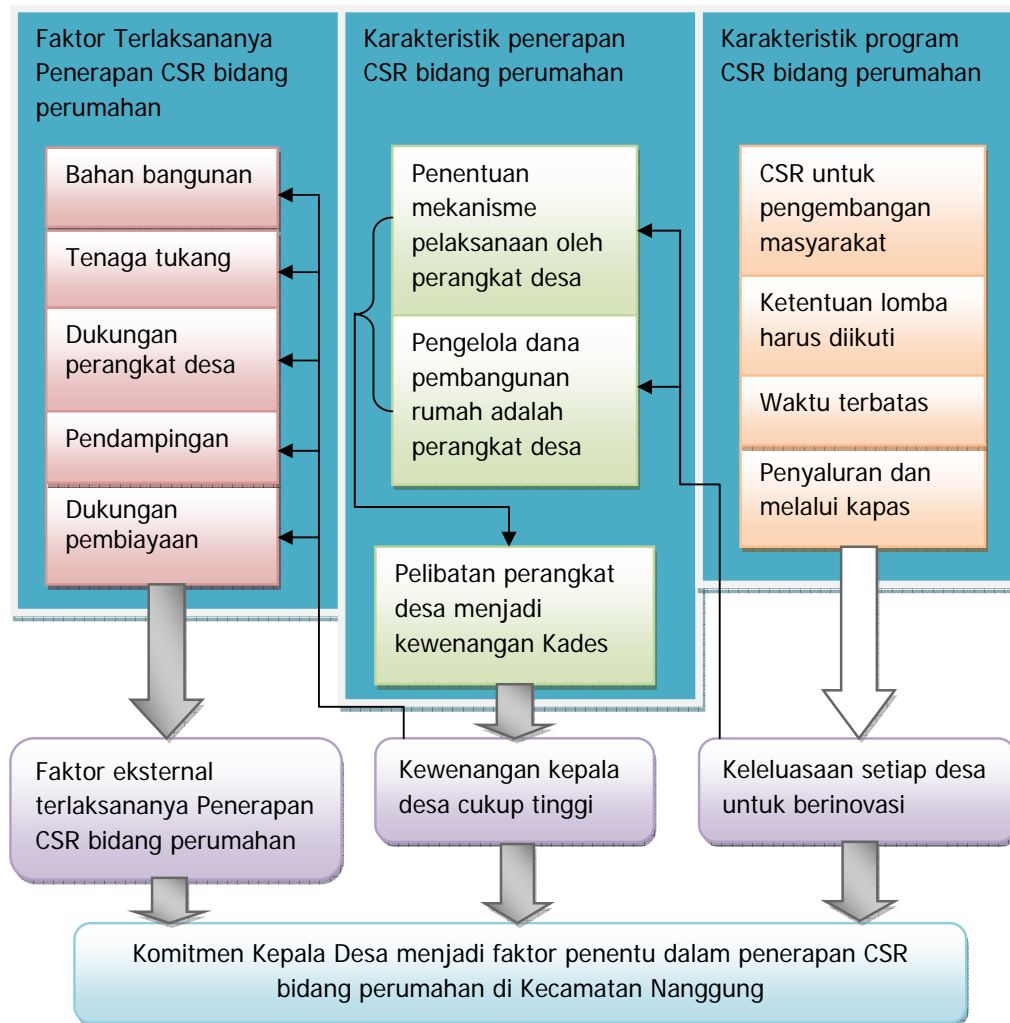


Sumber : hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.15
KETERKAITAN KARAKTERISTIK PROGRAM, PENERAPAN,
FAKTOR YANG MEMENGARUHI TERLAKSANANYA CSR BIDANG
PERUMAHAN

Berdasarkan hasil analisis karakteristik penerapan CSR bidang perumahan di 10 desa se Kecamatan Nanggung, didasarkan atas kondisi masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah, kelembagaan pembangunan rumah, dan proses pelaksanaan pembangunan rumah. Proses pembangunan rumah meliputi sosialisasi adanya kegiatan, pemilihan penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan rumah, dan pemeliharaan. Proses pembangunan rumah di setiap desa memiliki karakteristik beragam yang sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan kelembagaan dalam pelaksanaan lomba perbaikan rumah antar desa. Kelembagaan pembangunan rumah meliputi pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan dan mekanisme atau aturan main yang diberlakukan. Penentuan kelembagaan juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat di setiap desa, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas fisik rumah yang ditinggali. Dalam menentukan penerima bantuan yang sangat terbatas jumlahnya – minimal tiga rumah, pelaku pembangunan rumah di setiap desa melakukan seleksi cukup ketat agar tidak terjadi kecemburuan. Di beberapa desa seperti Desa Cisarua, Kalong Liud, dan Parakan Muncang, kecemburuan ini terjadi dan diselesaikan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pelaku yang terlibat dalam banyak proses pelaksanaan pembangunan rumah di setiap desa didominasi oleh perangkat desa. Masyarakat penerima bantuan yang rata-rata miskin, tidak memiliki rumah atau menghuni rumah yang tidak layak, hanya terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rumah, sedangkan pada tahap persiapan hampir tidak diikutsertakan.

Hasil analisis faktor diketahui bahwa ketersediaan bahan bangunan, ketersediaan tenaga tukang, adanya dukungan perangkat desa, adanya pendampinga, dan adanya dukungan pembiayaan, merupakan faktor pendorong terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan di desa-desa se Kecamatan Nanggung. Bila kelima faktor tersebut tidak ada atau tidak tersedia, penerapan CSR bidang perumahan melalui lomba perbaikan rumah antar desa dapat terhambat. Ketersediaan faktor tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor yang paling menentukan terlaksananya pembangunan rumah. Pembahasan mengenai faktor penentu tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 4.16.



Sumber : hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.16
FAKTOR PENENTU PENERAPAN CSR BIDANG PERUMAHAN DI
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

Program CSR bidang perumahan yang dirancang oleh PT. Aneka Tambang Tbk. memiliki karakter performa yang cenderung ke arah memenuhi tanggung jawab etika dan legal/hukum. Hal ini tampak dalam hasil analisis karakteristik program CSR bidang perumahan dari sisi motivasi perusahaan, latar belakang perusahaan, dan latar belakang pimpinan. Kecenderungan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap etika dan hukum ini pula tercermin dalam latar belakang dipilihnya program CSR bidang perumahan dengan pola kompetisi antar desa guna meningkatkan kesehatan masyarakat miskin di 10 desa

Kecamatan Nanggung. Ketentuan lomba meliputi jumlah rumah yang harus diperbaiki, waktu yang terbatas, dan stimulan sejumlah dana. Melalui karakter tersebut dapat menggambarkan bahwa program tersebut dirancang dalam upaya mengembangkan masyarakat dengan memberikan keleluasaan bagi setiap desa untuk berinovasi dalam menerapkan ketentuan lomba perbaikan rumah.

Berdasarkan keleluasaan tersebut, setiap desa menentukan mekanisme pelaksanaan perbaikan rumah, dan menetapkan pengelola dana perbaikan rumah stimulan dari perusahaan donor. Bila diperhatikan pelaku penentuan mekanisme dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terlibat oleh adanya kewenangan kepala desa yang memang diberi keleluasaan melalui ketentuan lomba, berdasarkan kondisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepala desa memiliki kewenangan yang cukup tinggi dalam penerapan CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor.

Masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah menilai faktor-faktor yang memengaruhi terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan adalah ketersediaan bahan bangunan, ketersediaan tenaga tukang, dukungan perangkat desa, pendampingan, dan ketersediaan pembiayaan. Berdasarkan analisis faktor, memang urutan kontribusi tertinggi adalah pada faktor ketersediaan bahan bangunan, namun bila dikaitkan dengan keseluruhan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa peran kepala desa yang menjadikan penerapan CSR bidang perumahan dapat terlaksana atau tidak.

Komitmen pimpinan desa sebenarnya tidak secara eksplisit menjadi faktor dalam penerapan CSR bidang perumahan dalam kajian ini, namun menjadi bagian dari faktor dukungan perangkat desa. Sebagaimana diketahui bahwa perangkat desa terdiri atas jajaran aparat pengurus pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sejak dari awal perbaikan rumah melalui lomba ini memang dirancang untuk mengembangkan peran perangkat desa khususnya kepala desa, ini terlihat ketika kegiatan ini mulai diperkenalkan atau pada tahap sosialisasi. Pihak perusahaan melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan lomba perbaikan rumah langsung kepada kepala desa tanpa perantara pihak

lainnya termasuk pihak kecamatan, berikut ini pernyataan yang menguatkan mengenai hal tersebut.

“.....langsung ke kepala desa, misalkan ada sisa anggaran atau program apa dari tambang langsung ke desa aja, ke kecamatan itu nggak, kadang-kadang ga ada pemberitahuan. Kalau tambang kan kalau mengadakan sosialisasi kadang-kadang di tambang, kadang-kadang di luar wilayah gitu, yang diundang paling kepala desanya aja.” (FP/K/01/02)

Dalam mendorong keseriusan perangkat desa, pihak perusahaan inisiator kegiatan juga memberikan insentif bagi 3 desa yang memenuhi kualitas penerapan CSR bidang perumahan secara baik. Disamping itu juga diterapkan sanksi terhadap desa yang tidak melakukan pembangunan rumah bagi masyarakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian insentif berupa sejumlah dana merupakan bentuk penghargaan kepada desa yang merealisasikan komitmennya dalam perbaikan rumah, yang dapat dimanfaatkan bagi penambahan kas desa. Penyediaan insentif ini dipahami oleh para kepala desa sebagai reward bagi kepala desa yang telah menjalankan kegiatan ini. Berikut ini beberapa cuplikan pernyataan tiga kepala desa yang memperoleh juara 1, 2 dan 3 yakni Desa Cisarua, Desa Bantar Karet, dan Desa Sukaluyu.

“Kalau saya kan apa ni, kalau bahasa kita mah nazar, kalau juara satu, saya kasih anak yatim, ternyata kita juara 3 kan 5 juta, sebagian saya berikan ke anak yatim sebagian saya gunakan untuk keperluan kita karena tidak ada ketentuan dari antam tentang penggunaan dana hadiah untuk apa.” (FP/D10/01/01)

“Dana untuk perangsang untuk Kepala Desa agar program ini dijalankan.” (FP/D05/01/02)

“Waktu itu dimanfaatkan untuk pengaspalan Kampung Langkop, lewat Sukamanah sedikit. Karena waktu itu lebaran, uang bukan untuk anu.” (FP/D02/01/01)

Dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah di setiap desa, peran kepala desa sangat kentara mulai dari pemilihan calon penerima bantuan hingga pelaksanaan pembangunan rumah. Hampir di setiap desa kepala desa terlibat secara langsung proses pelaksanaan. Berikut ini pernyataan yang menyebutkan peran-peran tersebut.

“Diantara banyak rumah yang bambu dan atap cuma ini. Hasil keputusan orang Antam survei dan keputusan kepala desa.” (FP/D10/01/02)

“Kaget aja malem-malem pak lurah kesini, ada sumbangan dari Antam, ya saya terima dengan ikhlas, ya dikasih tahu ma Pak RT Pak RW.” (FP/D05/01/01)

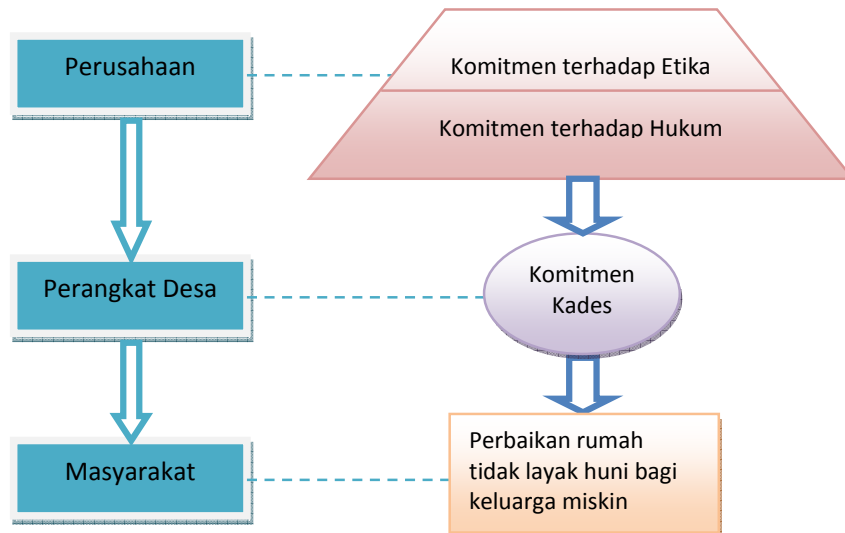
“Inisiatif dari Bapak (Kepala Desa - pen). Semua lingkungan RT RW dilibatkan, separe ada yang membantu.” (FP/D06/01/01)

“Trus untuk proses pemilihan warga ini kami serahkan kepada kepala desa dan perangkatnya, tentunya dalam hal ini pasti ada pilihan tidak objektif. Dan kita pahami pasti ada semacam itu, yang kita bidik adalah keterbukaan perangkat desa untuk menyalurkan itu kita biarkan aja, toh pada dasarnya yang kita lakukan adalah ada kriteria yang diperbaiki di sini (TOR-pen).” (FP/P/02/01)

Pernyataan keempat di atas selain menerangkan tentang pentingnya peran kepala desa juga menggambarkan bahwa kepala desa menjadi aktor kunci dalam lomba perbaikan rumah antar desa se Kecamatan Nanggung. Komitmen kepala desa dalam penerapan CSR bidang perumahan ini ternyata juga disadari dan diakui oleh perusahaan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor selaku peluncur program. Kepala desa yang bertanggung jawab dan memahami konsep rumah sehat, dapat melakukan perbaikan kualitas rumah warganya sesuai dengan syarat kehandalan bangunan, kecukupan ruang, dan kesehatan bagi penghuni. Sebaliknya kepala desa yang kurang bertanggung jawab dan kurang memahami ketentuan rumah sehat, cenderung melakukan perbaikan rumah tanpa terlalu memerhatikan kualitas rumah warganya.

Secara keseluruhan penerapan CSR bidang perumahan pada wilayah binaan PT. Aneka Tambang Tbk. Unit Bisnis Pertambangan Emas Pongkor di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor merupakan implementasi dari suatu program CSR. Program CSR bidang perumahan tersebut mengikuti pola *top down* dari perusahaan kepada masyarakat melalui perangkat desa. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial atas beroperasinya perusahaan tambang di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, perusahaan mengalokasikan sejumlah dana pembangunan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat miskin di wilayah ini. Pola dari atas ke bawah ini terjadi oleh adanya etika perusahaan dan komitmen perusahaan terhadap hukum atau kebutuhan masyarakat yang mengemuka terkait dengan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Upaya penanganan permasalahan kesehatan masyarakat dilakukan melalui perbaikan lingkungan yang terdekat dengan masyarakat yaitu rumah.

Kondisi rumah yang tidak layak atau tidak sehat dipahami sebagai salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah kesehatan masyarakat.



Sumber : hasil analisis, 2010

GAMBAR 4.17
KOMITMEN TERHADAP PERBAIKAN KUALITAS RUMAH

Gambar 4.17 memberikan pemahaman bahwa perusahaan secara *top down* memprogramkan upaya pembangunan rumah berdasarkan komitmen etika dan hukum yang berlaku melalui pelibatan perangkat desa sebagai mediator antara perusahaan dengan masyarakat. Peran mediasi ini cukup penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak dengan sumber daya berupa dana stimulan yang tidak dimiliki masyarakat. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa komitmen kepala desa merupakan faktor penentu dalam penerapan CSR bidang perumahan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Berhasil-tidaknya penerapan CSR bidang perumahan ditentukan oleh tinggi-rendahnya komitmen kepala desa. Bila komitmen kepala desa untuk meningkatkan kesejahteraan warganya tinggi, program CSR bidang perumahan yang dirancang perusahaan secara *top down* tetap dapat berkontribusi dalam memperbaiki kualitas rumah masyarakat miskin.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

1. Program CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. Unit Pertambangan Emas Pongkor (UPBE) Pongkor dirancang berdasarkan kondisi kesehatan masyarakat di 10 desa Kecamatan Nanggung serta penjabaran program utama CSR dalam hal peningkatan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Berdasarkan teori tentang performa tanggung jawab sosial perusahaan, CSR bidang perumahan yang dirancang oleh PT. Aneka Tambang Tbk. UPBE cenderung masuk dalam kategori memenuhi aspek etika dan hukum.
3. Perbaikan rumah dengan pola kompetisi memberikan peluang kepada setiap desa untuk menerapkan kebijakan dan inovasi sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
4. Dalam penerapan CSR bidang perumahan, peran kepala desa cukup penting dan komitmen merekalah yang menjadikan proses pembangunan ini berlangsung. Setiap desa, kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab, perangkat desa (RT, RW) sebagai pengelola dana dan pelaksana pembangunan, penerima bantuan membantu dalam proses pembangunan sesuai kemampuan yang dimiliki.
5. Swadaya masyarakat yang dapat ditimbulkan dari kegiatan lomba perbaikan rumah antara lain adalah kesediaan warga lain untuk meminjamkan tanahnya dibangun bagi penerima bantuan perbaikan rumah yang belum memiliki rumah. Peminjaman lahan ini ada di Desa Cisarua dan Bantar Karet yang selanjutnya akan diselesaikan melalui proses jual beli dengan harga yang disepakati bersama.
6. Tipologi penerapan CSR bidang perumahan oleh PT. Aneka Tambang Tbk. UPBE Pongkor meliputi 3 hal yaitu :
 - a. Tipologi penerima bantuan pembangunan rumah sehat, yang terdiri atas :

- 1) Keluarga miskin, jompo, tinggal di rumah tidak layak huni;
 - 2) Keluarga miskin, banyak anak (ada anak balita), tinggal di rumah tidak layak huni;
 - 3) Keluarga miskin, tidak memiliki rumah.
- b. Tipologi kebijakan desa dalam pembangunan rumah sehat :
- 1) Lokasi penerima bantuan tersebar di wilayah desa dalam rangka pemerataan, pelaksanaan pembangunan rumah secara serentak;
 - 2) Lokasi penerima bantuan mengelompok dalam satu kampung dalam rangka mengurangi jumlah rumah tidak layak huni kampung tersebut karena terlalu besar, pelaksanaan pembangunan secara bergiliran.
 - 3) Lokasi penerima bantuan mengelompok dan pelaksanaan pembangunan secara serentak.
- 4) Tipologi pelaksanaan pembangunan rumah :
- 1) Perbaikan ringan tanpa pembongkaran struktur bangunan;
 - 2) Pemugaran rumah dengan pembongkaran struktur bangunan lama di lokasi bekas bangunan lama;
 - 3) Pembangunan rumah melalui pembongkaran struktur bangunan, di lokasi dekat dengan bangunan lama;
 - 4) Pembangunan rumah baru.
7. Tipologi pembangunan rumah melalui pemugaran rumah dengan perbaikan struktur bangunan, pembangunan rumah di lokasi dekat lokasi bangunan lama, dan pembangunan rumah baru, memiliki kontribusi dalam peningkatan kualitas rumah khususnya dalam pemenuhan kehandalan bangunan.
8. Tipologi pelaksanaan pembangunan melalui pengecatan rumah atau perbaikan ringan, tidak memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas rumah.
9. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terlaksananya penerapan CSR bidang perumahan melalui kegiatan lomba perbaikan rumah sehat di 10 desa Kecamatan Nanggung meliputi adanya 1) ketersediaan bahan bangunan, 2) ketersediaan tenaga tukang, 3) dukungan perangkat desa, 4) adanya pendampingan, dan 5) dukungan pembiayaan.

10. Tanggapan masyarakat terhadap penerapan program CSR bidang perumahan melalui lomba perbaikan rumah sehat ini cukup beragam, dari sisi kecamatan, desa, dan sebagian masyarakat menilai bahwa perbaikan rumah sehat tersebut cukup bagus dan memberi manfaat bagi kesehatan masyarakat. Di sisi lain ditemukan adanya keluhan penerima bantuan yakni di Desa Kalong Liud bahwa kondisi rumah setelah diperbaiki membawa dampak negatif bagi penghuni.
11. Keterkaitan antara karakteristik program CSR bidang perumahan yang dirancang oleh PT. Aneka Tambang Tbk., karakteristik penerapan, dan faktor terlaksananya perbaikan rumah di setiap desa, ditentukan oleh komitmen perangkat desa dalam hal ini kepala desa.
12. CSR bidang perumahan sebagaimana diprogramkan oleh perusahaan merupakan program top down yang didasari atas komitmen terhadap etika dan hukum untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat miskin.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi bagi pengembangan pengetahuan :

1. Perlu ada studi evaluasi penerapan CSR bidang perumahan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor untuk mengetahui sejauhmana tujuan dan sasaran program dapat tercapai.
2. Perlu ada kajian tentang upaya menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah akibat stimulan yang diberikan melalui penerapan CSR bidang perumahan di 10 desa se Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
3. Perlu ada kajian lebih lanjut tentang hubungan antara penetapan hari baik dalam pembangunan rumah.
4. Perlu ada kajian tentang tingkat dukungan perusahaan tambang terhadap pembangunan perumahan di lingkaran tambang sebagai wilayah pengaruh operasional perusahaan.
5. Perlu ada penelitian tentang identifikasi jumlah rumah layak huni di desa-desa Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dan potensi yang dapat dikembangkan dalam penanganan permasalahan tersebut.

Rekomendasi bagi desa-desa pelaksana penerapan CSR bidang perumahan :

1. Dalam penyusunan rencana pembangunan rumah bagi masyarakat agar melibatkan calon penerima bantuan, sehingga masyarakat dapat menerima hasil pembangunan rumahnya dengan baik dan mau memeliharanya.
2. Dalam pembangunan seharusnya mengacu pada ketentuan standar kesehatan rumah sehingga kondisi rumah dapat memenuhi syarat keselamatan bangunan, kecukupan ruang, dan kesehatan penghuni.
3. Inovasi peminjaman lahan dari warga tetangga kepada penerima bantuan, agar segera ditindaklanjuti dengan proses pengalihan hak tanah melalui kesepakatan bersama.
4. Setiap desa agar segera mengidentifikasi penduduk di wilayah setempat yang belum menghuni rumah yang layak, selanjutnya mengupayakan agar menggali keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mengupayakan sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan.

Rekomendasi untuk perbaikan program CSR bagi PT. Aneka Tambang Tbk.

1. Agar PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor bersama perangkat desa setempat melakukan evaluasi terhadap penerapan CSR bidang perumahan yang telah dilakukan dan melakukan tindak lanjut dalam hal-hal yang memerlukan penyelesaian.
2. Setiap desa masih memiliki sejumlah rumah tidak layak huni yang dapat menurunkan kualitas kesehatan penghuninya, melalui program CSR bidang perumahan, diharapkan PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor dapat meningkatkan alokasi penanganan
3. Agar perusahaan melaporkan kegiatan lomba perbaikan rumah sehat antar desa se Kecamatan Nanggung dalam laporann tahunan ataupun laporan yang dapat dipublikasikan ke khalayak, sebagai pengalaman dalam penerapan CSR bidang perumahan yang dapat dicontoh instansi atau perusahaan lain.

Rekomendasi bagi pemerintah

1. Program CSR bidang perumahan yang telah dilakukan di setiap desa Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor merupakan contoh dukungan pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin dari lembaga non pemerintah yang patut dikembangkan sebagai salah model pembangunan perumahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Syarat rumah sehat belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat di 10 desa se Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, untuk itu Pemerintah Kecamatan Nanggung ataupun Kabupaten Bogor agar dapat melakukan penyuluhan tentang rumah sehat di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Mulya dan Sarosa, Wicaksono. 2008. *CSR untuk Penguatan Kohesi Sosial*. Indonesia Business Links.
- Arena, Christine. 2008. *The High Purpose Company Tren Terbaru dalam Bisnis: Perusahaan Bertanggung Jawab dan Berprofit Tinggi*. PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rineka Cipta.
- Budihardjo, Eko (ed). 2009. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. PT. Alumni, Bandung.
- Chapple, Wendy dan Moon, Jeremy. 2005. "Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study of CSR Web Site Reporting." *Business and Society*. Sage Publications, Inc.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Epstein, Marc J. 2008. Making Sustainability Work Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impact. Green Leaf Publishing Limited. [situs Amazon] [Online]. Dapat diperoleh di http://www.amazon.com/Making-Sustainability-Work-Practices-Environmental/dp/1576754863#reader_1576754863. Diakses pada 30 Oktober 2008.
- Garriga, Elisabet dan Mele, Dome`nec. 2004. "Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory." *Journal of Business Ethics*, 51–71, Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Hall, Anthony dan Midgley, James. 2004. "Social Policy for Development." *Sage Publications*.
- Henningfeld, Judith (Ed); Manfred, Pohl (Ed); dan Tolhurst, Nick (Ed). 2006. *The ICCA Handbook of CSR*. [situs Amazon] [Online]. Dapat diperoleh di http://www.amazon.com/ICCA-Handbook-Corporate-Social-Responsibility/dp/0470057106#reader_0470057106. Diakses pada 30 Oktober 2009.
- Jalal. 2009. "Mengapa Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas Digugat? Wahana Hubungan antara Negara dengan CSR." *Busines & CSR*, Vol. 2 No. 9 Januari-Februari.
- . 2009. *Membaca Upaya Yusuf Wibisono "Membedah" CSR*. [situs CSR Indonesia] [Online]. Dapat diperoleh di <http://www.csrindonesia.com>. Diakses pada 2 November 2009.
- Kiroyan, Noke. 2009. "CSR Compliance and Business Opportunities." Materi presentasi disampaikan pada pertemuan Amerika Chamber in Indonesia, 26 Mei 2009.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Penerbit Djambatan.

- Korten, David C. 1995. *When Corporations Rule the World*. Kumarian Press, Inc. Dan Berrett Publishers, Inc.
- Leimona, Beria dan Fauzi, Aunul. 2008. *CSR dan Pelestarian Lingkungan Mengelola Dampak : Positif dan Negatif*. Indonesia Business Links.
- McWilliams, Abigail, Siegel, Donald, dan Teoh, Siew Hong. 1999. "Issues in the Use of the Event Study Methodology: A Critical Analysis of Corporate Social Responsibility Studies." *Organizational Research Methods*, Vol. 2 No. 4, October. Sage Publications, Inc.
- Merwanto, D. Sandi. 2009. "PT. Jababeka Tbk. Komitmen pada Lingkungan dan Masyarakat." *Bisnis & CSR*. Vol. 2 No. 9 Januari-Februari.
- Nasution. S. 2009. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. PT. Bumi Aksara.
- Noerman, Suherman. 2009. "Santiago-Chile Round The 6th Plenary Meeting of WG SR of 26000." *Bisnis & CSR*. Vol. 2 No. 9 Januari-Februari.
- O'Riordan, Linda dan Fairbrass, Jenny. 2006. "Corporate Social Responsibility (CSR) Models and Theories in Stakeholder Dialogue." Makalah disampaikan pada Corporate Responsibility Research Conference, Trinity College Dublin, Irlandia, 4-5 September 2006.
- Pitaloka, Dini Arias. 2009. "Peranserta Wanita dalam Mempelopori Gaya Hidup Berwawasan Lingkungan di RW 03 Kelurahan Pasar Minggu Jakarta Selatan." Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Radyati, Maria R. Nindita. 2008. *CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Indonesia Business Links.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Medpress.
- Rodríguez, Linda C dan LeMaster Jane. 2007. "Voluntary Corporate Social Responsibility Disclosure: SEC "CSR Seal of Approval"." *Business and Society*. Sage Publications, Inc.
- Smith, Wanda J, Wokutch, Richard E, Harrington, K. Vernard, dan Dennis, Bryan S. 2001. "An Examination of the Influence of Diversity and Stakeholder Role on Corporate Social Orientation." *Business and Society*. Sage Publications, Inc.
- Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Penerbit Salemba Empat.
- Suprianto, Thendri. 2009. "Spirit CSR di Segala Sektor". *Bisnis & CSR*. Vol. 2 No. 9 Januari-Februari.
- Suyanto, Bagong (Ed) dan Sutinah (Ed). 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Media Group.
- Turner, John F.C. 1976. *Housing by People Towards Autonomy in Building Environments*. Marion Boyars London.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. CV. Ashkaf Media Grafika Surabaya.

- Widjaya, Gunawan dan Pratama, Yeremia Ardi. 2008. *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Wilburn, Kathleen. 2008. "A Model for Partnering with Not-for-Profits to Develop Socially Responsible Businesses in a Global Environment." *Journal of Business Ethics*. Springer.
- Young, Suzanne dan Thyil, Vijaya. 2009. "Governance, Employees and CSR: Integration is the Key to Unlocking Value." *Asia Pacific Journal of Human Resources*. Sage Publications, Inc.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. 1992. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 1999. Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2007. Pemerintah Republik Indonesia.
- Masterplan Corporate Social Responsibility PT. Aneka Tambang Tbk. PT. Aneka Tambang Tbk.
- Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM Mandiri Perkim). 2009 Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya. 2007. Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- Potensi Desa-desa se Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
- Profil Dunia Usaha Penerima Penghargaan Menpera atas Pelaksanaan TJSL di Bidang Perumahan. 2009. Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- Term of Reference Lomba Perbaikan Rumah Sehat antar Desa se Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. PT. Aneka Tambang Tbk. UBPE Pongkor.
- Komitmen Antam Pada CSR. [Situs Portalhr] [Online]. Dapat diperoleh di <http://www.portalhr.com/majalah/edisisebelumnya/hubungan/1id811.htm> 1. Diakses pada 2 November 2009.
- 50 Persen Penduduk Kab. Bogor belum Punya MCK. [Situs Harian Pikiran Rakyat] [Online]. Dapat diperoleh di <http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=104944>. Diakses pada 5 November 2009.